

**DINAMIKA PARTAI POLITIK ISLAM  
KOTA MEDAN TAHUN 2004-2009  
(Studi Kasus: Partai Persatuan Pembangunan  
(PPP))**

**T E S I S**

Oleh:

**ZULKARNAEN SITANGGANG**  
**NIM: 09 PEMI 1409**



**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 2**

**DINAMIKA PARTAI POLITIK ISLAM  
KOTA MEDAN TAHUN 2004-2009  
(Studi Kasus: Partai Persatuan Pembangunan  
(PPP)**

**T E S I S**

Oleh:

**ZULKARNAEN SITANGGANG**  
**NIM: 09 PEMI 1409**



**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Prof.Dr.H.HASAN BAKTI NST, MA**  
**NIP. 19620814 199263 1 003**

**Prof.Dr.KATIMIN, MA**  
**NIP. 19650705 199303 1 003**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 2**

## **Persetujuan**

Tesis berjudul:

**“DINAMIKA PARTAI POLITIK ISLAM KOTA MEDAN TAHUN 2004-  
2009 (Studi Kasus: Partai Persatuan Pembangunan (PPP))”**

Oleh:

**ZULKARNAEN SITANGGANG**  
**NIM: 09 PEMI 1409**

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Master of Art (MA) pada program studi Pemikiran Islam (PEMI)  
Program Pascasarjana IAIN SU Medan

Medan, .....2012

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Prof.Dr.H.HASAN BAKTI NST, MA**  
**NIP. 19620814 199263 1 003**

**Prof.Dr.KATIMIN, MA**  
**NIP. 19650705 199303 1 003**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Pribadi**

1. Nama : **Zulkarnaen Sitanggang**
2. NIM : 09 PEMI 1409
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kota Pinang/01 Januari 1968
4. Umur : 44 Tahun
5. Alamat Rumah : Jln. Kapten M. Jamil Lubis No. 53 Kelurahan  
: Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung,  
: Kota Medan

### **B. Keluarga**

1. Istri : **Syafridah Harahap**
  - a. Pendidikan : SMU
  - b. Tempat/Tgl Lahir : Medan/5 Mei 1970
  - c. Pekerjaan : PNS Polri, Kesatuan SPN Sampali
2. Anak : **A. Wahyudi Pratama Sitanggang**
  - a. Pendidikan : Kelas VII-B Al-Ulum Jln. Tuasan Medan
  - b. Tempat/Tgl Lahir : Medan, 11 Agustus, 1997.

### **C. Pendidikan**

1. Tahun 1982, Tamat SD Negeri No. 114618 Kecamatan Kota Pinang.
2. Tahun 1985, Tamat SMP Negeri I Kota Pinang.
3. Tahun 1988, Tamat MAS Kota Pinang.
4. Tahun 1993, Tamat IAIN SU Medan Fakultas Ushuluddin, Jurusan Perbandingan Agama.
5. Tahun 2011, Mahasiswa Strata 2 (Magister) Pascasarjana IAIN SU Medan, Program Studi Pemikiran Islam.

#### **D. Pengalaman Organisasi**

1. Tahun 1986-1987, Ketua OSIS MAS Kota Pinang.
2. Tahun 1986, Anggota PII (Pelajar Islam Indonesia) Rantau Prapat.
3. Tahun 1991, Anggota HMI Cabang Medan.
4. Tahun 2006-2009, Komwil Brigade BKPRMI SU.
5. Tahun 2011-2015, Wakil Sekretaris MUI Kota Medan
6. Tahun 2011-2014, Pengurus KNPI Sumatera Utara.
7. Pendiri LSM Mutia Artha Pusaka Sumut.
8. Pendiri LSM Drugs Information Center.

#### **E. Pengalaman Pekerjaan**

1. Tahun 1994-1996, Staf Pengajar di SMP Martadinata, Pulau Brayan, Medan
2. Tahun 1995-1997, Staf Pengajar di SMP PGRI Pulau Brayan, Medan.
3. Direktur CV. Zusafwah

#### **F. Pengalaman Perjuangan**

1. Memperjuangkan RUU APP Dengan Biro Perempuan Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara Dengan Hj. Sabrina, R. Msi.
2. Tim Percepatan Pemekaran Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Selatan.

W a s s a l a m

Penulis

**ZULKARNAEN SITANGGANG**  
**NIM: 09 PEMI 1409**

## ABSTRAKSI

Zulkarnaen Sitanggang, NIM: 09 PEMI 1409, **Dinamika Partai Politik Islam Kota Medan Tahun 2004-2009 (Studi Kasus: Partai Persatuan Pembangunan (PPP)).**

Penelitian lapangan dalam bentuk kualitatif ini dilakukan untuk mengetahui dinamika partai politik Islam di Kota Medan Pemilu Tahun 2004-2009, dengan studi kasus pada salah satu partai politik Islam, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah selesai dilakukan untuk mencapai tujuan: (1) Untuk mengetahui dinamika perkembangan partai politik Islam di Kota Medan hasil pemilu pada tahun 2004-2009, khususnya PPP, (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadi penurunan perolehan suara dan kursi di DPRD Kota Medan dari partai politik Islam, khususnya PPP, (3) Untuk mengetahui respon umat Islam terhadap keberadaan partai politik Islam, khususnya PPP dalam mengakomodir kepentingan umat Islam, (4) Untuk mengetahui problematika yang dihadapi oleh partai politik Islam khususnya PPP dalam mengapresiasi kepentingan dan dukungan umat Islam dan upaya mengatasinya.

Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan 20 Februari 2012. Lokasi penelitian adalah di Kota Medan, tepatnya pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Medan dan masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Medan sebagai obyek penelitian ini. Alat pengumpul data adalah wawancara dan observasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan wawancara terhadap orang-orang yang dianggap memiliki kredibilitas (berkemampuan) untuk memberikan penjelasan terhadap penelitian yang dilakukan, serta melakukan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam bentuk analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan antara lain: (1) dinamika perkembangan partai politik Islam di Kota Medan hasil pemilu pada tahun 2004-2009, khususnya PPP mengalami degradasi (penurunan) jumlah pemilih (suara) dan kursi yang diperoleh di DPRD Kota Medan. (2) Faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan suara dan kursi yang diperoleh PPP Kota Medan antara lain: lemahnya dukungan masyarakat terhadap PPP, program kegiatan kurang menarik bagi masyarakat, kurangnya daya tarik dari figur tokoh PPP Kota Medan, dan persaingan antar partai politik. (3) Respon umat Islam terhadap eksistensi PPP dalam mengakomodir kepentingan umat Islam, dilihat dari dua sisi, yakni sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif umat Islam yang diwakili oleh Ketua MUI Kota Medan dan mantan Ketua PW Al-Washliyah Sumut menyatakan bahwa PPP sudah mampu merespon kepentingan umat Islam untuk diperjuangkan kepada pemerintah, baik secara langsung maupun melalui DPRD Kota Medan. Sementara itu respon negatif dikemukakan oleh salah seorang anggota LSM memandang bahwa PPP kurang mampu mengakomodir kepentingan umat Islam, dan malah banyak berpihak kepada penguasa pada saat sekarang ini. (4) Problematika yang dihadapi berupa problematika internal PPP Kota Medan dan problematika eksternal PPP Kota Medan.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan keluangan waktu untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Sholawat beriring salam disampaikan kepada Baginda junjungan ‘alam Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya kepada jalan kebenaran yang diridhoi Allah SWT dari dunia sampai ke akhirat.

Tesis ini berjudul *“Dinamika Partai Politik Islam Kota Medan Tahun 2004-2009 (Studi Kasus: Partai Persatuan Pembangunan (PPP))”*, ditulis dengan tujuan untuk menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar sarjana strata dua (S.2)/Magister pada program studi Pemikiran Islam Program Pascasarjana IAIN SU Medan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Tesis ini terutama kepada kedua orang tua, yakni **Ayahanda H. A. Manaf Sitanggang** dan **Ibunda Hj. Halimah Hasibuan** yang telah membimbing dan mengasuh sejak dari kecil sampai saat sekarang serta turut mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Istri tercinta, yakni **Syafridah Harahap** yang tetap setia mendampingi penulis dalam segala suka maupun duka, baik dalam mengharungi kehidupan keluarga, maupun di sela-sela kesibukan menyelesaikan pendidikan dan penulisan Tesis pada program studi Pemikiran Islam Program Pascasarjana IAIN SU Medan.

Kemudian, ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada ananda tersayang, yakni **A. Wahyudi Pratama Sitanggang** yang tetap mendoakan penulis selaku orangtuanya agar tegar dan tabah dalam menyelesaikan Tesis ini maupun menyelesaikan pendidikan pada program studi Pemikiran Islam Program Pascasarjana IAIN SU Medan.

Selanjutnya, kepada Dosen Pembimbing I dan II, yakni Bapak **Prof.Dr.H.Hasan Bhakti Nasution, MA** dan Bapak **Prof.Dr.Katimin, MA** yang

memberikan bimbingan, saran dan pengarahan guna kesempurnaan penulisan Tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus Dewan Pimpinan Cabang maupun anggota PPP Kota Medan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kemudian masyarakat Kota Medan, serta pihak-pihak yang membantu penulis memberikan data dan keterangan berkaitan dengan penulisan Tesis ini.

Kepada Bapak **Prof.Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA** selaku Rektor IAIN SU Medan beserta seluruh civitas akademika IAIN SU Medan, penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan dukungan serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengecap pendidikan pada Program Pascasarjana IAIN SU Medan.

Kepada Bapak **Prof.Dr. Nawir Yuslem, MA** selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN SU Medan dan para Asisten Direktur, staf akademis serta seluruh civitas akademika Program Pascasarjana IAIN SU Medan, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah banyak membantu di bidang administrasi yang berkaitan dengan penyelesaian pendidikan dan penulisan Tesis pada Program Pascasarjana IAIN SU Medan tercinta ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih ditujukan kepada Ketua Program Studi Pemikiran Islam, yakni Bapak **Prof.Dr.H. Hasan Bhakti Nasution, MA** yang telah memberikan bimbingan dan arahan, baik selama penulis mengikuti pendidikan maupun ketika menyelesaikan penulisan Tesis di Program Pascasarjana IAIN SU Medan.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil ketika penulis masih dalam masa pendidikan maupun ketika menyelesaikan penulisan Tesis ini. Semoga kiranya bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT., serta menjadi amal jariyah untuk menempati surga yang dijanjikan Allah SWT di akhirat kelak. Amiin.

Sebagai ucapan terakhir dalam kata pengantar ini penulis berharap kepada segenap pembaca agar dapat menyempurnakan kejanggalan dan kekurangan

dalam penulisan Tesis ini demi tercapainya tujuan yang diinginkan dari pembahasan dan penelitian Tesis ini. Amiin.

Medan .....2012

W a s s a l a m

Penulis

**ZULKARNAEN SITANGGANG**  
**NIM: 09 PEMI 1409**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>i</b>
<b>KATAPENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Batasan Istilah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Kajian Terdahulu .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Subyek Penelitian .....	13
4. Tempat dan Waktu Penelitian .....	14
5. Metode Pengumpulan Data .....	16
6. Teknik Analisa Data .....	16
7. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II : EKSISTENSI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM SISTEM</b>	
<b>DEMOKRASI INDONESIA .....</b>	<b>20</b>
A. Pemikiran Politik Dalam Islam .....	20
B. Perkembangan Politik Islam di Indonesia Sebelum Abad 20.....	31
C. Perkembangan Politik Islam Indonesia Abad ke 20 .....	48
1. Tahun 1900 sampai 1945 .....	48
2. Pasca Kemerdekaan RI (1945) Hingga Sekarang .....	56
D. Partisipasi Partai Politik Islam Dalam Pemilu di Indonesia .....	71
1. Eksistensi Partai Islam (Cikal Bakal PPP) Pada Pemilu di	

Masa Orde Lama (1945-1965) .....	71
	Halaman
2. Eksistensi Partai Islam (PPP) Pada Pemilu di Masa Orde Baru (1966-1998) .....	81
3. Eksistensi PPP Pada Pemilu di Masa Orde Reformasi (1998 Sampai Sekarang) .....	86
<b>BAB III : PERKEMBANGAN PPP DALAM SKALA NASIONAL ...</b>	<b>91</b>
<b>A. Sejarah Awal Pembentukan PPP .....</b>	<b>91</b>
<b>B. Sepak Terjang PPP Sejak Pembentukan Sampai Menjelang Reformasi 1999 .....</b>	<b>94</b>
<b>C. Kondisi Internal PPP di Era Reformasi (1999-Sekarang) .....</b>	<b>106</b>
<b>BAB IV : PPP DAN DINAMIKA POLITIKNYA DI KOTA MEDAN</b>	
<b>TAHUN 2004-2009 .....</b>	<b>111</b>
A. Perkembangan PPP Di Kota Medan Tahun 2004-2009 .....	111
B. Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Perolehan Suara dan Kursi PPP Di DPRD Kota Medan .....	117
C. Respon Umat Islam Terhadap Keberadaan PPP Dalam Meng – akomodir Kepentingan Umat Islam .....	131
D. Problematika yang Dihadapi dan Upaya Penanggulangannya.	136
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>142</b>
A. Kesimpulan .....	142
B. Saran-Saran .....	143
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>145</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RALAT</b>	

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DAFTAR TABEL

NOMOR	JUDUL TABEL	HLM
I	JADWAL PENELITIAN .....	15
II	HASIL PEMILU 1955 .....	76
III	PEROLEHAN KURSI TIGA KELOMPOK IDEOLOGI DI KONSTITUANTE .....	77
IV	HASIL PEMILU-PEMILU ORDE BARU .....	84
V	NAMA-NAMA WAKIL RAKYAT ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN HASIL PEMILU 1999 .....	114
VI	NAMA-NAMA WAKIL RAKYAT ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN HASIL PEMILU 2004 .....	115
VII	NAMA-NAMA WAKIL RAKYAT ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN HASIL PEMILU 2009 .....	116

## DAFTAR PERBAIKAN

NOMOR	YANG DIPERBAIKI	HLM
1	TAMBAHAN KATA PENGANTAR UNTUK : - REKTOR - KETUA PROGRAM PASCASARJANA	iv
2	DAFTAR ISI	v

3	<b>BAB I :</b> 1. TAMBAHAN BATASAN ISTILAH : PENGERTIAN DINAMIKA 2. HAL. 5 INSTRUMEN GANTI JADI METODE : OBSERVASI DIBUANG	6-19
4	<b>BAB II DAN III : KATA-KATA PERTAMA DAN SETERUSNYA DICETAK MIRING, PENULISAN HARUS KONSISTEN</b>	22, 38, 61, 62, 63, 66, 80, 81, 94.
5	<b>BAB IV : TAMBAHAN WAWANCARA DENGAN HM. YUNUS RASYID, SH, M.HUM DAN ZAINUDDIN, SH PADA PASAL A.</b>	117

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Studi tentang partai politik merupakan suatu materi yang aktual untuk diperbincangkan, sebab partai politik merupakan salah satu bagian dari pilar bangsa yang memegang kendali keberhasilan bangsa untuk mencapai kemajuan di era globalisasi ini. Sebuah bangsa atau negara modern yang menjalankan nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemerintahannya harus memenuhi tiga unsur kekuatan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Teori ini disebut dengan *Trias Politica*, yang dikemukakan gagasannya oleh Montesquieu, seorang filosof berkebangsaan Perancis (1689-1744).<sup>1</sup>

Gagasan *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu ini mencita-citakan untuk mewujudkan keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Di samping adanya pembagian tugas yang sama di antara lembaga-lembaga negara. Sehingga dalam sistem pemerintahan tidak ada absolutisme kekuasaan yang dipegang oleh satu pihak. Kemudian, ada kontrol atau pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya roda pemerintahan, yang mengharuskan pemegang kekuasaan (pemerintah) harus berjalan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing pemerintahan.

Legislatif merupakan lembaga pembuat undang-undang bersama-sama Eksekutif memiliki peran untuk melahirkan produk perundang-undangan yang memenuhi aspirasi atau kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, mengawal proses pelaksanaan undang-undang yang dibuat dan dijalankan oleh eksekutif sebagai bagian dari fungsi pengawasan, agar terarah sesuai dengan yang telah ditetapkan, tidak menyimpang dari dasar negara, yakni Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, mampu terapkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

Kemudian, Eksekutif merupakan lembaga yang memiliki peran untuk menjalankan produk undang-undang yang dibuat bersama dengan legislatif dalam

---

<sup>1</sup>Rumidah Rabiah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 8.

rangka menciptakan ketenangan dan kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini eksekutif diwakili oleh pemerintah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan. Dalam sistem presidentil, kepala pemerintahan identik dengan sebutan Presiden. Kemudian, dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan identik dengan sebutan Raja atau Perdana Menteri. Untuk tingkat daerah setingkat propinsi, kepala pemerintahan disebut dengan Gubernur. Kemudian, setingkat Kabupaten/Kota, kepala pemerintahan disebut dengan Bupati atau Walikota.

Presiden atau Perdana Menteri dibantu oleh para menteri yang berada dalam satu naungan, yakni menteri-menteri kabinet pemerintahan. Para menteri yang menaungi satu kementerian atau lembaga menjalankan tugas-tugas pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah/wilayah terkecil dari sistem pemerintahan. Para menteri ini pula yang bertanggung jawab secara penuh kepada kepala pemerintahan. Demikian hirarki yang terbangun dalam sistem pemerintahan sebuah negara.

Selanjutnya, lembaga Yudikatif merupakan lembaga pengawas atau pengontrol dari pelaksanaan undang-undang yang dijalankan oleh Eksekutif, agar berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam konteks ini, lembaga Yudikatif memegang kekuasaan hukum dan mengeksekusi hukum terhadap seseorang atau satu lembaga yang melakukan penyimpangan terhadap hukum yang berlaku.

Peran-peran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini merupakan suatu upaya untuk menciptakan sebuah negara yang *welfare state* (Negara Kesejahteraan). Konsep Negara Kesejahteraan pada intinya adalah sebuah pemerintahan yang memprioritaskan kinerjanya pada peningkatan kesejahteraan warga negara.

Negara Republik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 juga mencita-citakan untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan sesuai dengan keinginan dari *The Founding Father* Bangsa, yakni Sukarno-Hatta. Untuk mewujudkan cita-cita dimaksud, dibentuklah lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, di samping Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin bangsa.

Lembaga perwakilan rakyat di awal proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagai penyalur aspirasi masyarakat, telah ada sebuah lembaga yang disebut dengan BPKNIP (Badan Pelaksana Komite Nasional Indonesia Pusat), semacam MPR saat sekarang. Lembaga inilah yang melakukan sidang-sidang dalam merumuskan rancangan Undang-Undang dan berbagai peraturan lainnya. Salah satu hasil produk lembaga ini adalah lahirnya Pancasila dan UUD 1945. Lembaga ini memiliki peran yang cukup signifikan sampai beberapa tahun lamanya.

Proses demokrasi terus bergulir pada negara yang masih muda usianya, yakni Negara Republik Indonesia. Tepat pada tanggal 29 September 1955 Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum yang pertama untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi parlemen. Pemilihan Umum yang pertama ini diikuti oleh multi Partai yang berbeda-beda ideologinya, diantaranya ideologi Nasionalis, Religius, Sosialis, Komunis, dan Sektarian. Setidaknya ada 55 partai politik yang mengikuti pemilu pertama ini.

Pemilu pertama ini dimenangkan oleh PNI (Partai Nasional Indonesia), dengan perolehan suara mencapai 8.436.653 atau sekitar 22,32 %, dan memperoleh 57 kursi di DPR Pusat. Pemenang kedua adalah Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) dengan perolehan suara mencapai 7.903.886 atau sekitar 20,92 % dan memperoleh 57 kursi DPR Pusat. Sedangkan pemenang ketiga adalah Nahdatul Ulama dengan perolehan suara mencapai 6.935.141 atau sekitar 18,41 % dan memperoleh 45 kursi di DPR Pusat.<sup>2</sup>

Berdasarkan fakta ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak partai yang ikut pemilu pertama, partai yang berazaskan ideologi Religius, dalam hal ini Islam seperti Masyumi dan Nahdathul Ulama telah memainkan peran yang cukup berarti dan mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Akibatnya, pergulatan dan persaingan politik antara partai Masyumi mewakili basis Islam dengan PNI mewakili basis Nasional untuk mengambil peran yang lebih besar lagi dalam tatanan pemerintahan Indonesia menjadi semakin tajam.

---

<sup>2</sup>M. Dawam Raharjo, *Sistem Pemilu : Demokratisasi dan Pembangunan* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996), h. 23.

Ditambahkan lagi pengaruh dari Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap pemerintahan Sukarno semakin memperkeruh suasana kebatinan perpolitikan Nasional Indonesia. Bahkan, sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia, PKI sudah memainkan peran yang signifikan. Tercatat dalam sejarah, pada tahun 1926 terjadi pemberontakan petani di Jawa yang dipelopori oleh PKI. Kemudian, pada tahun 1948, terjadi pemberontakan Madiun yang dilakukan oleh PKI di bawah kepemimpinan Muso terhadap pemerintahan RI, disaat bangsa Indonesia sedang menghadapi Agresi Militer Belanda yang kedua.

Setelah itu, PKI berubah haluan dengan mendekati diri kepada Sukarno, karena merasa ada kesempatan untuk kembali menguasai pemerintahan RI. Ditambahkan lagi dengan kondisi kesehatan Sukarno yang mulai menurun. Kenyataan ini berakibat lahirnya keputusan Presiden Sukarno untuk membubarkan Masyumi. Sedangkan partai NU tidak mengambil jarak dengan partai yang berkuasa maupun penguasa yang menjalankan roda pemerintahan ketika itu, dan malah ikut bekerja sama dalam usaha-usaha melaksanakan tugas pemerintahan.

Pertikaian di bidang politik RI telah dimulai sejak pemilu pertama tahun 1955, dan puncaknya adalah pada tahun 1965 dengan meletusnya peristiwa G/30 S. PKI. Pemberontakan ketiga yang dilakukan oleh PKI menyebabkan rakyat dan bangsa Indonesia marah, kemudian melakukan unjuk rasa besar-besaran menuntut pembubaran PKI dan turunnya Presiden Sukarno dari jabatan sebagai Presiden.

Pada peristiwa ini umat Islam ikut serta memainkan peranannya, melalui ormas-ormas Islam dan Partai Politik, serta organisasi kepemudaan bersama-sama organisasi kepemudaan Nasional bahu membahu melakukan unjuk rasa menuntut agar PKI segera dibubarkan saja. Unjuk rasa ini di dukung pula kekuatan militer atau ABRI, dan mengharuskan berakhirnya kekuasaan Orde Lama dibawah kepemimpinan Ir. Sukarno yang menganut azas Demokrasi Terpimpin.

Tepat pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Sukarno mengeluarkan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang intinya melakukan penyerahan tanggung jawab kepresidenan dari dirinya kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan-tindakan atas nama Pemimpin Besar Revolusi,

menjamin keamanan dan stabilitas negara, menjamin keselamatan pribadi Presiden sebagai Panglima Tertinggi yang dimandatkan oleh MPRS.

Dengan demikian, seluruh kebijakan politik pemerintahan Indonesia beralih dari era pemerintahan Orde Lama kepada era pemerintahan Orde Baru. Dalam kaitan ini, Soeharto ketika memimpin negara Indonesia menerapkan politik pembangunan. Yakni lebih menitik beratkan pada sektor pembangunan ekonomi daripada politik. Maka dilakukanlah pembangunan di berbagai sektor di berbagai wilayah Indonesia.

Kemudian, pemerintahan Orde Baru membentuk mesin politik sendiri yang bernama Golongan Karya, yang awal pembentukannya bernama Sekber Golkar pada tanggal 24 Oktober 1964 oleh ABRI sebagai saingan untuk menghadapi PKI. Melalui Golkar inilah, pemerintahan Orde Baru menggerakkan seluruh kekuatan kekuasaannya untuk mempengaruhi masyarakat dan menunjukkan karya-karyanya agar memperoleh dukungan seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, sejak mulai memimpin, pemerintahan Orde Baru menerapkan pola penyederhanaan partai politik. Hal ini dilakukan dengan alasan, banyaknya partai politik dapat mengganggu proses pembangunan yang berjalan. Mulailah dilakukan difusi atau penggabungan partai politik yang ada di Indonesia. Partai-partai politik yang berbasis religius (Islam) dipaksa melakukan difusi dan menyatukan diri membentuk satu partai politik.

Kemudian, partai-partai berbasiskan nasionalis juga diharuskan bergabung untuk membentuk satu partai politik berbasis nasional. Sementara Golkar berdiri sendiri sebagai partai penguasa tunggal. Ini berlaku pada tahun 1973 dengan bentukan “3 Partai Politik (Partai Persatuan Pembangunan, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia)”<sup>3</sup>.

Dalam kaitan ini, partai-partai politik non pemerintah (Golkar) diawasi secara intens terhadap sepak terjangnya dari mulai pusat sampai ke daerah. Kemudian diberlakukan asas tunggal, yakni hanya menetapkan satu asas, yakni Pancasila. Tidak boleh ada asas lain kecuali Pancasila. Hal ini berlaku terus sampai pada pemilu tahun 1997, sebelum Soeharto sebagai penguasa Orde Baru

---

<sup>3</sup>Rabiah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu*, h. 19.

tumbang akibat desakan reformasi yang dilakukan oleh para mahasiswa pada tanggal 21 Mei 1998.

Setelah itu, Indonesia memasuki era Orde Reformasi dengan angin keterbukaan. Di bawah pemerintahan Presiden BJ. Habibie, masyarakat Indonesia diberi kesempatan dan kebebasan untuk berkumpul dan bersyarikat serta membentuk partai politik. Hal ini sejalan dengan amanat Pancasila sila ke empat, yakni “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kemudian, pasal 28 dari UUD 1945 juga memberikan kesempatan untuk melakukan hal tersebut.

Menyahuti amanat Pancasila dan UUD 1945 tersebut, maka tumbuhlah berbagai partai politik dengan berbagai aliran didalamnya, seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Partai-partai yang mengusung semangat nasionalis dan religius bermunculan ketika itu. Sampai saat ini sudah dua kali dilakukan pemilu legislatif, yakni tahun 2003, dan 2008.

Tercatat sampai saat sekarang, khususnya partai-partai religius (Islam) yang masih eksis antara lain PPP, PKB, PBB. Sementara itu, di awal kelahirannya, PKS mengedepankan isu partai berbasis agama (religius), namun pada akhirnya menyatakan diri sebagai partai tengah atau partai terbuka untuk semua lapisan. PAN, walaupun dimotori oleh orang-orang yang berjiwa religius, tetapi sejak dari awal menyatakan diri sebagai partai terbuka untuk semua golongan masyarakat.

Dari sekian banyak partai politik berbasis religius (Islam), pada penelitian ini penulis mencoba mencermati pergerakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam kancah perpolitikan Indonesia. Fokus perhatian akan dipersempit area pembahasannya, yakni keberadaan PPP di wilayah Propinsi Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Adapun yang dianalisa adalah dinamika PPP pada tahun 2004-2009. Tujuannya adalah untuk mengetahui eksistensi PPP terhadap perkembangan politik di Kota Medan, dan tingkat pengaruhnya terhadap kehidupan politik umat Islam di Kota Medan.

Memang diakui bahwa PPP sejak proses fusi pada tahun 1973, merupakan wadah satu-satunya bagi aspirasi politik umat Islam. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dhurorudin Mashad yang menegaskan bahwa “Secara formal seluruh

kekuatan politik Islam terintegrasi dalam satu wadah partai”.<sup>4</sup> Walaupun tidak dapat dipungkiri terjadi tarik menarik kepentingan di antara partai-partai yang bergabung kedalam PPP. Kemudian terjadi proses pengembosan pada PPP yang pada awalnya berlambang Ka’bah, dan berubah menjadi lambang bintang lima sesuai dengan keinginan penguasa Orde Baru.

Namun seiring dengan perjalanan waktu, peran-peran yang dimotori oleh PPP untuk mengelola seluruh aspirasi umat Islam, secara perlahan namun pasti mengalami distorsi. Hal ini dikarenakan partai-partai lain, terutama partai penguasa (Golkar) ikut serta memainkan peran tersebut dengan memasuki kantong-kantong PPP untuk mengambil simpati pendukung PPP dan mengalihkannya menjadi pendukung Golkar.

Hal ini pun terus berlanjut di era sekarang ini, bahwa upaya mengakomodir kepentingan umat Islam tidak lagi hanya dilakukan oleh partai-partai berbasis religius (Islam), tetapi semua partai yang ada di Indonesia melakukan hal yang sama untuk menarik minat dan simpatik umat Islam memberikan dukungan kepada partainya. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan “Dikotomi antara politik Islam dengan kelompok politik lain”.<sup>5</sup>

Kenyataan ini mengharuskan partai-partai politik Islam, khususnya PPP untuk berjuang keras kembali menarik simpati umat Islam agar memberikan dukungan secara penuh terhadap PPP. Untuk itu PPP harus melakukan evaluasi dan mencari format terbaru sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap eksistensi PPP di masa-masa yang akan datang.

Di Kota Medan, partai-partai politik Islam, khususnya PPP sejak Pemilu Legislatif secara langsung di tahun 2004 dan 2009 mengalami pasang surut dinamika organisasinya. Peluang dan tantangan organisasi partai terjadi, baik bersifat internal maupun eksternal. Tantangan bersifat internal terkait dengan upaya konsolidasi ke berbagai ranting di Kecamatan dengan tujuan agar partai yang ada tetap eksis.

---

<sup>4</sup>Dhurorudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 15.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 16.

Kemudian tantangan bersifat eksternal muncul dari lahirnya berbagai partai dengan berbagai latar belakang pendidikan, organisasi, ekonomi dan budaya maupun agama yang membuat partai politik berbasis Islam, khususnya PPP menjadi berkurang pendukungnya di Kota Medan. Akibatnya terjadi penurunan perolehan suara pada Pemilu Legislatif. Resiko yang timbul adalah hilangnya sejumlah kursi yang diperoleh di DPRD Kota Medan.

Selama ini pendukung PPP dikenal sebagai kelompok tradisional yang masih berpegang pada simbol-simbol keagamaan, ternyata tidak mampu memberikan harapan yang berarti. Karena pada Pemilu Legislatif 2004 hanya memperoleh 4 kursi Legislatif. Apabila dibandingkan dengan PKS yang sebelumnya bernama PK sebagai partai baru bisa memperoleh 9 suara kursi Legislatif. Kemudian pada Pemilihan Legislatif tahun 2009, PPP hanya memperoleh 3 kursi Legislatif, dan PKS sebanyak 7 kursi legislatif di DPRD Kota Medan. Terjadinya penurunan perolehan suara dan kursi PPP di DPRD Kota Medan sejak tahun 2004 sampai 2009 memunculkan pertanyaan mendasar, mengapa hal itu bisa terjadi ?.

Mengapa dukungan dari masyarakat semakin menurun, padahal partai ini sudah eksis cukup lama dibandingkan dengan partai Islam lainnya. Kemudian partai ini kembali kepada asasnya, yakni Islam. Ka'bah dikembalikan sebagai simbol partai yang sebelumnya berlambangkan bintang lima. Ka'bah merupakan arah tujuan umat Islam ketika beribadah kepada Allah dalam shalat lima waktu, dan diakui sebagai alat pemersatu umat, ternyata tidak menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Islam di Kota Medan untuk memilih PPP.

Mencermati fenomena-fenomena ini, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam dengan melakukan penelitian dan mengemukakannya dalam bentuk laporan penelitian berupa Tesis yang diberi tema **“Dinamika Partai Politik Islam Kota Medan Tahun 2004-2009 (Studi Kasus: Partai Persatuan Pembangunan (PPP))”**.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka beberapa rumusan masalah penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika perkembangan partai politik Islam di Kota Medan tahun 2004-2009, khususnya PPP ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penurunan perolehan suara dan kursi PPP di DPRD Kota Medan ?
3. Bagaimana respon umat Islam terhadap keberadaan partai politik Islam, khususnya PPP dalam mengakomodir kepentingan umat ?
4. Apa problematika yang dihadapi oleh partai politik Islam khususnya PPP dalam mengapresiasi kepentingan dan dukungan umat Islam dan bagaimana upaya mengatasinya ?

## C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan salah penafsiran terhadap tema atau judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan terhadap beberapa istilah yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Dinamika, akar katanya adalah dinamik yang berarti “Sifat/tabiat yang bertenaga dan berkekuatan sehingga selalu bergerak, selalu sanggup menyesuaikan diri dengan keadaan dsb”.<sup>6</sup> Dinamika diartikan sebagai dinamis yang berarti “Memiliki sifat (tabiat) yang bertenaga dan berkekuatan sehingga selalu bergerak, selalu sanggup menyesuaikan diri dengan keadaan dsb”.<sup>7</sup> Arti lain bermakna “Penuh tenaga dan semangat untuk bergerak & punya kemampuan untuk menyesuaikan diri, penuh semangat”.<sup>8</sup> Adapun yang penulis maksud dengan dinamika dalam penelitian ini adalah perkembangan atau sesuatu keadaan yang terjadi

---

<sup>6</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 251.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>J.S. Badudu, *Kamus Ilmiah Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003), h. 63.

selama beberapa kurun waktu pada salah satu partai politik Islam, dalam hal ini adalah PPP yang ada di Kota Medan Tahun 2004-2009.

2. Partai Politik Islam merupakan partai politik yang berasaskan Islam sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik itu sendiri. Dalam kaitan ini beberapa partai politik Islam yang ada di Kota Medan antara lain; PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PBB (Partai Bulan Bintang), PBR (Partai Bintang Reformasi). Dalam kajian tesis ini hanya satu yang menjadi sorotan, yakni PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

Berdasarkan beberapa batasan istilah yang dikemukakan, maka yang dimaksud dengan dinamika partai politik Islam di Kota Medan tahun 2004-2009 merupakan pergerakan, perkembangan dan keadaan partai politik Islam ketika masa pemilihan Legislatif dalam perolehan suara untuk mendapatkan kursi legislatif pada Pemilu Legislatif pada tahun 2004-2009.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai dinamika partai politik Islam di Kota Medan pada tahun 2004-2009. Secara khusus tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dinamika perkembangan partai politik Islam di Kota Medan pada tahun 2004-2009, khususnya PPP.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan perolehan suara dan kursi PPP di DPRD Kota Medan.
3. Untuk mengetahui respon umat Islam terhadap keberadaan partai politik Islam, khususnya PPP dalam mengakomodir kepentingan umat.
4. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi oleh partai politik Islam khususnya PPP dalam mengapresiasi kepentingan dan dukungan umat Islam dan upaya mengatasinya.

Sementara itu, penelitian ini secara teoritik maupun secara praktis diharapkan bermanfaat atau berguna, antara lain:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai sepak terjang partai politik Islam, baik di awal menjelang kemerdekaan negara Indonesia, setelah merdeka sampai Orde Lama, di masa Orde Baru, sampai pada masa Orde Reformasi, khususnya terhadap kelahiran PPP.
2. Secara praktis penelitian ini dapat membantu untuk memperluas cakrawala pengetahuan tentang dinamika dan keadaan yang terjadi pada partai politik Islam di Kota Medan maupun hasil pemilihan legislatif pada tahun 2004-2009, khususnya PPP.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan kajian berkaitan dengan partai politik Islam diantaranya:

1. Penelitian H. Ali Murtadha tahun 2004, judul “Perundang-Undangan Tentang Partai Politik Islam: Pemetaan dan Harapan di Era Reformasi”. Penelitian ini menjelaskan mengenai Undang-Undang pendirian partai politik di era reformasi, sehingga banyak muncul partai-partai berasaskan Islam. Undang-Undang dimaksud adalah UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik. UU No. 3 Tahun 1999 dan UU No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Kesimpulan dari penelitian ini adalah UU No. 2 Tahun 1999 memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik, disebabkan UU No. 3 Tahun 1975 tidak responsif terhadap aspirasi yang berkembang, sehingga kehidupan demokrasi tidak berjalan dengan baik. Kemudian, disoroti pula pada era reformasi ternyata partai-partai yang berasaskan Islam tidak dapat bersaing dengan partai-partai berasaskan nasionalis, terutama di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan.
2. Penelitian Rafdinal tahun 2000, judul “Pengaruh Kepemimpinan Politik Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Keadilan Rakyat pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sumatera Utara”. Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh antara

penerapan kepemimpinan politik Islam terhadap peningkatan kesejahteraan dan keadilan rakyat, di bawah kepemimpinan DPW PPP Sumatera Utara. Dalam kaitan ini masih terlalu rendahnya penerapan kepemimpinan politik Islam dijalankan oleh DPW PPP Sumatera Utara, sehingga kesejahteraan dan keadilan rakyat belum terpenuhi. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukannya dengan penegasan bahwa kepemimpinan pada Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara, belum sepenuhnya didasarkan kepada ciri-ciri kepemimpinan politik Islam, terutama yang berhubungan dengan sikap dan perilaku elit pimpinan dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Kemudian, pelaksanaan program yang dijalankan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara selama ini belum berhasil meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, karena berbagai hambatan yang ditemui, baik bersifat internal maupun eksternal. Terutama di bidang penegakan hukum, keadilan ekonomi, kebutuhan pendidikan, dan pembinaan suasana keagamaan di masyarakat.

3. Penelitian Muniruddin tahun 2005, judul “Dinamika Politik Umat Islam (Studi Kasus Perolehan Suara Partai Politik Islam pada Pemilu Tahun 1999 dan 2004 di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman). Kesimpulan penelitian ini adalah ada beberapa faktor penyebab partai politik Islam mengalami kekalahan dalam Pemilu tahun 1999 dan 2004 di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, antara lain disebabkan faktor memudarnya fanatisme terhadap simbol Islam, faktor program partai yang ditawarkan kurang menarik bagi rakyat, dan faktor kepemimpinan lokal partai yang kurang simpati bagi rakyat. Kemudian terjadi perubahan perilaku pemilih dari kalangan umat Islam pada pemilu tahun 1999 dan tahun 2004 di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, antara lain; faktor alternatif partai politik, faktor alternatif calon legislatif, faktor program yang ditawarkan, faktor perubahan persepsi masyarakat terhadap partai politik Islam, dan faktor kepemimpinan lokal dari partai politik yang dipilih.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah berbentuk penelitian kualitatif, yakni “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”<sup>9</sup> Maka untuk mengolah dan menganalisa data dalam penelitian ini digunakan prosedur penelitian kualitatif, yakni dengan menjelaskan atau memaparkan penelitian ini apa adanya serta menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian lapangan (*Field Research*), yakni melakukan pendekatan terhadap obyek-obyek yang menjadi kajian penelitian di lapangan. Dalam kaitan ini adalah terhadap partai politik Islam, yakni PPP dan masyarakat (umat Islam) di Kota Medan. Untuk mengumpulkan data di lapangan dilakukan dengan cara melakukan observasi atau pengamatan terhadap perkembangan partai politik Islam, khususnya PPP, dan dinamikanya di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Kemudian melakukan interview atau wawancara dengan tokoh-tokoh yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya melakukan studi dokumentasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPP Kota Medan di masyarakat, khususnya umat Islam Kota Medan. Dan tidak menutup kemungkinan mengambil literatur perpustakaan sebagai landasan teori-teori yang digunakan bagi penulisan penelitian ini.

### **3. Subyek Penelitian**

Sebuah penelitian perlu ditentukan subyek penelitiannya yang menjadi bagian penting dan tak dapat dipisahkan dari berbagai rangkaian kegiatan penelitian. Adapun yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah “Benda, hal

---

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan”.<sup>10</sup> Berdasarkan pengertian ini maka subyek penelitian merupakan sesuatu berupa benda, hal atau orang yang dijadikan tempat atau sumber data atau informasi yang dipermasalahkan.

Pengertian lain tentang subyek penelitian adalah “Sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti”.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian ini maka subyek penelitian merupakan titik sumber informasi untuk dilakukannya sebuah penelitian. Pada subyek penelitian ini data terkumpul, tempat bersemayamnya variabel penelitian, populasi maupun sampel.

Berdasarkan sumber informasi data yang diperoleh, maka data yang dihimpun dalam penelitian ini subyek penelitiannya difokuskan kepada dua bagian, yaitu:

- a. Subyek data primer, yaitu data utama yang diperoleh dari pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Medan Masa Bakti 2010-2015.
- b. Subyek data sekunder, yaitu data pelengkap sebagai pendukung dalam penelitian ini yang diperoleh dari:
  - 1) Anggota DPRD Kota Medan yang berasal dari PPP Kota Medan.
  - 2) Tokoh Agama.
  - 3) Tokoh Masyarakat
  - 4) Akademisi
  - 5) Pengamat Politik
  - 6) Masyarakat mewakili daerah pemilihan PPP Kota Medan.

#### **4. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu partai politik yang berkembang di Kota Medan, yakni Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Medan, yang beralamat di jalan Sekip Baru No. 44 Medan. Secara struktural, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Medan berada di bawah naungan Dewan Pimpinan

---

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 116.

<sup>11</sup>Saiful Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 34.

Wilyah (DPW) PPP Sumatera Utara, yang diketuai oleh H. Fadly Nurzal, S.Ag dan sekretarisnya adalah H. Ali Jabbar Napitupulu.

Sementara itu untuk DPC PPP Kota Medan, kepengurusan masa bakti 2010-2015 ketuanya dijabat oleh Aja Syahri, S.Ag dan sekretarisnya adalah H. Irsal Fikri, S.Sos. dibantu oleh beberapa personalia. Untuk mengetahui susunan pengurus DPC PPP Kota Medan, baik pengurus harian, pimpinan Majelis Pertimbangan, dan pimpinan Majelis Pakar masa Bakti 2010-2015 dapat dilihat pada lampiran yang ada.

Untuk mendapatkan data akurat dalam penelitian ini, peneliti langsung hadir ke lokasi penelitian, yakni ke kantor DPC PPP Kota Medan, dengan melakukan berbagai pendekatan ke berbagai pihak, sekaligus mencari informasi tentang hal-hal yang menjadi pokok bahasan penelitian melalui dialog atau wawancara yang dilakukan. Di samping ikut serta membantu tugas-tugas yang diemban serta ikut mencarikan solusi bagi penyelesaian masalah yang dihadapi. Adapun waktu yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sekitar 5 bulan, dimulai dari bulan Oktober 2011 sampai bulan Februari 2012. Adapun langkah-langkah penelitian serta waktu yang dipergunakan dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL I**  
**JADWAL PENELITIAN**

NO	KEGIATAN YANG DILAKUKAN	BULAN																			
		Oktober				Nopember				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian awal, pengumpulan informasi, pengajuan judul penelitian, pengesahan judul penelitian	x																			
2	Penyusunan Proposal, pengajuan ke Pembimbing, perbaikan, pengesahan proposal, pengurusan izin riset/penelitian, izin melakukan penelitian di lapangan					x					x					x					



ilmuan yang dikemukakan dalam bentuk tulisan. Sehingga dapat dijadikan rujukan dan menambah sumber data yang diinginkan dalam penelitian ini.

## **6. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik untuk melakukan analisa data penelitian dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan. Proses analisa ini berlangsung secara sirkuler selama penelitian ini berlangsung. Adapun penjelasan ketiga tahapan ini sebagai berikut:

### **a. Mereduksi Data**

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, menfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah/kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menonjolkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

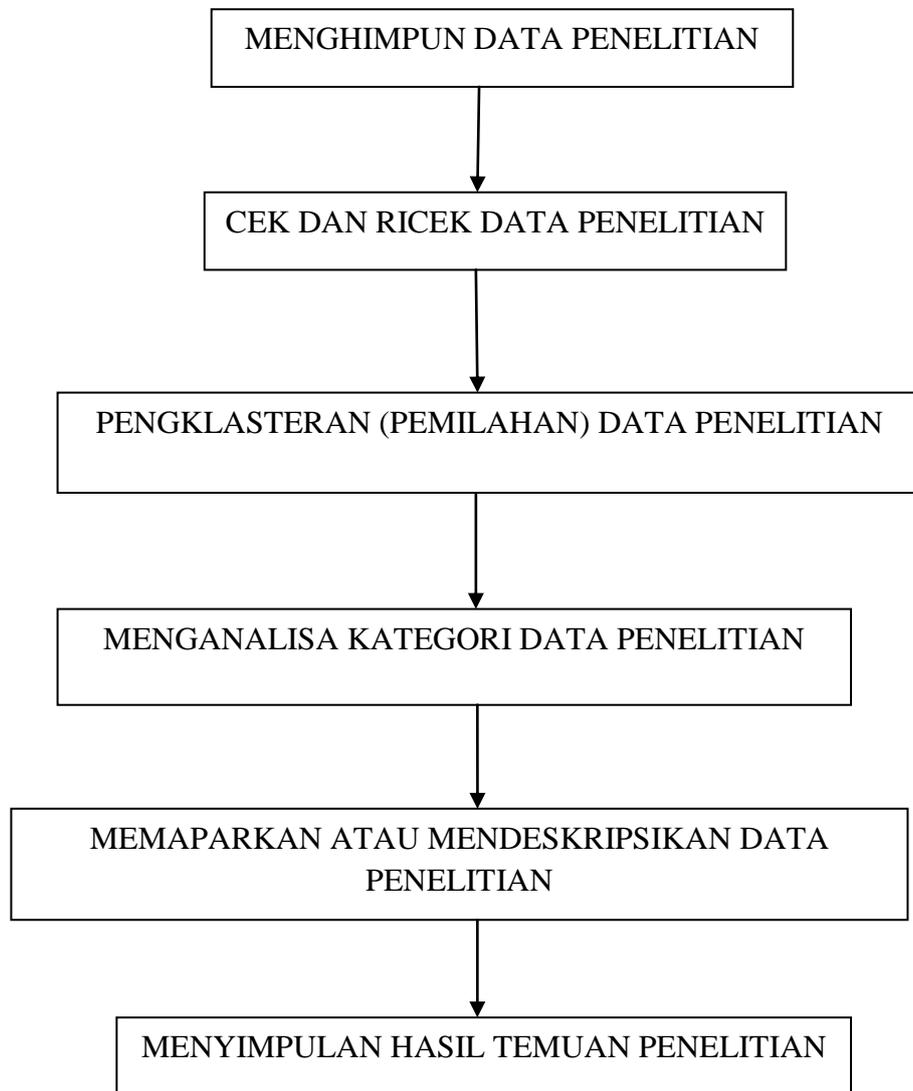
### **b. Menyajikan Data**

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang disusun dan memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Jadi penyajian data ini merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh.

### **c. Membuat Kesimpulan**

Data awal yang berwujud kata-kata, tulisan dan tingkah laku perbuatan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, interview atau wawancara dan studi dokumentasi sebenarnya sudah dapat memberikan kesimpulan, tetapi sifatnya masih longgar. Dengan bertambahnya data yang dikumpulkan secara sirkuler bersama reduksi dan penyajian, maka kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh.

Secara spesifik alur kerja dari penelitian ini dapat dijelaskan melalui skema berikut:



## 7. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dari lapangan, data yang ada akan dianalisa dan diperiksa dengan menggunakan beberapa indikator pertimbangan, antara lain:

- a. Memeriksa kualitas data yang bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran terjadinya data yang subyektif.
- b. Memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang ada.

- c. Berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat tentang hasil sementara atau hasil akhir penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini dapat dikemukakan antara lain:

Bab I: Pendahuluan, berisikan: latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Eksistensi partai politik Islam dalam sistem demokrasi Indonesia, berisikan; pemikiran politik dalam Islam, perkembangan politik Islam di Indonesia sebelum abad 20, perkembangan politik Islam Indonesia abad ke 20, partisipasi partai politik Islam dalam Pemilu di Indonesia.

Bab III: Perkembangan PPP dalam skala Nasional, berisikan; sejarah awal pembentukan PPP, sepaik terjang PPP sejak pembentukan sampai menjelang Reformasi tahun 1999, dan kondisi internal PPP di Era Reformasi (1999 – sekarang).

Bab IV: PPP dan Dinamika Politiknya di Kota Medan Tahun 2004-2009, berisikan; perkembangan PPP di Kota Medan tahun 2004-2009, faktor-faktor penyebab penurunan perolehan suara dan kursi PPP di DPRD Kota Medan, respon umat Islam terhadap keberadaan PPP dalam mengakomodir kepentingan umat Islam, problematika yang dihadapi oleh PPP dalam mengapresiasi kepentingan dan dukungan umat Islam Kota Medan dan upaya mengatasinya.

Bab V: Penutup, berisikan; kesimpulan dan saran, dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar lampiran, daftar ralat, dan daftar riwayat hidup.

## **Lampiran 1**

Proposal Tesis berjudul : **“Dinamika Partai Politik Islam Kota Medan Tahun 2004-2009 (Studi Kasus : Partai Persatuan Pembangunan (PPP)”**, oleh Sdr. Zulkarnaen Sitanggang, NIM. 09 PEMI 1409 telah diseminarkan pada tanggal, ....., dan dapat dipertimbangkan sebagai judul Tesis untuk ditetapkan dalam rapat pimpinan PPS IAIN SU Medan.

Medan,

**Prof.Dr.H.Hasan Bhakti Nst, MA**

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah .....
- B. Perumusan Masalah .....
- C. Batasan Istilah .....
- D. Tujuan Penelitian .....
- E. Kegunaan Penelitian .....
- F. Kajian Terdahulu .....
- G. Landasan Teoritis .....
- H. Metodologi Penelitian .....
- 1. Pendekatan Penelitian .....
- a. Penelitian Lapangan (Field Research) .....
- b. Sumber Data .....
- c. Instrumen Pengumpulan Data .....
- d. Karakteristik Responden .....
- e. Analisis Data .....

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....

- A. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Medan .....
- B. Kondisi Sosio Kultural Masyarakat Kota Medan .....
- C. Kehidupan Politik dan Religius (Agama) Masyarakat Kota Medan .....

BAB III : EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA .....

- A. Gagasan Awal Pembentukan Partai Politik .....

B. Sejarah Pemilu Di Indonesia .....	
C. Kehadiran Partai Politik Islam di Indonesia .....	
D. Partai Politik Islam dan Sistem Demokrasi Indonesia .....	

Halaman

#### BAB IV : DINAMIKA PARTAI POLITIK ISLAM (PPP) DI KOTA

##### MEDAN TAHUN 2004-2009 .....

A. PPP dan Dinamika Partai .....	
1. Sejarah Awal Pembentukan PPP .....	
2. Pola Kepemimpinan PPP .....	
3. Peluang dan Tantangan PPP Dari Masa Ke Masa .....	
B. Pergerakan PPP di Kota Medan Tahun 2004-2009 .....	
1. Faktor-Faktor Penyebab Penurunan perolehan Suara dan Kursi PPP di DPRD Kota Medan .....	
2. Respon PPP Mengakomodir Kepentingan Umat Islam ...	
3. Respon Masyarakat Terhadap Eksistensi PPP di Kota Medan .....	
4. Problematika yang Dihadapi PPP Mengapresiasi Kepentingan dan Dukungan umat Islam Serta Upaya Mengatasinya .....	

#### BAB V : PENUTUP .....

A. Kesimpulan .....	
B. Saran-Saran .....	

#### DAFTAR PUSTAKA .....

#### DAFTAR LAMPIRAN .....

#### DAFTAR RALAT .....

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### H. Latar Belakang Masalah

Studi tentang partai politik merupakan suatu materi yang aktual untuk diperbincangkan, sebab partai politik merupakan salah satu bagian dari pilar bangsa yang memegang kendali keberhasilan bangsa untuk mencapai kemajuan di era globalisasi ini. Sebuah bangsa atau negara modern yang menjalankan nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemerintahannya harus memenuhi tiga unsur kekuatan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Teori ini disebut dengan *Trias Politica*, yang dikemukakan gagasannya oleh Montesquieu, seorang filosof berkebangsaan Perancis (1689-1744).<sup>12</sup>

Gagasan *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu ini mencita-citakan untuk mewujudkan keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Di samping adanya pembagian tugas yang sama di antara lembaga-lembaga negara. Sehingga dalam sistem pemerintahan tidak ada absolutisme kekuasaan yang dipegang oleh satu pihak. Kemudian, ada kontrol atau pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya roda pemerintahan, yang mengharuskan pemegang kekuasaan (pemerintah) harus berjalan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing pemerintahan.

Legislatif merupakan lembaga pembuat undang-undang bersama-sama Eksekutif memiliki peran untuk melahirkan produk perundang-undangan yang memenuhi aspirasi atau kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, mengawal proses pelaksanaan undang-undang yang dibuat dan dijalankan oleh eksekutif sebagai bagian dari fungsi pengawasan, agar terarah sesuai dengan yang telah ditetapkan, tidak menyimpang dari dasar negara, yakni Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, mampu terapkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

Kemudian, Eksekutif merupakan lembaga yang memiliki peran untuk menjalankan produk undang-undang yang dibuat bersama dengan legislatif dalam

---

<sup>12</sup>Rumidah Rabiah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 8.

rangka menciptakan ketenangan dan kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini eksekutif diwakili oleh pemerintah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan. Dalam sistem presidentil, kepala pemerintahan identik dengan sebutan Presiden. Kemudian, dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan identik dengan sebutan Raja atau Perdana Menteri. Untuk tingkat daerah setingkat propinsi, kepala pemerintahan disebut dengan Gubernur. Kemudian, setingkat Kabupaten/Kota, kepala pemerintahan disebut dengan Bupati atau Walikota.

Presiden atau Perdana Menteri dibantu oleh para menteri yang berada dalam satu naungan, yakni menteri-menteri kabinet pemerintahan. Para menteri yang menaungi satu kementerian atau lembaga menjalankan tugas-tugas pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah/wilayah terkecil dari sistem pemerintahan. Para menteri ini pula yang bertanggung jawab secara penuh kepada kepala pemerintahan. Demikian hirarki yang terbangun dalam sistem pemerintahan sebuah negara.

Selanjutnya, lembaga Yudikatif merupakan lembaga pengawas atau pengontrol dari pelaksanaan undang-undang yang dijalankan oleh Eksekutif, agar berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam konteks ini, lembaga Yudikatif memegang kekuasaan hukum dan mengeksekusi hukum terhadap seseorang atau satu lembaga yang melakukan penyimpangan terhadap hukum yang berlaku.

Peran-peran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini merupakan suatu upaya untuk menciptakan sebuah negara yang *welfare state* (Negara Kesejahteraan). Konsep Negara Kesejahteraan pada intinya adalah sebuah pemerintahan yang memprioritaskan kinerjanya pada peningkatan kesejahteraan warga negara.

Negara Republik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 juga mencita-citakan untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan sesuai dengan keinginan dari *The Founding Father* Bangsa, yakni Sukarno-Hatta. Untuk mewujudkan cita-cita dimaksud, dibentuklah lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, di samping Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin bangsa.

Lembaga perwakilan rakyat di awal proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagai penyalur aspirasi masyarakat, telah ada sebuah lembaga yang disebut dengan BPKNIP (Badan Pelaksana Komite Nasional Indonesia Pusat), semacam MPR saat sekarang. Lembaga inilah yang melakukan sidang-sidang dalam merumuskan rancangan Undang-Undang dan berbagai peraturan lainnya. Salah satu hasil produk lembaga ini adalah lahirnya Pancasila dan UUD 1945. Lembaga ini memiliki peran yang cukup signifikan sampai beberapa tahun lamanya.

Proses demokrasi terus bergulir pada negara yang masih muda usianya, yakni Negara Republik Indonesia. Tepat pada tanggal 29 September 1955 Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum yang pertama untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi parlemen. Pemilihan Umum yang pertama ini diikuti oleh multi Partai yang berbeda-beda ideologinya, diantaranya ideologi Nasionalis, Religius, Sosialis, Komunis, dan Sektarian. Setidaknya ada 55 partai politik yang mengikuti pemilu pertama ini.

Pemilu pertama ini dimenangkan oleh PNI (Partai Nasional Indonesia), dengan perolehan suara mencapai 8.436.653 atau sekitar 22,32 %, dan memperoleh 57 kursi di DPR Pusat. Pemenang kedua adalah Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) dengan perolehan suara mencapai 7.903.886 atau sekitar 20,92 % dan memperoleh 57 kursi DPR Pusat. Sedangkan pemenang ketiga adalah Nahdatul Ulama dengan perolehan suara mencapai 6.935.141 atau sekitar 18,41 % dan memperoleh 45 kursi di DPR Pusat.<sup>13</sup>

Berdasarkan fakta ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak partai yang ikut pemilu pertama, partai yang berazaskan ideologi Religius, dalam hal ini Islam seperti Masyumi dan Nahdathul Ulama telah memainkan peran yang cukup berarti dan mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Akibatnya, pergulatan dan persaingan politik antara partai Masyumi mewakili basis Islam dengan PNI mewakili basis Nasional untuk mengambil peran yang lebih besar lagi dalam tatanan pemerintahan Indonesia menjadi semakin tajam.

---

<sup>13</sup>M. Dawam Raharjo, *Sistem Pemilu : Demokratisasi dan Pembangunan* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996), h. 23.

Ditambahkan lagi pengaruh dari Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap pemerintahan Sukarno semakin memperkeruh suasana kebatinan perpolitikan Nasional Indonesia. Bahkan, sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia, PKI sudah memainkan peran yang signifikan. Tercatat dalam sejarah, pada tahun 1926 terjadi pemberontakan petani di Jawa yang dipelopori oleh PKI. Kemudian, pada tahun 1948, terjadi pemberontakan Madiun yang dilakukan oleh PKI di bawah kepemimpinan Muso terhadap pemerintahan RI, disaat bangsa Indonesia sedang menghadapi Agresi Militer Belanda yang kedua.

Setelah itu, PKI berubah haluan dengan mendekati diri kepada Sukarno, karena merasa ada kesempatan untuk kembali menguasai pemerintahan RI. Ditambahkan lagi dengan kondisi kesehatan Sukarno yang mulai menurun. Kenyataan ini berakibat lahirnya keputusan Presiden Sukarno untuk membubarkan Masyumi. Sedangkan partai NU tidak mengambil jarak dengan partai yang berkuasa maupun penguasa yang menjalankan roda pemerintahan ketika itu, dan malah ikut bekerja sama dalam usaha-usaha melaksanakan tugas pemerintahan.

Pertikaian di bidang politik RI telah dimulai sejak pemilu pertama tahun 1955, dan puncaknya adalah pada tahun 1965 dengan meletusnya peristiwa G/30 S. PKI. Pemberontakan ketiga yang dilakukan oleh PKI menyebabkan rakyat dan bangsa Indonesia marah, kemudian melakukan unjuk rasa besar-besaran menuntut pembubaran PKI dan turunnya Presiden Sukarno dari jabatan sebagai Presiden.

Pada peristiwa ini umat Islam ikut serta memainkan peranannya, melalui ormas-ormas Islam dan Partai Politik, serta organisasi kepemudaan bersama-sama organisasi kepemudaan Nasional bahu membahu melakukan unjuk rasa menuntut agar PKI segera dibubarkan saja. Unjuk rasa ini di dukung pula kekuatan militer atau ABRI, dan mengharuskan berakhirnya kekuasaan Orde Lama dibawah kepemimpinan Ir. Sukarno yang menganut azas Demokrasi Terpimpin.

Tepat pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Sukarno mengeluarkan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang intinya melakukan penyerahan tanggung jawab kepresidenan dari dirinya kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan-tindakan atas nama Pemimpin Besar Revolusi,

menjamin keamanan dan stabilitas negara, menjamin keselamatan pribadi Presiden sebagai Panglima Tertinggi yang dimandatkan oleh MPRS.

Dengan demikian, seluruh kebijakan politik pemerintahan Indonesia beralih dari era pemerintahan Orde Lama kepada era pemerintahan Orde Baru. Dalam kaitan ini, Soeharto ketika memimpin negara Indonesia menerapkan politik pembangunan. Yakni lebih menitik beratkan pada sektor pembangunan ekonomi daripada politik. Maka dilakukanlah pembangunan di berbagai sektor di berbagai wilayah Indonesia.

Kemudian, pemerintahan Orde Baru membentuk mesin politik sendiri yang bernama Golongan Karya, yang awal pembentukannya bernama Sekber Golkar pada tanggal 24 Oktober 1964 oleh ABRI sebagai saingan untuk menghadapi PKI. Melalui Golkar inilah, pemerintahan Orde Baru menggerakkan seluruh kekuatan kekuasaannya untuk mempengaruhi masyarakat dan menunjukkan karya-karyanya agar memperoleh dukungan seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, sejak mulai memimpin, pemerintahan Orde Baru menerapkan pola penyederhanaan partai politik. Hal ini dilakukan dengan alasan, banyaknya partai politik dapat mengganggu proses pembangunan yang berjalan. Mulailah dilakukan difusi atau penggabungan partai politik yang ada di Indonesia. Partai-partai politik yang berbasis religius (Islam) dipaksa melakukan difusi dan menyatukan diri membentuk satu partai politik.

Kemudian, partai-partai berbasiskan nasionalis juga diharuskan bergabung untuk membentuk satu partai politik berbasis nasional. Sementara Golkar berdiri sendiri sebagai partai penguasa tunggal. Ini berlaku pada tahun 1973 dengan bentukan “3 Partai Politik (Partai Persatuan Pembangunan, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia)”<sup>14</sup>.

Dalam kaitan ini, partai-partai politik non pemerintah (Golkar) diawasi secara intens terhadap sepak terjangnya dari mulai pusat sampai ke daerah. Kemudian diberlakukan asas tunggal, yakni hanya menetapkan satu asas, yakni Pancasila. Tidak boleh ada asas lain kecuali Pancasila. Hal ini berlaku terus sampai pada pemilu tahun 1997, sebelum Soeharto sebagai penguasa Orde Baru

---

<sup>14</sup>Rabiah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu*, h. 19.

tumbang akibat desakan reformasi yang dilakukan oleh para mahasiswa pada tanggal 21 Mei 1998.

Setelah itu, Indonesia memasuki era Orde Reformasi dengan angin keterbukaan. Di bawah pemerintahan Presiden BJ. Habibie, masyarakat Indonesia diberi kesempatan dan kebebasan untuk berkumpul dan bersyarikat serta membentuk partai politik. Hal ini sejalan dengan amanat Pancasila sila ke empat, yakni “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kemudian, pasal 28 dari UUD 1945 juga memberikan kesempatan untuk melakukan hal tersebut.

Menyahuti amanat Pancasila dan UUD 1945 tersebut, maka tumbuhlah berbagai partai politik dengan berbagai aliran didalamnya, seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Partai-partai yang mengusung semangat nasionalis dan religius bermunculan ketika itu. Sampai saat ini sudah dua kali dilakukan pemilu legislatif, yakni tahun 2003, dan 2008.

Tercatat sampai saat sekarang, khususnya partai-partai religius (Islam) yang masih eksis antara lain PPP, PKB, PBB. Sementara itu, di awal kelahirannya, PKS mengedepankan isu partai berbasis agama (religius), namun pada akhirnya menyatakan diri sebagai partai tengah atau partai terbuka untuk semua lapisan. PAN, walaupun dimotori oleh orang-orang yang berjiwa religius, tetapi sejak dari awal menyatakan diri sebagai partai terbuka untuk semua golongan masyarakat.

Dari sekian banyak partai politik berbasis religius (Islam), pada penelitian ini penulis mencoba mencermati pergerakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam kancah perpolitikan Indonesia. Fokus perhatian akan dipersempit area pembahasannya, yakni keberadaan PPP di wilayah Propinsi Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Adapun yang dianalisa adalah dinamika PPP pada tahun 2004-2009. Tujuannya adalah untuk mengetahui eksistensi PPP terhadap perkembangan politik di Kota Medan, dan tingkat pengaruhnya terhadap kehidupan politik umat Islam di Kota Medan.

Memang diakui bahwa PPP sejak proses fusi pada tahun 1973, merupakan wadah satu-satunya bagi aspirasi politik umat Islam. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dhurorudin Mashad yang menegaskan bahwa “Secara formal seluruh

kekuatan politik Islam terintegrasi dalam satu wadah partai”.<sup>15</sup> Walaupun tidak dapat dipungkiri terjadi tarik menarik kepentingan di antara partai-partai yang bergabung kedalam PPP. Kemudian terjadi proses pengembosan pada PPP yang pada awalnya berlambang Ka’bah, dan berubah menjadi lambang bintang lima sesuai dengan keinginan penguasa Orde Baru.

Namun seiring dengan perjalanan waktu, peran-peran yang dimotori oleh PPP untuk mengelola seluruh aspirasi umat Islam, secara perlahan namun pasti mengalami distorsi. Hal ini dikarenakan partai-partai lain, terutama partai penguasa (Golkar) ikut serta memainkan peran tersebut dengan memasuki kantong-kantong PPP untuk mengambil simpati pendukung PPP dan mengalihkannya menjadi pendukung Golkar.

Hal ini pun terus berlanjut di era sekarang ini, bahwa upaya mengakomodir kepentingan umat Islam tidak lagi hanya dilakukan oleh partai-partai berbasis religius (Islam), tetapi semua partai yang ada di Indonesia melakukan hal yang sama untuk menarik minat dan simpatik umat Islam memberikan dukungan kepada partainya. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan “Dikotomi antara politik Islam dengan kelompok politik lain”.<sup>16</sup>

Kenyataan ini mengharuskan partai-partai politik Islam, khususnya PPP untuk berjuang keras kembali menarik simpati umat Islam agar memberikan dukungan secara penuh terhadap PPP. Untuk itu PPP harus melakukan evaluasi dan mencari format terbaru sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap eksistensi PPP di masa-masa yang akan datang.

Di Kota Medan, partai-partai politik Islam, khususnya PPP sejak Pemilu Legislatif secara langsung di tahun 2004 dan 2009 mengalami pasang surut dinamika organisasinya. Peluang dan tantangan organisasi partai terjadi, baik bersifat internal maupun eksternal. Tantangan bersifat internal terkait dengan upaya konsolidasi ke berbagai ranting di Kecamatan dengan tujuan agar partai yang ada tetap eksis.

---

<sup>15</sup>Dhurorudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 15.

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 16.

Kemudian tantangan bersifat eksternal muncul dari lahirnya berbagai partai dengan berbagai latar belakang pendidikan, organisasi, ekonomi dan budaya maupun agama yang membuat partai politik berbasis Islam, khususnya PPP menjadi berkurang pendukungnya di Kota Medan. Akibatnya terjadi penurunan perolehan suara pada Pemilu Legislatif. Resiko yang timbul adalah hilangnya sejumlah kursi yang diperoleh di DPRD Kota Medan.

Selama ini pendukung PPP dikenal sebagai kelompok tradisional yang masih berpegang pada simbol-simbol keagamaan, ternyata tidak mampu memberikan harapan yang berarti. Karena pada Pemilu Legislatif 2004 hanya memperoleh 4 kursi Legislatif. Apabila dibandingkan dengan PKS yang sebelumnya bernama PK sebagai partai baru bisa memperoleh 9 suara kursi Legislatif. Kemudian pada Pemilihan Legislatif tahun 2009, PPP hanya memperoleh 3 kursi Legislatif, dan PKS sebanyak 7 kursi legislatif di DPRD Kota Medan. Terjadinya penurunan perolehan suara dan kursi PPP di DPRD Kota Medan sejak tahun 2004 sampai 2009 memunculkan pertanyaan mendasar, mengapa hal itu bisa terjadi ?.

Mengapa dukungan dari masyarakat semakin menurun, padahal partai ini sudah eksis cukup lama dibandingkan dengan partai Islam lainnya. Kemudian partai ini kembali kepada asasnya, yakni Islam. Ka'bah dikembalikan sebagai simbol partai yang sebelumnya berlambangkan bintang lima. Ka'bah merupakan arah tujuan umat Islam ketika beribadah kepada Allah dalam shalat lima waktu, dan diakui sebagai alat pemersatu umat, ternyata tidak menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Islam di Kota Medan untuk memilih PPP.

Mencermati fenomena-fenomena ini, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam dengan melakukan penelitian dan mengemukakannya dalam bentuk laporan penelitian berupa Tesis yang diberi tema **“Dinamika Partai Politik Islam Kota Medan Tahun 2004-2009 (Studi Kasus: Partai Persatuan Pembangunan (PPP))”**.

## **I. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka beberapa rumusan masalah penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

5. Bagaimana dinamika perkembangan partai politik Islam di Kota Medan tahun 2004-2009, khususnya PPP ?
6. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penurunan perolehan suara dan kursi PPP di DPRD Kota Medan ?
7. Bagaimana respon umat Islam terhadap keberadaan partai politik Islam, khususnya PPP dalam mengakomodir kepentingan umat ?
8. Apa problematika yang dihadapi oleh partai politik Islam khususnya PPP dalam mengapresiasi kepentingan dan dukungan umat Islam dan bagaimana upaya mengatasinya ?

## **J. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan salah penafsiran terhadap tema atau judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan terhadap beberapa istilah yang dipergunakan sebagai berikut:

3. Dinamika, akar katanya adalah dinamik yang berarti “Sifat/tabiat yang bertenaga dan berkekuatan sehingga selalu bergerak, selalu sanggup menyesuaikan diri dengan keadaan dsb”.<sup>17</sup> Dinamika diartikan sebagai dinamis yang berarti “Mempunyai sifat (tabiat) yang bertenaga dan berkekuatan sehingga selalu bergerak, selalu sanggup menyesuaikan diri dengan keadaan dsb”.<sup>18</sup> Arti lain bermakna “Penuh tenaga dan semangat untuk bergerak & punya kemampuan untuk menyesuaikan diri, penuh semangat”.<sup>19</sup> Adapun yang penulis maksud dengan dinamika dalam penelitian ini adalah perkembangan atau sesuatu keadaan yang terjadi

---

<sup>17</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 251.

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>J.S. Badudu, *Kamus Ilmiah Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003), h. 63.

selama beberapa kurun waktu pada salah satu partai politik Islam, dalam hal ini adalah PPP yang ada di Kota Medan Tahun 2004-2009.

4. Partai Politik Islam merupakan partai politik yang berasaskan Islam sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik itu sendiri. Dalam kaitan ini beberapa partai politik Islam yang ada di Kota Medan antara lain; PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PBB (Partai Bulan Bintang), PBR (Partai Bintang Reformasi). Dalam kajian tesis ini hanya satu yang menjadi sorotan, yakni PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

Berdasarkan beberapa batasan istilah yang dikemukakan, maka yang dimaksud dengan dinamika partai politik Islam di Kota Medan tahun 2004-2009 merupakan pergerakan, perkembangan dan keadaan partai politik Islam ketika masa pemilihan Legislatif dalam perolehan suara untuk mendapatkan kursi legislatif pada Pemilu Legislatif pada tahun 2004-2009.

#### **K. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai dinamika partai politik Islam di Kota Medan pada tahun 2004-2009. Secara khusus tujuan penelitian ini antara lain:

5. Untuk mengetahui dinamika perkembangan partai politik Islam di Kota Medan pada tahun 2004-2009, khususnya PPP.
6. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan perolehan suara dan kursi PPP di DPRD Kota Medan.
7. Untuk mengetahui respon umat Islam terhadap keberadaan partai politik Islam, khususnya PPP dalam mengakomodir kepentingan umat.
8. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi oleh partai politik Islam khususnya PPP dalam mengapresiasi kepentingan dan dukungan umat Islam dan upaya mengatasinya.

Sementara itu, penelitian ini secara teoritik maupun secara praktis diharapkan bermanfaat atau berguna, antara lain:

3. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai sepak terjang partai politik Islam, baik di awal menjelang kemerdekaan negara Indonesia, setelah merdeka sampai Orde Lama, di masa Orde Baru, sampai pada masa Orde Reformasi, khususnya terhadap kelahiran PPP.
4. Secara praktis penelitian ini dapat membantu untuk memperluas cakrawala pengetahuan tentang dinamika dan keadaan yang terjadi pada partai politik Islam di Kota Medan maupun hasil pemilihan legislatif pada tahun 2004-2009, khususnya PPP.

#### **L. Kajian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan kajian berkaitan dengan partai politik Islam diantaranya:

4. Penelitian H. Ali Murtadha tahun 2004, judul “Perundang-Undangan Tentang Partai Politik Islam: Pemetaan dan Harapan di Era Reformasi”. Penelitian ini menjelaskan mengenai Undang-Undang pendirian partai politik di era reformasi, sehingga banyak muncul partai-partai berasaskan Islam. Undang-Undang dimaksud adalah UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik. UU No. 3 Tahun 1999 dan UU No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Kesimpulan dari penelitian ini adalah UU No. 2 Tahun 1999 memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik, disebabkan UU No. 3 Tahun 1975 tidak responsif terhadap aspirasi yang berkembang, sehingga kehidupan demokrasi tidak berjalan dengan baik. Kemudian, disoroti pula pada era reformasi ternyata partai-partai yang berasaskan Islam tidak dapat bersaing dengan partai-partai berasaskan nasionalis, terutama di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan.
5. Penelitian Rafdinal tahun 2000, judul “Pengaruh Kepemimpinan Politik Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Keadilan Rakyat pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sumatera Utara”. Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh antara

penerapan kepemimpinan politik Islam terhadap peningkatan kesejahteraan dan keadilan rakyat, di bawah kepemimpinan DPW PPP Sumatera Utara. Dalam kaitan ini masih terlalu rendahnya penerapan kepemimpinan politik Islam dijalankan oleh DPW PPP Sumatera Utara, sehingga kesejahteraan dan keadilan rakyat belum terpenuhi. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukannya dengan penegasan bahwa kepemimpinan pada Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara, belum sepenuhnya didasarkan kepada ciri-ciri kepemimpinan politik Islam, terutama yang berhubungan dengan sikap dan perilaku elit pimpinan dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Kemudian, pelaksanaan program yang dijalankan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara selama ini belum berhasil meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, karena berbagai hambatan yang ditemui, baik bersifat internal maupun eksternal. Terutama di bidang penegakan hukum, keadilan ekonomi, kebutuhan pendidikan, dan pembinaan suasana keagamaan di masyarakat.

6. Penelitian Muniruddin tahun 2005, judul “Dinamika Politik Umat Islam (Studi Kasus Perolehan Suara Partai Politik Islam pada Pemilu Tahun 1999 dan 2004 di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman). Kesimpulan penelitian ini adalah ada beberapa faktor penyebab partai politik Islam mengalami kekalahan dalam Pemilu tahun 1999 dan 2004 di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, antara lain disebabkan faktor memudarnya fanatisme terhadap simbol Islam, faktor program partai yang ditawarkan kurang menarik bagi rakyat, dan faktor kepemimpinan lokal partai yang kurang simpati bagi rakyat. Kemudian terjadi perubahan perilaku pemilih dari kalangan umat Islam pada pemilu tahun 1999 dan tahun 2004 di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, antara lain; faktor alternatif partai politik, faktor alternatif calon legislatif, faktor program yang ditawarkan, faktor perubahan persepsi masyarakat terhadap partai politik Islam, dan faktor kepemimpinan lokal dari partai politik yang dipilih.

## **M. Metodologi Penelitian**

### **8. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah berbentuk penelitian kualitatif, yakni “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”<sup>20</sup> Maka untuk mengolah dan menganalisa data dalam penelitian ini digunakan prosedur penelitian kualitatif, yakni dengan menjelaskan atau memaparkan penelitian ini apa adanya serta menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

### **9. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian lapangan (*Field Research*), yakni melakukan pendekatan terhadap obyek-obyek yang menjadi kajian penelitian di lapangan. Dalam kaitan ini adalah terhadap partai politik Islam, yakni PPP dan masyarakat (umat Islam) di Kota Medan. Untuk mengumpulkan data di lapangan dilakukan dengan cara melakukan observasi atau pengamatan terhadap perkembangan partai politik Islam, khususnya PPP, dan dinamikanya di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Kemudian melakukan interview atau wawancara dengan tokoh-tokoh yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya melakukan studi dokumentasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPP Kota Medan di masyarakat, khususnya umat Islam Kota Medan. Dan tidak menutup kemungkinan mengambil literatur perpustakaan sebagai landasan teori-teori yang digunakan bagi penulisan penelitian ini.

### **10. Subyek Penelitian**

Sebuah penelitian perlu ditentukan subyek penelitiannya yang menjadi bagian penting dan tak dapat dipisahkan dari berbagai rangkaian kegiatan penelitian. Adapun yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah “Benda, hal

---

<sup>20</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan”.<sup>21</sup> Berdasarkan pengertian ini maka subyek penelitian merupakan sesuatu berupa benda, hal atau orang yang dijadikan tempat atau sumber data atau informasi yang dipermasalahkan.

Pengertian lain tentang subyek penelitian adalah “Sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti”.<sup>22</sup> Berdasarkan pengertian ini maka subyek penelitian merupakan titik sumber informasi untuk dilakukannya sebuah penelitian. Pada subyek penelitian ini data terkumpul, tempat bersemayamnya variabel penelitian, populasi maupun sampel.

Berdasarkan sumber informasi data yang diperoleh, maka data yang dihimpun dalam penelitian ini subyek penelitiannya difokuskan kepada dua bagian, yaitu:

- d. Subyek data primer, yaitu data utama yang diperoleh dari pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Medan Masa Bakti 2010-2015.
- e. Subyek data sekunder, yaitu data pelengkap sebagai pendukung dalam penelitian ini yang diperoleh dari:
  - 7) Anggota DPRD Kota Medan yang berasal dari PPP Kota Medan.
  - 8) Tokoh Agama.
  - 9) Tokoh Masyarakat
  - 10) Akademisi
  - 11) Pengamat Politik
  - 12) Masyarakat mewakili daerah pemilihan PPP Kota Medan.

## **11. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu partai politik yang berkembang di Kota Medan, yakni Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Medan, yang beralamat di jalan Sekip Baru No. 44 Medan. Secara struktural, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Medan berada di bawah naungan Dewan Pimpinan

---

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 116.

<sup>22</sup>Saiful Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 34.

Wilyah (DPW) PPP Sumatera Utara, yang diketuai oleh H. Fadly Nurzal, S.Ag dan sekretarisnya adalah H. Ali Jabbar Napitupulu.

Sementara itu untuk DPC PPP Kota Medan, kepengurusan masa bakti 2010-2015 ketuanya dijabat oleh Aja Syahri, S.Ag dan sekretarisnya adalah H. Irsal Fikri, S.Sos. dibantu oleh beberapa personalia. Untuk mengetahui susunan pengurus DPC PPP Kota Medan, baik pengurus harian, pimpinan Majelis Pertimbangan, dan pimpinan Majelis Pakar masa Bakti 2010-2015 dapat dilihat pada lampiran yang ada.

Untuk mendapatkan data akurat dalam penelitian ini, peneliti langsung hadir ke lokasi penelitian, yakni ke kantor DPC PPP Kota Medan, dengan melakukan berbagai pendekatan ke berbagai pihak, sekaligus mencari informasi tentang hal-hal yang menjadi pokok bahasan penelitian melalui dialog atau wawancara yang dilakukan. Di samping ikut serta membantu tugas-tugas yang diemban serta ikut mencarikan solusi bagi penyelesaian masalah yang dihadapi. Adapun waktu yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sekitar 5 bulan, dimulai dari bulan Oktober 2011 sampai bulan Februari 2012. Adapun langkah-langkah penelitian serta waktu yang dipergunakan dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL I**  
**JADWAL PENELITIAN**

NO	KEGIATAN YANG DILAKUKAN	BULAN																			
		Oktober				Nopember				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian awal, pengumpulan informasi, pengajuan judul penelitian, pengesahan judul penelitian	x																			
2	Penyusunan Proposal, pengajuan ke Pembimbing, perbaikan, pengesahan proposal, pengurusan izin riset/penelitian, izin melakukan penelitian di lapangan					x					x					x					



ilmuan yang dikemukakan dalam bentuk tulisan. Sehingga dapat dijadikan rujukan dan menambah sumber data yang diinginkan dalam penelitian ini.

### **13. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik untuk melakukan analisa data penelitian dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan. Proses analisa ini berlangsung secara sirkuler selama penelitian ini berlangsung. Adapun penjelasan ketiga tahapan ini sebagai berikut:

#### **d. Mereduksi Data**

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, menfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah/kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menonjolkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

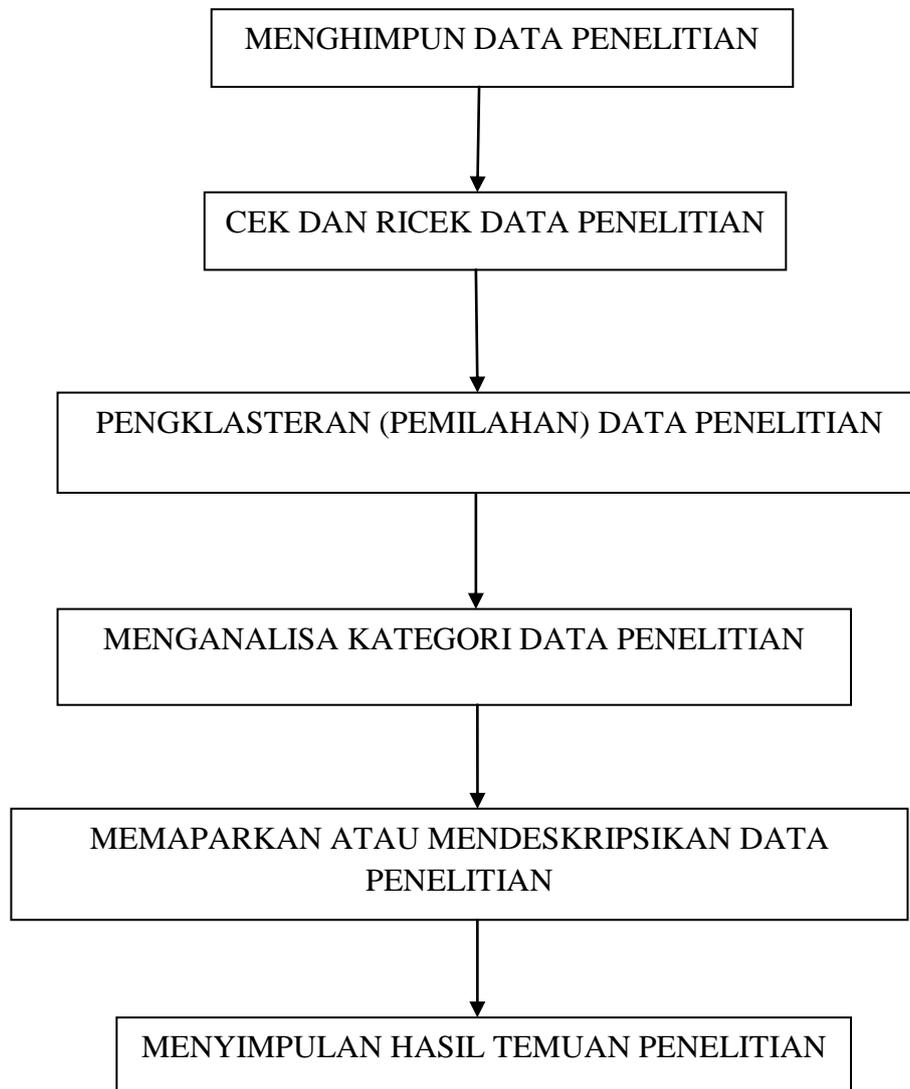
#### **e. Menyajikan Data**

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang disusun dan memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Jadi penyajian data ini merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh.

#### **f. Membuat Kesimpulan**

Data awal yang berwujud kata-kata, tulisan dan tingkah laku perbuatan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, interview atau wawancara dan studi dokumentasi sebenarnya sudah dapat memberikan kesimpulan, tetapi sifatnya masih longgar. Dengan bertambahnya data yang dikumpulkan secara sirkuler bersama reduksi dan penyajian, maka kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh.

Secara spesifik alur kerja dari penelitian ini dapat dijelaskan melalui skema berikut:



#### **14. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dari lapangan, data yang ada akan dianalisa dan diperiksa dengan menggunakan beberapa indikator pertimbangan, antara lain:

- c. Memeriksa kualitas data yang bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran terjadinya data yang subyektif.
- d. Memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang ada.

- f. Berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat tentang hasil sementara atau hasil akhir penelitian.

## **N. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini dapat dikemukakan antara lain:

Bab I: Pendahuluan, berisikan: latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Eksistensi partai politik Islam dalam sistem demokrasi Indonesia, berisikan; pemikiran politik dalam Islam, perkembangan politik Islam di Indonesia sebelum abad 20, perkembangan politik Islam Indonesia abad ke 20, partisipasi partai politik Islam dalam Pemilu di Indonesia.

Bab III: Perkembangan PPP dalam skala Nasional, berisikan; sejarah awal pembentukan PPP, sepaik terjang PPP sejak pembentukan sampai menjelang Reformasi tahun 1999, dan kondisi internal PPP di Era Reformasi (1999 – sekarang).

Bab IV: PPP dan Dinamika Politiknya di Kota Medan Tahun 2004-2009, berisikan; perkembangan PPP di Kota Medan tahun 2004-2009, faktor-faktor penyebab penurunan perolehan suara dan kursi PPP di DPRD Kota Medan, respon umat Islam terhadap keberadaan PPP dalam mengakomodir kepentingan umat Islam, problematika yang dihadapi oleh PPP dalam mengapresiasi kepentingan dan dukungan umat Islam Kota Medan dan upaya mengatasinya.

Bab V: Penutup, berisikan; kesimpulan dan saran, dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar lampiran, daftar ralat, dan daftar riwayat hidup.

## **Lampiran 1**

Proposal Tesis berjudul : **“Dinamika Partai Politik Islam Kota Medan Tahun 2004-2009 (Studi Kasus : Partai Persatuan Pembangunan (PPP)”**, oleh Sdr. Zulkarnaen Sitanggang, NIM. 09 PEMI 1409 telah diseminarkan pada tanggal, ....., dan dapat dipertimbangkan sebagai judul Tesis untuk ditetapkan dalam rapat pimpinan PPS IAIN SU Medan.

Medan,

**Prof.Dr.H.Hasan Bhakti Nst, MA**

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- I. Latar Belakang Masalah .....
- J. Perumusan Masalah .....
- K. Batasan Istilah .....
- L. Tujuan Penelitian .....
- M. Kegunaan Penelitian .....
- N. Kajian Terdahulu .....
- O. Landasan Teoritis .....
- P. Metodologi Penelitian .....
- 2. Pendekatan Penelitian .....
- f. Penelitian Lapangan (Field Research) .....
- g. Sumber Data .....
- h. Instrumen Pengumpulan Data .....
- i. Karakteristik Responden .....
- j. Analisis Data .....

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....

- D. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Medan .....
- E. Kondisi Sosio Kultural Masyarakat Kota Medan .....
- F. Kehidupan Politik dan Religius (Agama) Masyarakat Kota Medan .....

BAB III : EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM  
DEMOKRASI INDONESIA .....

- E. Gagasan Awal Pembentukan Partai Politik .....

F. Sejarah Pemilu Di Indonesia .....	
G. Kehadiran Partai Politik Islam di Indonesia .....	
H. Partai Politik Islam dan Sistem Demokrasi Indonesia .....	

Halaman

#### BAB IV : DINAMIKA PARTAI POLITIK ISLAM (PPP) DI KOTA

MEDAN TAHUN 2004-2009 .....

##### C. PPP dan Dinamika Partai .....

4. Sejarah Awal Pembentukan PPP .....

5. Pola Kepemimpinan PPP .....

6. Peluang dan Tantangan PPP Dari Masa Ke Masa .....

##### D. Pergerakan PPP di Kota Medan Tahun 2004-2009 .....

5. Faktor-Faktor Penyebab Penurunan perolehan Suara dan Kursi PPP di DPRD Kota Medan .....

6. Respon PPP Mengakomodir Kepentingan Umat Islam ...

7. Respon Masyarakat Terhadap Eksistensi PPP di Kota Medan .....

8. Problematika yang Dihadapi PPP Mengapresiasi Kepentingan dan Dukungan umat Islam Serta Upaya Mengatasinya .....

#### BAB V : PENUTUP .....

C. Kesimpulan .....

D. Saran-Saran .....

DAFTAR PUSTAKA .....

DAFTAR LAMPIRAN .....

DAFTAR RALAT .....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....

## BAB II

### EKSISTENSI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA

#### A. Pemikiran Politik Dalam Islam

Bangunan kebangsaan suatu negara tidak bisa dipisahkan dari suatu sistem politik, sebagai upaya menyuarkan aspirasi masyarakat, dan mengembangkan sistem ketatanegaraan serta menghadirkan pola kepemimpinan negara yang ditentukan berdasarkan haluan politiknya. Secara harfiah Abuddin Nata menjelaskan bahwa politik berarti “Siyasat, reka perdaya, atau taktik”.<sup>23</sup> Inu Kencana Syafie menjelaskan bahwa “Politik itu sendiri berarti cerdas atau bijaksana”.<sup>24</sup>

Rusadi Kantaprawira mengutip pendapat Robert Dahl mengatakan bahwa “Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata “*Polis*” yang berarti “Negara Kota”. Dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan”.<sup>25</sup> Tetapi, politik bisa juga diartikan sebagai “Kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan, pemerintahan, konflik dan pembagian atau kata-kata yang serumpun”.<sup>26</sup>

Pemikiran yang terakhir ini sejalan dengan pernyataan Abuddin Nata yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan politik adalah “istilah yang berhubungan dengan cara mendapatkan kekuasaan, mengelola, memanfaatkan, memelihara serta mempertahankannya agar tidak berpindah kepada orang lain”.<sup>27</sup> Dengan demikian, dalam politik ada kekuatan yang dibangun agar eksistensi atau keberadaan dan kekuasaan yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain.

Sementara itu, Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa “Politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan

---

<sup>23</sup> Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 230.

<sup>24</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 18.

<sup>25</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1985), h. 10.

<sup>26</sup> Hoogerwerf (RLL Tobing), *Politikologi (Politologie)* (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 43.

<sup>27</sup> Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam*, h. 230.

(*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*)”.<sup>28</sup>

Selanjutnya, bila dianalisa secara mendalam bahwa pemikiran tentang politik, khususnya di dunia Barat cenderung banyak dipengaruhi oleh pemikiran Filosof Yunani abad ke 5 sm, seperti Plato dan Aristoteles, yang memberikan gambaran tentang pengertian politik, yakni “Suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*policy*) yang terbaik. Di dalam *policy* semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi”.<sup>29</sup>

Pemikiran ini adalah pemikiran ideal yang patut dikembangkan untuk menciptakan harmonisasi politik. Tetapi, pemikiran ini mengalami pergeseran ke arah yang lebih pragmatis, yakni untuk mendapatkan kekuasaan, mengambil keputusan, menetapkan kebijakan, dan mencoba melakukannya dengan upaya paksa. Upaya politik seperti ini tentu memiliki resiko, yakni terjadinya konflik di antara sesama masyarakat. Karena itu, dalam politik ada upaya-upaya untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi, yakni mengambil keputusan untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat, dan menghindari konflik yang terjadi.

Ini sejalan dengan pemikiran dua tokoh berikut sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, yakni:

1. Menurut Rod Hague et.al: “Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.
2. Menurut Andrew Heywood: Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 14.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 16.

Memahami pemikiran-pemikiran di atas mengenai pengertian politik secara umum, Tobroni dan Syamsul Arifin mengutip pendapat Ramlan Surbakti menyebutkan sekurang-kurangnya ada lima kerangka konseptual yang dapat dipergunakan dalam memahami politik, yakni:

*Pertama*, politik dipahami sebagai usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.<sup>31</sup>

Sementara itu dalam konteks Islam, menurut Muhammad Al-Syaha Al-Junudy sebagaimana dikutip oleh Ajib Tohir, politik berarti “Pengendalian umat dan pengaturan kekuasaannya dengan program-program yang dapat merealisasikan kepentingan agama dan dunia dalam bingkai aturan Islam dan ikatan-ikatan politis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam”.<sup>32</sup>

Berdasarkan pemikiran di atas menunjukkan bahwa politik merupakan bagian dari penataan kehidupan masyarakat agar lebih teratur dengan adanya aturan yang diberlakukan sesuai dengan program yang telah direncanakan yang disesuaikan dengan landasan ajaran agama Islam. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam mengikat seluruh umatnya dalam berbagai dimensi hidup, termasuk dalam menata kekuasaan di muka bumi sebagai khalifah (pemimpin) atau wakil Allah agar berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam hukum-hukum Allah di dalam Alquran.

Agama Islam diturunkan Allah SWT kepada umat Islam dengan tujuan menjadi petunjuk dan pedoman dalam segenap lingkup kehidupan, termasuk dalam konteks ini kehidupan berpolitik. Karena itu sudah sewajarnya kalau umat Islam merujuk kepada tuntunan Alquran dan sunnah Rasulullah dalam menjalankan praktek politiknya.

---

<sup>31</sup>Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik* (Yogyakarta: Sypress, 1994), h. 38.

<sup>32</sup>Ajib Thohir, *Perkembangan Peradaban DI Kawasan Dunia Islam, Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 27.

Mohammad Natsir sebagaimana dikomentari oleh Mohammad Daud Ali dan Habibaah Daud menegaskan bahwa:

Islam itu melingkupi segenap bidang hidup, tiada satu bidang pun, termasuk politik atau Negara, yang dapat dipisahkan daripadanya. Kriteria yang dipergunakan ialah ajaran Quran dan Sunnah Nabi, apalagi karena memang Nabi dalam masa risalnya membentuk suatu umat bermasyarakat yang dibina dengan peraturan-peraturan dan sikap serta kecenderungan tertentu, yang mempunyai hubungan teratur dengan golongan dan bangsa lain, semuanya disertai pentadbiran yang kemudian dapat kita kenal dengan nama Negara dan terletak dalam bidang yang kemudian disebut politik.<sup>33</sup>

Berdasarkan pemikiran Mohammad Natsir ini tampak bahwa ajaran Islam menyandarkan urusan Negara atau politik pemerintahan kepada landasan ideal umat, yaitu Alquran dan Sunnah (Hadis). Mohammad Natsir kembali mengatakan bahwa “Pimpinan yang diberikan oleh Rasulullah termasuk pimpinan hidup bermasyarakat, ajaran yang diberikan Islam termasuk ajaran tentang hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, suatu pemerintah dalam negeri Islam haruslah pula mengikuti pedoman ini”.<sup>34</sup>

Kemudian, Ibnu Khaldun, salah seorang tokoh politik di kalangan umat Islam menegaskan bahwa:

Dan jika berbagai peraturan (politik) ini berasal dari cendekiawan, pembesar negara dan para ahli, maka itu adalah politik rasionalis. Dan jika ditetapkan dari Allah, sebagai pembuat syari’at yang ia tetapkan dan syariatkan, maka ia merupakan politik agama yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Itu disebabkan karena tujuan mereka bukan hanya dunia, karena ia adalah sia-sia dan batil dimana hilirnya hanyalah kematian dan kefanaan.<sup>35</sup>

Pemikiran Ibnu Khaldun ini menggaris bawahi bahwa setiap gerak politik umat Islam harus berlandaskan kepada ajaran agama Islam yang bersumber langsung kepada Sang Rekayasa Alam, yaitu Allah SWT. Hal ini dimaksudkan agar cita-cita luhur dari politik itu dapat direalisasikan di tengah-tengah umat, yaitu membawa kemaslahatan masyarakat dari dunia hingga akhirat. Kemudian

---

<sup>33</sup> Mohammad Daud Ali, Habibaah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 330.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 336.

<sup>35</sup> Dhurorudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. I, 2008), h. vii.

Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa apabila konsep politik bertumpu pada pemikiran manusia semata hanya bermanfaat di dunia saja, tanpa membawa kemaslahatan hingga akhirat.

Dale F. Eickelman dan Jamnes Piscatori menegaskan bahwa politik dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh kedua tokoh ini bahwa politik dalam ajaran Islam “Dibangun atas contoh dari Nabi, yang pada saat bersamaan bertindak sebagai pemimpin spiritual sekaligus pemimpin komunitas politik. Dipertahankannya institusi kekhalifahan juga didasarkan atas keyakinan bahwa kekuasaan agama dan politik harus digabungkan dalam satu atap, sehingga memungkinkan syariat bisa diterapkan dan komunitas muslim terlindungi.”<sup>36</sup>

Dengan demikian, ajaran Islam menyandarkan segala urusan politik kepada dua sumber utama, yakni Alquran dan hadis. Di dalam Alquran, banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang politik Islam, diantaranya merujuk kepada ayat Alquran surah Annisa’ (4) ayat 26 sebagai berikut:

**يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم  
(النساء: 26)**

Artinya: “Allah hendak menerangkan (hukum syari’at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang sebelum kamu (para Nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa’ (4): 26).<sup>37</sup>

Ayat ini secara terbuka menjelaskan tentang penegakan supremasi hukum oleh Allah SWT kepada umat-Nya yang telah ditegakkan sejak masa para Nabi dan Rasul sebelum-sebelumnya, dengan maksud agar menjadi pelajaran berarti di masa-masa depan bagi umat Islam dan umat-umat yang lain. Kemudian, pada firman Allah surah an-Nisa (4) ayat 58 dapat dilihat realitas politik yang diinginkan oleh Islam, sebagai berikut:

---

<sup>36</sup>Dale F. Eickelman, James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim* (Bandung: Mizan, 1998), h. 60.

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Pers, 1995), h. 121.

ان الله يا مريم ان تؤدوا لا منت الى اهلها واذحكتم بين الناس ان تحكموا  
بالعدل ان الله نعمًا يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا (النساء: 58)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa’ (4): 58).<sup>38</sup>

Ayat ini menegaskan persoalan politik dalam Islam dengan mengedepankan penyerahan kekuasaan yang dalam istilah Alquran adalah “amanat” kepada yang berhak menerimanya, yakni orang yang memiliki ilmu pengetahuan, cakap, memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas yang diberikan, memiliki integritas dan bermoral yang baik, serta mampu berlaku adil. Upaya ini dimaksudkan agar kemaslahatan umat Islam dapat terjaga dengan baik, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara benar-benar atas dasar landasan ajaran agama Islam.

Kemudian, bagi pemegang kekuasaan, mengedepankan penerapan prinsip atau azas musyawarah dan lemah lembut dalam mengambil dan menetapkan hukum atau keputusan menjadi dasar kebersamaan hukum dan penerapannya terhadap semua lapisan umat Islam tanpa ada pengecualian. Ini dapat dilihat pada firman Allah surah Ali Imran (3) ayat 159 yang bunyinya sebagai berikut:

فبما رحمة من الله انت لهم ولو كنت فظًا غليظ القلب لا نفصتوا من حولك فاعف  
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمتم فتوكل على الله ان الله يحب  
المتوكلين (ال عمران: 159)

Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 128.

bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran (3): 159).<sup>39</sup>

Ayat ini harusnya menjadi inspirasi bagi pemimpin-pemimpin sebuah negeri untuk menegakkan kepemimpinannya dengan penuh perasaan, lemah lembut, kasih sayang dan penuh perhatian. Tidak boleh berlaku kasar atau kejam kepada masyarakat. Di samping hukum harus ditegakkan dengan adil, tegas, tanpa pandang bulu. Tetapi nilai-nilai kemanusiaan harus dikedepankan agar pemimpin pemerintahan dicintai dan di dukung oleh rakyat.

Kalaupun ternyata, rakyat atau masyarakat berbuat salah, maka harus mengedepankan prinsip memberikan keringanan atau kemaafan dan pengampunan. Walaupun prioritas utama memberikan sanksi terhadap seseorang atau masyarakat yang berbuat salah. Kemudian, untuk mengambil keputusan yang benar terhadap sesuatu kebijakan demi kemaslahatan masyarakat banyak, maka prinsip musyawarah untuk mufakat menjadi pedoman dasar. Apabila keputusan yang diambil sudah bulat, Allah memerintahkan untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak Allah. Artinya, memohon keridhaan Allah atas keputusan yang diambil agar tidak salah dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah.

Selanjutnya, ayat 59 surah an-Nisa' (4), Allah menegaskan kepada umat Islam untuk taat kepada pemimpin (penguasa) yang dilandasi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: 59)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 103.

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. An-Nisa (4): 59).<sup>40</sup>

Konsep Islam tentang pemikiran politik menegaskan bahwa ketaatan atau kepatuhan kepada kepala pemerintahan merupakan suatu keharusan, yang berbarengan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, bagi kepala pemerintahan (ulil amri), menjalankan roda kepemimpinan harus berpedoman kepada Alquran dan Sunnah (Hadis), karena keduanya merupakan sumber produk utama hukum yang diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya. Oleh karenanya, dasar utama hukum yang harus ditegakkan berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW.

Dalam konteks Islam kepala pemerintahan disebut dengan ulil amri. Secara harfiah ulil amri berasal dari bahasa Arab *Uli al-Amr*, yang berarti “orang yang memiliki urusan atau kekuasaan”.<sup>41</sup> Selanjutnya pengertian ulil amri difahami dengan dua arti, yakni : “Pertama menunjukkan pada orang yang menguasai bidang agama yang selanjutnya disebut ulama. Kedua menunjukkan pada orang yang menguasai bidang pemerintahan yang selanjutnya disebut pemerintah”.<sup>42</sup> Tetapi lebih jauh lagi ulil amri diartikan sebagai penguasa.

Kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasul maupun ulil amri menjadi perintah untuk dipatuhi oleh umat Islam, dan penerimaan dengan lapang dada atas segala keputusan yang diberikan kepadanya, asalkan keputusan tersebut benar dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat (umat Islam). Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah surah an-Nur ayat 51 (24) yang bunyinya sebagai berikut:

أَمَّا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (النور: 51)

Artinya: “Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 128.

<sup>41</sup>Nata, *Peta*, h. 236.

<sup>42</sup>*Ibid.*

ialah ucapan “Kami mendengar dan kami patuh”. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. An-Nur (24): 51).<sup>43</sup>

Ayat ini memberikan gambaran bahwa orang-orang yang dibawah kekuasaan para pemimpin negeri harus patuh dan taat terhadap kepemimpinan yang diberikan kepada orang yang ditunjuk untuk memimpin. Terpenting yang harus diingat bahwa keputusan dan ketaatan tersebut didasarkan kepada ketaatan dan kepatuhan pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya kepada petunjuk Allah dan Rasul yang tertera di dalam Alquran dan Hadis. Bila memang sudah demikian, maka tidak ada halangan bagi umat Islam untuk taat dan patuh kepada pemimpin.

Apabila ditelusuri secara mendalam, sesungguhnya banyak ayat-ayat Alquran lainnya yang menjelaskan tentang politik, dan patut menjadi rujukan dalam menjalankan sistem perpolitikan yang berdimensikan nilai-nilai keIslaman. Ini terpulang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menegaskan sistem perpolitikan yang dianut dalam menjalankan roda pemerintahan suatu negeri, termasuk bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Selain persoalan politik diketahui dari sumber utama, yakni Alquran, pada hadis-hadis Rasul juga dapat dilihat aturan-aturan berpolitik sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Salah satunya adalah menjadikan agama sebagai sandaran menjalankan politik sehingga tidak menyimpang dari kaidah-kaidah kebaikan, sebagaimana hadis berikut:

عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة, قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (رواه مسلم)

Artinya: “Abu Ruqayyah (Tamim) bin Aus Addary ra berkata: Bersabda Nabi SAW: Agama itu nasehat. Kami bertanya: Untuk siapa ? Jawab Nabi: Bagi Allah, dan Kitab-Kitab-Nya, dan Rasul-Nya, dan pemimpin-pemimpin serta kaum

---

<sup>43</sup>Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 553.

muslimin pada umumnya. (HR. Muslim).<sup>44</sup>

Hadis ini menegaskan bahwa segala sesuatu urusan harus dilandaskan pada ajaran agama Islam, termasuk dalam menjalankan roda pemerintah atau berpolitik, sehingga tercipta kebaikan atau kemaslahatan bagi masyarakat. Kemudian, dalam menerapkan aturan atau hukum, pemerintah perlu menegakkannya secara tegas sebagaimana dikemukakan pada hadis berikut ini:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الأيمان. (رواه مسلم)

Artinya: “Abu Said Alkhudry ra berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Siapa diantara kamu melihat mungkar, harus merubah dengan tangannya, bila tidak dapat maka dengan mulut (lisannya), apabila tidak dapat maka dengan hatinya, dan ini selemah-lemahnya iman (HR. Muslim)”<sup>45</sup>

Hadis ini secara jelas mengajarkan kepada kita bahwa memberikan aturan untuk menegakkan hukum secara tegas, yakni apabila ada pelanggaran hukum harus diproses sesuai dengan aturan. Tanpa pandang bulu dan dijalankan dengan benar, bukan karena ada kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi proses hukum.

Selanjutnya, Rasulullah SAW mengingatkan kaum muslimin untuk menjaga diri dari sifat kejam dan bengis dalam berpolitik atau menjalankan roda pemerintahan, karena perbuatan tersebut adalah sifat tercela. Ini dapat dilihat pada hadis berikut:

عن أبي سعيد الحسن البصرى : أنّ عائذ بن عمرورضى الله عنه دخل على عبيدالله بن زياد فقال:أى بنى ائى سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: انّ شرّالرّعاء الحطمة فاياك أن تكون منهم.... (رواه مسلم)

---

<sup>44</sup>Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Annawawy, *Tarjamah Riadhush Shalihin 1*, Alih Bahasa: H. Salim Bahreisy (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 186.

<sup>45</sup>*Ibid.*, h. 190.

Artinya: Abu Said (Alhasan) Albashry berkata: ‘Aidz bin ‘Amr ra masuk ke rumah Ubaidillah bin Ziyad, lalu berkata: Hai anakku, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya sejahat-jahat pemimpin (pemerintahan) ialah; yang kejam yang suka menghancurkan/memaksa kepada rakyatnya. Maka janganlah kamu termasuk golongan mereka.... (HR. Muslim)”.<sup>46</sup>

Hadis ini secara tegas melarang umat Islam untuk bersikap jahat atau kejam kepada orang lain dalam menjalankan kebijakan pemerintahan atau sebagai pemimpin, karena akan merugikan orang lain. Dan kepada masyarakat dianjurkan untuk melawan atau membantah kepada kepala pemerintahan yang bersikap kejam atau zholim dalam memerintah, sebagaimana dapat dilihat pada hadis berikut:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. (رواه أبو داود والترمذي)

Artinya: “Abu Said Alkudry ra berkata: Bersabda Nabi SAW: Seutama-utama jihad perjuangan yaitu kalimat hak yang diucapkan pada raja yang kejam zholim. (HR. Abu Dawud dan At-Turmudzi)”.<sup>47</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa kewajiban umat Islam untuk memberikan teguran kepada pemimpin yang bersikap kasar, jahat atau zholim dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu kepada setiap pemimpin agar menjalankan amanah sebagai penguasa benar-benar mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat atau orang yang dipimpinnya. Hal ini disebabkan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya, sebagaimana ditegaskan oleh hadis berikut:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته, الامام راع ومسئول عن رعيته.... (متفق عليه)

---

<sup>46</sup>Ibid., h. 195.

<sup>47</sup>Ibid., h. 196.

Artinya: “Ibnu Umar ra berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu akan ditanya tentang pimpinanmu terhadap rakyat. Presiden (seorang) pemuka) memimpin dan akan ditanya tentang pimpinannya (dan bertanggung jawab) terhadap rakyatnya.... (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>48</sup>

Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa setiap orang yang menjalankan amanah untuk memimpin masyarakat akan dimintai pertanggung jawabannya sebagai pemimpin. Karena itu dilarang seorang pemimpin (kepala pemerintahan) menipu rakyatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis berikut:

وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مامن عبد يسترعيه الله رعيّة يموت يوم يموت وهو غاشّ لرعيّته الأحرّم الله عليه الجنّة. (متفق عليه).

Artinya: “Abu Ya’la (Ma’qil) bin Yasar ra berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat, kemudian ketika mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya sorga. (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>49</sup>

Demikianlah beberapa hadis Rasulullah yang memberikan aturan rambu-rambu dalam menjalankan politik atau roda pemerintahan sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran agama, yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip ini sebagaimana telah dijalankan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Seyogyanya umat Islam mengikuti perbuatan Rasulullah SAW agar selamat di dunia sampai di akhirat.

## **B. Perkembangan Politik Islam di Indonesia sebelum abad 20.**

Perkembangan politik Islam di Indonesia, bersumbukan pada sejarah awal perkembangan Islam di dunia, yakni ketika Nabi Muhammad SAW memproklamkan diri menjadi Rasul, dan agama Islam menjadi agama umat

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 272.

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 492.

manusia, dan tidak ada lagi agama yang datang setelah agama Islam. Kemudian, menjadikan agama Islam sebagai aturan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Semasa hidupnya, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar-dasar politik yang tidak terpisah dari ajaran agama Islam. Rasulullah SAW telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Sebagai Nabi sekaligus kepala pemerintahan, Rasul mampu mengendalikan roda pemerintahan di pusat dakwah Islam, yakni di Kota Madinah, setelah hijrah dari Kota Mekkah. Umat Islam dan umat-umat lainnya mampu hidup berdampingan tanpa ada perselisihan dan pertikaian. Ini dikarenakan Rasul menekankan bahwa peran dan kedudukan semua umat sama dalam tatanan masyarakat Madinah yang madani.

Tidak ada yang lebih istimewa kedudukannya dibanding dengan yang lain, seperti umat Islam terhadap penganut agama lainnya. Hukum ditegakkan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Siapa saja yang bersalah akan dihukum, siapa yang benar akan dibela. Tidak pandang bulu, dari golongan mana saja, baik orang merdeka atau pun hamba sahaya. Bahkan Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa andaikan anaknya sendiri, yakni Siti Fatimah yang bersalah akan dikenai hukuman.

Nabi Muhammad SAW adalah pembawa risalah Allah SWT yang tidak ada penggantinya sampai akhir zaman. Namun sebagai kepala pemerintahan, pemegang otoritas politik umat Islam, Nabi dapat digantikan sewaktu-waktu, apabila terjadi hal-hal diluar dugaan manusia, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Katimin bahwa “Kedudukan Muhammad sebagai kepala Negara dapat digantikan oleh siapapun apabila memenuhi syarat-syarat tertentu”.<sup>50</sup>

Ini membuktikan adanya peluang umat Islam untuk menggantikan Rasulullah SAW ketika berhalangan, atau tidak mampu lagi berperan sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bisa saja menunjuk Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib atau

---

<sup>50</sup>Katimin, *Politik dan Masyarakat Pluralis* (Jakarta: Cita Pustaka Media, Cet. Pertama, 2010), h. 118.

sahabat lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pemerintahan. Namun, di masa itu karena Rasul masih ada, maka umat lebih memfokuskan penyelesaian masalah kepada sentral otoritas, yakni Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya, sepeninggal Rasulullah SAW, urusan politik atau pemerintahan umat Islam dilanjutkan oleh khalifah yang empat, para penguasa Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasyiah, dan dinasti-dinasti sesudahnya. Dan sampai saat sekarang ini untuk kepentingan politik umat Islam diakomodir lewat partai politik yang memperjuangkan tegaknya Syari'at agama Islam.

Sejak awal, persoalan politik cukup merisaukan hati umat Islam, karena adanya pertikaian-pertikaian politik yang tak kunjung selesai sejak zaman khalifah pertama, yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq sampai kepada zaman sekarang. Hal ini dilandasi karena adanya niat untuk memperebutkan kekuasaan, dimana kekuasaan bisa melanggengkan kehidupan duniawi dan membuat orang bisa lupa diri. Di samping untuk mempertahankan kekuasaan yang telah dipegang agar tidak jatuh ke tangan orang lain.

Fakta menunjukkan bahwa dinamika politik dalam dunia Islam muncul ketika Rasulullah SAW wafat. Semasa hidup, Nabi tidak sempat menunjuk siapa penggantinya setelah wafat sebagai pemimpin umat dan tidak sempat pula meletakkan dasar-dasar cara untuk memilih dan menetapkan pemimpin. Akibatnya terjadi kegoncangan di kalangan umat Islam, dan menjadi masalah awal perselisihan umat Islam di bidang politik.

Ahmad Amin mengemukakan bahwa “Masalah kekhalifahan ini menjadi sumber perselisihan pertama di kalangan kaum muslim yang dihadapkan kepada suatu masalah besar mengenai siapakah yang akan menggantikan Rasulullah sebagai penerus kepemimpinan umat”.<sup>51</sup> Hal ini terjadi ketika jenazah Rasulullah masih belum dikebumikan.

Syed Mamudunnasir memperkuat pernyataan di atas dengan penegasan bahwa “Pada waktu itu terdapat tiga kelompok umat Islam yang bersaing, yaitu

---

<sup>51</sup>Ahmad Amin, *Islam dari Masa Ke Masa*, Terj Abu Laila & Muhammad Tohir (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. I, 1997), h. 80.

‘Anshar, Muhajirin dan Bani Hasyim yang terlibat dalam permasalahan kekhalifahan (khilafah)’.<sup>52</sup> Berdasarkan pernyataan ini terlihat adanya perselisihan umat untuk menentukan siapa yang cocok sebagai khalifah (pemimpin) pengganti Rasulullah SAW. Mulailah masing-masing kelompok masyarakat menunjukkan jati diri untuk menjadi pemimpin umat Islam sesudah Rasulullah SAW wafat.

Penunjukan Abu Bakar Ash-Shiddik sebagai khalifah (pemimpin umat) pertama pengganti Rasulullah SAW dalam mengelola roda pemerintahan Islam terjadi ketika ada sebahagian masyarakat yang memperdebatkan soal pengganti Rasul pada satu pertemuan di Saqifah Bani Saidah, yakni semacam aula tempat pertemuan. Masyarakat kaum Muhajirin menghendaki salah seorang dari pihak mereka yang menjadi khalifah. Hal ini disebabkan dari kalangan mereka Rasulullah SAW berasal kalau dilihat asal usul tempat tinggalnya.

Sementara itu kaum Anshor menghendaki salah seorang dari pihak mereka sebagai pengganti Rasul, karena mereka beranggapan telah banyak berjasa dalam menolong Rasul dan kaum Muhajirin sewaktu hijrah ke kota Madinah. Kemudian Bani Hasyim menuntut pula agar salah seorang dari pihak mereka yang menggantikan Rasul sebagai khalifah, karena beranggapan Rasul berasal dari keluarga Bani Hasyim, apabila dilihat dari garis keturunan.

Dalam perdebatan sengit pemilihan khalifah, menurut Amir Hasan Siddiqi, “kaum Anshor Madinah menyarankan untuk mengangkat dua orang Imam, yakni seorang dari pihak mereka dan lainnya dari pihak Quraisy. Abu Bakar menolak secara tegas untuk membenarkan usul mereka itu”.<sup>53</sup> Akhirnya, terpilihlah Abu Bakar Ash-Shiddiqi sebagai Khalifah pertama pengganti Rasul dengan beberapa pertimbangan, antara lain “Dia itu seorang Muslim suku Quraisy, sahabat Nabi yang setia dan tertua, dan yang mendapat hak istimewa mengimami shalat-shalat jama’ah selama akhir hayatnya Nabi”.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Syed Mamudunnasir, *Islam its Concepts and History*, Terj. Adang Affandi, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988), h. 158.

<sup>53</sup> Amir Hasan Siddiqi, *Studies In Islamic History* (Edisi Indonesia), Alih Bahasa: H.M.J. Irwan, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), h. 126.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Dalam konteks ini, penyelesaian masalah politik untuk menetapkan kepala pemerintahan Islam pengganti Rasulullah SAW dilakukan melalui jalan musyawarah dengan berkumpulnya beberapa kelompok elemen masyarakat Islam. Sehingga melalui proses musyawarah ini memudahkan terselesaikannya pemilihan kepala pemerintahan. Walaupun ada sebahagian masyarakat yang merasa kurang senang atas terpilihnya Abu Bakar Ash-Shiddiq ra sebagai khalifah. Namun semua kepentingan telah terakomodir dan tersahuti aspirasi yang berkembang.

Apabila keputusan yang diambil umat Islam mengangkat Abu Bakar Ash-Shiddiq ra sebagai khalifah di analisa secara mendalam menunjukkan bahwa azas musyawarah merupakan salah satu keputusan penting dalam mengakomodir semua kepentingan golongan. Dan cara ini dapat dianggap sebagai cara yang patut dicontoh untuk diterapkan dalam tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa. Di samping ongkos operasionalnya tidak terlalu besar, dibanding apabila dilakukan dengan jalan pemilihan umum misalnya.

Setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq ra memimpin pemerintahan Islam selama ± 2 tahun, lalu dialihkan kepemimpinan pemerintahan umat Islam kepada Umar bin Khattab ra melalui sebuah organisasi semacam DPR. Hal ini sebagaimana dinyatakan Amir Hasan Siddiqi bahwa “Pencalonan dan pemilihan khalifah ditetapkan lewat musyawarah dengan anggota Dewan Pertimbangan Khalifah dan diumumkan sewaktu khalifah masih hidup dan disetujui oleh ummat”.<sup>55</sup>

Organisasi Dewan Pertimbangan Khalifah terdiri dari beberapa orang mewakili masyarakat Islam dari berbagai golongan. Orang-orang yang dipilih ini merumuskan dan memusyawarahkan siapa yang layak untuk memimpin pemerintahan Islam pengganti Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. Setelah melakukan musyawarah beberapa waktu, maka organisasi ini menetapkan untuk memilih dan mengangkat Umar bin Khattab ra sebagai Khalifah kedua pengganti Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.

Alasan dipilihnya Umar bin Khattab ra sebagai pengganti Abu Bakar ra karena pertimbangan tunggal, yakni “Beliaulah yang terbaik di antara sahabat

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, h. 127.

utama Nabi".<sup>56</sup> Dalam konteks ini, proses pemilihan khalifah kedua telah mengalami kemajuan, yakni telah terbentuknya satu lembaga pemilihan yang dinamakan Dewan Pertimbangan Khalifah. Di samping tidak adanya perselisihan tajam di kalangan umat atas terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah.

Selanjutnya, ketika umat Islam memilih khalifah yang ketiga, yakni Utsman bin Affan ra, juga dilakukan lewat musyawarah. Melalui Dewan Pertimbangan Khalifah, yang terdiri dari 6 orang sahabat Nabi terpenting dan ternama, yang telah diangkat oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq ra sewaktu memilih dan menetapkan Umar bin Khattab. Mereka disuruh oleh Khalifah Umar ra untuk memilih seorang khalifah dari kalangan mereka sendiri pengganti dirinya, dan mengeluarkan Abdullah, putra khalifah Umar ra untuk ikut dalam pemilihan tersebut. Demikian yang dikatakan oleh Amir Hasan Siddiqi.<sup>57</sup>

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam proses politik (pemilihan pemimpin umat), Umar ra meletakkan dasar-dasar pemilihan khalifah yang bersifat non KKN, tetapi atas dasar musyawarah dan mufakat. Ini terbukti tidak diperkenankannya Abdullah ikut pada pemilihan khalifah, padahal ia adalah putra dari penguasa yang memimpin negeri Islam.

Pertimbangan Umar ra mengeluarkan Abdullah dari kursi pencalonan khalifah dalam perspektif penulis adalah adanya kekhawatiran akan terjadi penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh anaknya karena kekuasaan yang diserahkan oleh orang tua. Atau ketidak mampuan anaknya untuk berlaku adil sebagaimana dilakukan oleh Umar ra tanpa pandang bulu. Sikap Umar ra sudah dikenal, yakni bersikap tegas dan keras. Siapa saja sama dimata hukum, yang benar dibela, dan yang salah dihukum, walaupun itu berasal dari kalangan keluarga sendiri.

Menjelang pemilihan Ali bin Abi Thalib ra sebagai khalifah ke empat, terjadi kegoncangan politik, ketika khalifah Utsman bin Affan ra mati dibunuh disebabkan pertikaian politik, yakni adanya ketidak puasan atas kepemimpinan

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>*Ibid.*, h. 12.

Khalifah Utsman ra. Ada tuduhan-tuduhan negatif ditujukan kepada Khalifah Utsman, antara lain:

Utsman telah berlaku tidak adil dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Menurut pengunjuk rasa Utsman telah mengangkat pejabat Negara dari kalangan keluarganya sendiri. Sementara itu para sahabat lain, terutama dari golongan Bani Hasyim tidak mendapat peran apa-apa dalam pemerintahan. Para pengunjuk rasa juga menuduh Utsman telah melakukan berbagai penyimpangan (KKN), diantaranya adalah tuduhan penggelapan uang kas Negara (Baitul Maal) untuk keluarganya.<sup>58</sup>

Kematian Khalifah Utsman mempercepat proses pemilihan khalifah (pemimpin umat) yang ke empat. Pada proses pemilihan Ali bin Abi Thalib ra sebagai khalifah ke empat dilakukan dengan jalan musyawarah oleh masyarakat Madinah. Menurut Amir Hasan Shiddiqi, pertimbangan masyarakat Madinah memilih Ali ra sebagai khalifah karena “Dialah satu-satunya yang masih hidup daripada para sahabat utama Nabi dan pemilihannya sudah diperkirakan sebelumnya”.<sup>59</sup>

Proses ini sebenarnya ditolak oleh Ali bin Abi Thalib, karena Ali menghendaki proses pemilihan sama dengan para khalifah sebelumnya melalui musyawarah di Dewan Pertimbangan Khalifah. Dengan tujuan agar memperoleh kekuatan hukum yang legitimate dari umat, karena khawatir ada yang tidak setuju dengan kekhalifahannya kelak di masa yang akan datang. Namun masyarakat Madinah yang terdiri dari kaum Anshor dan Muhajirin sudah menetapkan pilihan, dan Khalifah Ali ra tidak bisa menolaknya.

Ternyata apa yang menjadi kekhawatiran Khalifah Ali ra menjadi kenyataan, karena ada sebahagian umat Islam yang menyatakan menolak pengangkatan Ali ra sebagai khalifah yang ke empat. Akibatnya, terjadi pemberontakan di sana sini yang mengakibatkan goyahnya kepemimpinan khalifah Islam.

Sejak proses politik pemilihan khalifah pertama sampai ke empat dilakukan umat Islam ada intisari (hikmah) pelajaran yang dapat diambil, antara lain:

---

<sup>58</sup>Katimin, *Politik*, h. 118.

<sup>59</sup>Siddiqi, *Studies*, h. 127.

*Pertama*, unsur pemilihan itu adalah penting hubungannya dengan pengangkatan Imam suatu Negara Islam. *Kedua*, prinsip mawaris perwalian dicabut akarnya oleh Umar, yang dengan terang-terangan mengeluarkan putranya sendiri yang memiliki kemampuan untuk menyamainya, ikut serta dalam pemilihan. *Ketiga*, hanya dari antara Muslim yang cakap, memiliki watak tanpa cela dan menghayati akan cita Islam, seseorang dapat dipilih untuk jabatan yang luhur itu.<sup>60</sup>

Dengan demikian, para sahabat Utama Nabi, khususnya ke empat khalifah, telah meletakkan dasar-dasar politik yang elegan, dengan menghargai dan memberikan pilihan terbaik atas dasar kemampuan untuk ditetapkan sebagai pemimpin politik umat Islam di masa pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Bukan didasarkan pertimbangan kedekatan kekeluargaan, atau embel-embel kekayaan dan hegemoni kekuasaan semata. Inilah yang menjadi idealitas politik yang patut dicermati dan dipertimbangkan, dan bilamana mungkin dapat diterapkan dalam konteks kehidupan politik dewasa ini.

Setelah masa Khulafaur Rasyidin memimpin dengan proses demokrasi yang diciptakan secara elegan dan berakar pada kepentingan umat Islam di kala itu, masuklah era pemerintahan dengan gaya monarki kekuasaan. Yakni kepala pemerintahan dipilih dan diganti karena didasarkan atas hubungan kekeluargaan. Hal ini di mulai pada masa Dinasti Umayyah, dan dilanjutkan pada masa Dinasti Abbasyiah. Serta berlanjut sampai dewasa ini di sebahagian Negara Arab maupun dunia dengan sistem kerajaan.

Pada periode-periode ini urusan politik dan agama menjadi terpisahkan sejak berdirinya Dinasti Umayyah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Khaldun seperti dikutip oleh Dale F. Eickelman dan Jamnes Piscatori bahwa “Suatu perpecahan antara pemerintahan yang agamis dan yang politis dimulai ketika dinasti Umayyah memegang kekuasaan pada 661”.<sup>61</sup> Kemudian dilanjutkan pula oleh pemerintahan Bani Abbasyiah, serta kerajaan-kerajaan Islam lain-lainnya.

Proses perubahan tersebut bermula dari pertikaian politik sejak Ali bin Abi Thalib memimpin. Adalah Thalhah dan Zubeir memulai pertikaian tersebut yang

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, h. 61.

mendapat dukungan dari Aisyah ra, istri Rasul pada Perang Jamal di Irak pada tahun 656 M. Kemudian dilanjutkan dengan ketegangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib ra dan Mu'awwiyah, yakni ketika Mu'awwiyah dengan tegas menolak kepemimpinan Ali ra. Padahal Mu'awwiyah adalah Gubernur Damaskus yang tunduk di bawah kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. Ketegangan ini berakhir dengan digelarnya Perang Shiffin yang dilanjutkan dengan peristiwa Tahkim (Arbitrase).

Tahkim, atau Arbitrase atau *Arbitration* dalam bahasa Inggris berarti “Perwasitan, perundingan, atau perdamaian”.<sup>62</sup> Dalam pengertian luas dimaknai sebagai “Suatu kegiatan yang melibatkan sejumlah orang yang saling berselisih paham antara satu dan lainnya untuk mencari pemecahan yang menguntungkan semua pihak”.<sup>63</sup> Namun kenyataan tidak sama dengan maksud dan makna Tahkim atau arbitrase itu sendiri.

Dalam hal ini terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian di pihak Ali ra, yakni jatuhnya Ali ra dari kekuasaan kekhalifahan, yang kemudian digantikan oleh Mu'awwiyah. Dan seterusnya secara turun temurun, kekuasaan kenegaraan silih berganti berdasarkan kekerabatan atau kekeluargaan, sampai kejatuhan Daulah Bani Umayyah dan digantikan oleh Daulah Bani Abbasiyah. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah juga tidak berbeda dengan Daulah Bani Umayyah yang mengedepankan kekeluargaan dan kekerabatan dalam memimpin negara. Sampai kerajaan Islam terakhir juga melakukan hal yang sama.

Walaupun di masa kekuasaan kedua dinasti ini ada kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh para pemimpinnya terhadap kemajuan umat Islam. Kemudian, ada pemimpinnya yang bertindak tegas dan bijaksana seperti yang diperlihatkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz di masa kepemimpinan Dinasti Umayyah. Ada pula pemimpinnya yang membawa kemakmuran dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti yang diperlihatkan oleh Khalifah Al-Makmun dan Khalifah Harun Al-Rasyid. Akan tetapi kekuasaan politik yang didasarkan kepada azas kekeluargaan tetap bukan solusi terbaik bagi kemajuan suatu bangsa atau negara.

---

<sup>62</sup>Nata., *Peta*, h. 222.

<sup>63</sup>*Ibid.*

Peristiwa-peristiwa di atas merupakan cikal bakal pembentukan partai politik dalam dunia Islam, sejak kematian Rasulullah SAW. Dalam hal ini berbarengan juga dengan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang berbau teologi. Dengan demikian munculnya pemahaman teologi Islam berhubungan erat dengan persoalan politik yang melanda umat Islam. Begitu pula sebaliknya, yakni lahirnya partai politik Islam tidak bisa melepaskan diri dari persoalan agama atau teologi yang berkembang di dunia Islam.

Oleh karenanya, antara politik dan ideologi merupakan dua hal yang penting dalam tatanan kehidupan bernegara di dalam komunitas umat Islam sejak zaman Rasul sampai saat sekarang ini. Pernyataan berikut memberikan gambaran bahwa:

Perbedaan politik atau mazhab-mazhab politik pada awalnya memang bersifat dan bertendensi politis. Akan tetapi, watak politik dalam Islam berhubungan erat dengan agama, bahkan itulah pokok dan intinya. Karena itu, prinsip dasar mazhab-mazhab politik yang ada berkisar pada agama, kadang-kadang dekat dan kadang-kadang jauh darinya karena mengandung penyimpangan dari sendi dasar agama.<sup>64</sup>

Dengan demikian ada simbiosis atau hubungan antara peletakan dasar ketatanegaraan atau politik dengan aqidah atau teologi umat Islam setelah kepergian Rasulullah SAW. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika yang berkembang, baik ke arah positif maupun negatif. Menurut hemat penulis, arah positif dimaksudkan umat Islam mengalami pengayaan intelektual, karena adanya perdebatan atau diskusi yang berkepanjangan mengenai kepemimpinan maupun mengenai masalah-masalah seputar agama.

Sedangkan arah negatif adalah umat Islam mengalami pertikaian sesama umat, fitnah menyebar, bahkan sampai mengalami pembunuhan. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh umat Islam pada masa itu. Tetapi realita yang ada menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa tersebut, yang tidak bisa dilupakan atau diabaikan begitu saja.

---

<sup>64</sup>Imam Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, Terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam* (Jakarta: Logos Publishing House, Cet. I, 1996), h. 33.

Imam Muhammad Abu Zahrah<sup>65</sup>, membagi partai-partai politik dalam Islam kepada dua golongan besar, yakni golongan (kaum) Syi'ah dan golongan Khawarij. Sementara golongan lain dikelompokkan pada aliran aqidah (tauhid) atau teologi. Namun, bila dicermati secara umum, semua kelompok-kelompok teologi keislaman yang muncul di dunia Islam pertamanya berproses pada pemikiran politik, baru mengarah kepada persoalan teologi.

Adapun tokoh-tokoh pemikir politik dalam Islam adalah para pendiri kelompok atau golongan yang muncul sejak dimulainya perselisihan mengenai khalifah pengganti Rasulullah SAW, diantaranya ; Urwah bin Hudair, Najdah bin Uwaimir dan kawan-kawan dari kelompok Syi'ah, Jahm bin Safwan, Ash-Shalhiyah, Al-Yunusiyah dan kawan-kawan dari golongan Murji'ah,

Kemudian, pada masa perkembangan Islam di abad pertengahan muncul para pemikir-pemikir Islam di bidang politik seperti Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Khaldun yang banyak menyerap ilmu dari berbagai literatur Barat, terutama Yunani Kuno akibat adanya penerjemahan buku-buku dari karangan Aristoteles, Socrates, dan Plato dan lain-lain.

Kemudian, bila merujuk kepada para pemikir politik Islam abad 19 dan 20 muncul orang-orang seperti Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, dan lain-lain. Khususnya di Indonesia, muncul para pemikir politik Islam di abad 20 seperti Mohammad Natsir, Agus Salim, Ali Sastro Amijoyo, HOS. Cokro Aminoto dan lain-lain.

Apabila dilihat dari sejarah perjalanan pemikiran dan praktek politik Islam sejak awal hingga saat sekarang ini, maka ada beberapa implikasi yang dapat dirasakan umat Islam di dunia, antara lain:

1. Ada kecenderungan umat Islam akan memainkan praktek politik dinamis, santun, bersahaja dan elegan sebagaimana diterapkan oleh para khulafaur Rasyidin, yang menempatkan azas musyawarah, penerimaan kepemimpinan orang lain, dan ketaatan terhadap kepemimpinannya yang dilandasi semangat ajaran Islam yang tertuang dalam Alquran dan Sunnah Nabi SAW.

---

<sup>65</sup>*Ibid*, h. vi-vii.

2. Ada kecenderungan umat Islam akan memainkan praktek politik fundamentalis atau bersikap radikal, atau berhaluan kiri atau kanan, yang lebih menekankan pada pergerakan atau opensif (penyerangan) terhadap lawan-lawan politiknya, sebagaimana ditunjukkan oleh kelompok khawarij dan kelompok-kelompok sempalan lainnya, sebagaimana sekarang ini ada muncul gerakan-gerakan radikalisme dan fundamentalis, dan lebih jauh lagi mengarah kepada terorisme.
3. Ada kecenderungan umat Islam akan memainkan praktek politik apatis atau bersikap acuh tak acuh terhadap kehidupan politik di Negara tempat tinggalnya, sehingga apa pun yang terjadi tidak mempengaruhi dirinya, karena dirinya lebih mementingkan sikap dan pergerakan politik intern, untuk membina diri dan jama'ahnya semata. Hal ini sebagaimana disikapi oleh kelompok murji'ah dalam mencermati perdebatan-perdebatan politik dan ideologi pada waktu awal kemunculannya.
4. Ada kecenderungan umat Islam akan memainkan praktek politik adu domba dan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Kecenderungan ini akan membahayakan diri umat Islam lainnya, karena akan timbul kerusakan mendalam terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi ini menurut hemat penulis seperti yang dilakukan oleh Muawwiyah bin Abi Sofyan dalam mengambil alih kekuasaan dari tangan khalifah Ali bin Abi Thalib ra.

Kecenderungan-kecenderungan umat Islam seperti ini harus disikapi secara cermat oleh penguasa Islam atau negara yang menegakkan syari'at Islam untuk memilih dan memilah serta meminimalisir kecenderungan negatif, dan mengembangkan pemikiran dan praktek politik Islam yang cenderung positif, sehingga membawa kemaslahatan bagi umat Islam itu sendiri. Kalau para penguasa negeri tidak mampu memerankan tugas tersebut, maka umat Islam sendiri yang harus mampu meminimalisir kecenderungan negatif yang muncul, dan memperlihatkan kecenderungan positif dengan memainkan peran politik yang elegan, santun dan bersahaja yang dapat di terima semua lapisan atau golongan.

Berkeenaan dengan kehadiran partai politik, khususnya Islam di Indonesia bermula dari perlawanan umat Islam terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kolonial Belanda maupun Jepang yang merugikan umat Islam, khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Kehadiran penjajahan di Indonesia, tentu membawa dampak atau pengaruh cukup besar. Mulai dampak ekonomi, sosial, budaya, agama, psikologi, pendidikan, maupun politik.

Bangsa Indonesia tidak mengalami kemajuan selama dijajah oleh bangsa Belanda maupun Jepang, terutama dalam bidang politik. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para penjajah di bidang politik sering merugikan bangsa Indonesia. Pendidikan politik bagi warga Negara Indonesia menempati posisi terakhir. Apalagi bagi golongan rakyat biasa, tidak mendapat tempat sama sekali.

Belanda sejak kedatangannya secara politik sudah menguasai Indonesia, setelah Belanda dapat mengatasi perlawanan atau pemberontakan-pemberontakan dari tokoh-tokoh politik dan agama di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua kekuatan politik, ekonomi, maupun sosial budaya berada di tangan penjajah Belanda. Termasuk mengatur kehidupan beragama yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang dipegang Belanda sebagai kaum imperialis dan kolonialisme, yaitu kebarat-baratan (Westernisasi) dan misi Kristenisasi.

Politik yang dijalankan oleh pemerintahan penjajahan Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam pada intinya adalah didasarkan oleh perasaan takut terhadap perkembangan agama Islam di Indonesia, dan didasarkan pada panggilan agamanya, yakni agama Kristen untuk menyaingi perkembangan kemajuan agama Islam. Kemudian di dukung oleh upaya kolonialisme yang dilakukan di Indonesia. Sehingga dengan hal-hal tersebut penjajahan Belanda menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan.

Perlu difahami bahwa di akhir abad ke XIX dan menjelang awal abad ke XX, pergerakan melawan penjajahan berubah dari sifat kedaerahan menjadi Nasional. Hal ini disebabkan semakin banyaknya kaum terpelajar di Nusantara ini. Khususnya terhadap umat Islam, adanya gerakan membumi hanguskan umat Islam dilakukan oleh penjajah Belanda.

Adalah Snouck Hurgronje mengemukakan suatu gagasan, yaitu “Politik Islam”. Maksudnya “Kebijaksanaan mengenai masalah Islam di Indonesia. Dengan politik itu ia membagi masalah Islam dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Bidang agama murni dan ibadah.
- b. Bidang sosial kemasyarakatan, dan
- c. Politik.<sup>66</sup>

Penjelasan dari gagasan politik Islam ini bahwa pemerintah penjajah Belanda memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintahan Belanda. Kemudian, di bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah penjajah Belanda memanfaatkan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat. Tujuannya membatasi berlakunya hukum Islam, dengan teori “Reseptie”. Maksudnya “Hukum Islam baru bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan adat kebiasaan. Oleh karena itu terjadi kemandekan hukum Islam”.<sup>67</sup>

Kemudian di bidang politik, pemerintah penjajah Belanda melarang keras orang Islam membahas hukum Islam baik dari Alquran maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan atau ketatanegaraan.

Selain itu, ada peraturan dan kebijakan yang diambil seperti tahun 1882 M, pemerintahan penjajahan Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut *Priesterraden*. Atas nasehat lembaga ini, maka pada tahun 1905 M pemerintah penjajahan Belanda mengeluarkan peraturan yang disebut “Ordonansi Guru” yang mengatur tentang kewajiban para guru Islam untuk meminta izin sebelum mereka mengajar”. Ordonansi ini timbul setelah terjadi peristiwa Cilegon pada 1888, yaitu suatu pemberontakan para petani yang menurut mereka dimotori oleh para haji dan guru-guru agama”.<sup>68</sup>

Adanya kebijakan atau peraturan dikeluarkan dengan maksud dan tujuan untuk menghambat dan menghalangi penyebaran agama dan pendidikan Islam di

---

<sup>66</sup>Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, h. 298.

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, Cetakan Ketiga, 1990), h. 52.

Indonesia, karena penjajahan Belanda mempunyai misi ingin menguasai atau menjajah Indonesia. Di samping adanya ketakutan penjajahan Belanda akan kebangkitan rakyat pribumi Indonesia, karena terjadinya peperangan antara Jepang melawan Rusia yang dimenangkan oleh Jepang.

Kemudian pada tahun 1925 M pemerintahan penjajahan Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap kehidupan beragama umat Islam, dengan membatasi pergerakan para kiai dalam mengajarkan agama Islam, seperti penjelasan berikut “Tidak semua orang (kiai) boleh memberikan pelajaran mengaji terkecuali telah mendapat semacam rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda”.<sup>69</sup> Peraturan ini dikeluarkan didasarkan pada kemungkinan adanya gerakan organisasi keagamaan Islam yang sudah tampak mulai tumbuh yang dibentuk oleh para Ulama dan tokoh-tokoh pendidikan, seperti Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam, Al-Irsyad, Nahdatul Watan, dan lain-lain.

Upaya pengetatan kehidupan beragama umat Islam dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda setelah munculnya gerakan Nasionalisme-Islamisme pada tahun 1928 M, yakni Kongres Nasional Pertama Pemuda Indonesia dengan mengikrarkan “Sumpah Pemuda” pada tanggal 28 Oktober 1928 M. Dengan kongres ini semakin menasional gerakan melawan penjajah.

Dalam kesempatan ini pula umat Islam ikut andil, dengan munculnya perkumpulan-perkumpulan politik baru dan muncul para pemikir politik yang sadar diri. Perkumpulan politik umat Islam pada waktu itu diwakili oleh Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Jamiat Khair (Al-Jam’iyat al-Khairiyat), yang mayoritas anggotanya orang-orang Arab, berdiri 1905, Persyarikatan Ulama pada 1911, Persatuan Islam pada 1920 dan Partai Arab-Indonesia yang berdiri pada 1934”.<sup>70</sup> Selain itu, keberadaan agama Kristen dan pemeluknya yang selalu menghadapi reaksi dari rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, membuat pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan tersebut.

---

<sup>69</sup>Hasballah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 52.

<sup>70</sup>Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), h. 95.

Kemudian dikeluarkan pula sebuah peraturan yang disebut Peraturan netral agama, yang dimaksudkan untuk menjaga dan menghalangi masuknya pelajaran agama di sekolah umum yang kebanyakan muridnya beragama Islam. Isinya adalah “Bahwa pemerintah bersikap tidak memihak kepada salah satu agama sehingga sekolah pemerintah tidak mengajarkan agama. Dan pemerintah melindungi tempat peribadatan agama (Indische Staat Regeling pasal 173-174)”.<sup>71</sup>

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang semakin kuat keinginannya untuk memberangus keberadaan organisasi keagamaan dan para pemimpinnya. Mereka terus menerus mempelajari sifat dan perilaku umat Islam, mencari titik kelemahan dari umat Islam dan penduduk pribumi Indonesia. Hal ini dilakukan secara mendalam dan ilmiah di negerinya dan menjadi ilmu khusus yang dikenal dengan ilmu “Indologi”.<sup>72</sup>

Salah satu ilmuwan yang menjadi motor penggeraknya adalah Prof. Snouck Hurgronje, dengan nama samaran Abdul Gaffar, seorang sarjana sastra Semit (Arab) yang lama belajar dan berpengalaman di tanah Arab, kemudian memiliki peran besar dalam menyelesaikan perang antara Belanda dengan rakyat Aceh, yang membuat Aceh pada akhirnya bertekuk lutut di bawah kekuasaan Belanda. Ia memberikan saran-saran dan masukan tentang cara-cara yang harus ditempuh dalam menghadapi umat Islam di Indonesia agar tujuan penjajahan dapat terus berlangsung sebagaimana yang mereka harapkan.

Saran dan masukan yang diberikannya di terima oleh pemerintahan kolonial Belanda dan menjadi kebijakan pemerintahan Hindia Belanda terhadap umat Islam di Indonesia. Adapun inti dari saran-saran yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje adalah:

1. Menyarankan kepada pemerintah Hindia Belanda agar netral terhadap agama, yakni tidak campur tangan dan tidak memihak kepada salah satu agama yang ada (tapi tampaknya hal ini hanya bersifat teori belaka, sebab faktanya tidaklah demikian. Menurut Snouck, fanatisme Islam itu akan luntur sedikit demi sedikit melalui proses pendidikan secara evolusi.

---

<sup>71</sup>Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 150.

<sup>72</sup>Suminto, *Politik Islam*, h. 2.

2. Pemerintah Belanda diharapkan dapat membendung masuknya Pan Islamisme yang sedang berkembang di Timur Tengah, dengan jalan menghalangi masuknya buku-buku atau brosur lain dari luar ke wilayah Indonesia, mengawasi kontak langsung dan tidak langsung tokoh-tokoh Islam Indonesia dengan tokoh luar, serta membatasi dan mengawasi orang-orang yang pergi ke Mekkah, dan bahkan kalau memungkinkan melarangnya sama sekali. Karena dikhawatirkan pengalaman yang ia dapatkan di luar akan dibawa pulang ke Indonesia dan mempengaruhi kelanggengan kekuasaan kolonial.<sup>73</sup>

Apabila dicermati secara baik menunjukkan bahwa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan kolonial Belanda demikian ketat dan keras. Hal ini dilakukan dalam bentuk pengawasan, tekanan dan pemberantasan aktivitas organisasi keagamaan dan kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Seolah-olah dalam tempo yang tak terlalu lama lagi organisasi keagamaan dan kehidupan beragama umat Islam akan menjadi lumpuh atau habis sama sekali di Indonesia.

Namun ternyata hal itu tidak menjadi kenyataan, organisasi keagamaan semakin tumbuh dan berkembang dimana-mana. Perlawanan semakin ditunjukkan oleh para pemimpin umat (Ulama) dan tokoh-tokoh penting lainnya, termasuk tokoh-tokoh pendidikan Islam. Hal ini sejalan dengan pernyataan Roeslan Abdulgani bahwa tekanan yang dilakukan oleh penjajahan Belanda “Justru dapat menumbuhkan jiwa patriotisme sebagai bagian dari iman (hubbul wathan min al-iman), yang berorientasi ke arah persatuan seluruh kepulauan Nusantara, dan ternyata kelak merupakan salah satu landasan yang kokoh bagi bangkitnya nasionalisme Indonesia pada permulaan abad XX”.<sup>74</sup>

Kemudian, para pemimpin Islam, yakni Kiai dan Ulama bersikap non kooperatif terhadap Belanda, menjauhkan diri dari tempat yang dekat dengan Belanda. Kemudian para Ulama dan Kiai mengeluarkan fatwa mengharamkan kebudayaan yang dibawa oleh Belanda dengan berpegang pada ajaran agama Islam, yakni Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW.

---

<sup>73</sup> E. Gobe, C. Andriaanse, *Nasehat-Nasehat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda* (Jakarta: Seri Khusus INIS VIII, 1993).

<sup>74</sup>Roeslan Abdulgani, *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Antar Kota, 1983), h. 33.

## **C. Perkembangan Politik Islam Indonesia Abad ke 20**

### **1. Tahun 1900 sampai 1945.**

Dugaan Belanda bahwa umat Islam di Indonesia tidak akan terpengaruh oleh gerakan Pan Islamisme di Timur Tengah ternyata keliru. Banyak tokoh-tokoh agama Islam di Indonesia yang mendapatkan brosur-brosur dan majalah-majalah terlarang dari Timur Tengah dan Negara-negara Islam yang lain. Sehingga kondisi ini tidak mengurangi niat umat Islam dan pemimpinnya untuk terus berjuang mengusir penjajahan Belanda dan mengembangkan organisasi keagamaan sebagai cikal bakal partai politik Islam yang lebih modern.

Di samping itu, para Ulama berupaya secara keras untuk membentengi umat Islam dari proses pendidikan Westernisasi dan Kristenisasi. Kemudian adanya ide pembaharuan yang diperoleh para Ulama dan tokoh-tokoh organisasi keagamaan Islam dari Timur Tengah ketika melaksanakan ibadah haji dan menjalani pendidikan di Mekkah, menjadi pemikiran untuk merubah pola kehidupan beragama dan berpolitik yang dianggap tradisional ke arah yang lebih modern.

Ini baru disadari pada awal abad ke 20 M atau sekitar tahun 1900-an. Pengaruh pemikiran modern umat Islam berkembang dari pendidikan yang diperoleh selama belajar di Timur Tengah. Abad ke 20 M ini dianggap sebagai abad peralihan pemikiran dan perjuangan umat Islam di Indonesia yang pelopor pergerakannya berpusat di Mekkah, yakni dilakukan oleh Syekh Khatib Minangkabau.

Ini sejalan dengan pernyataan berikut “Periode peralihan ini boleh dikatakan dipelopori oleh Syekh Khatib Minangkabau dan kawan-kawan yang begitu banyak mendidik dan mengajar pemuda di Mekkah, terutama pemuda-pemuda yang berasal dari Indonesia dan Malaya. Murid-murid beliau seperti H. Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka) yang mengajar di Surau Jembatan Besi Padang Panjang, KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) di Yogyakarta dan KH. Adnan di Solo”.<sup>75</sup> Termasuk dalam hal ini adalah KH. Hasyim Asy’ari yang mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng dan Nahdhatul Ulama (NU).

---

<sup>75</sup>Sidi Ibrahim Boechari, *Pengaruh Timbal Balik Antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau* (Jakarta: Gunung Tiga, 1981), h. 79.

Ide pembaharuan pemikiran dan pola berpolitik umat Islam Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ide pembaharuan yang dikembangkan oleh pemikiran Muhammad Abdul Wahab di Saudi Arabia dengan gerakan Wahabi yang dipelajari para murid-murid yang berasal dari Indonesia. Jauh sebelum Syekh Khatib Minangkabau menginternalisasikan ide-ide pembaharuan pemikiran Islam kepada murid-muridnya di Indonesia, telah beraktivitas terlebih dahulu Haji Abdurrahman Piobang, Haji Miskin dan Haji Muhammad Arif Sumanik, para alumnus Mekkah yang kembali ke Sumatera pada tahun 1802.<sup>76</sup>

Mereka bermaksud mengikuti ide dan gagasan Muhammad Abdul Wahab untuk mengembalikan ajaran Islam yang diamalkan oleh masyarakat Indonesia kepada sumber asasnya, yakni Alquran dan Hadis, karena sebahagian masyarakat Indonesia dianggap sudah menyimpang dari kedua ajaran tersebut. Di samping membangkitkan semangat perjuangan untuk melawan penjajahan Belanda yang telah lama bercokol di Indonesia.

Selain itu, Syekh Thaher Jalaluddin seorang pembaharu dari Mesir memasukkan ide pembaharuan Muhammad Abduh ke Indonesia pada melalui majalah al-Imam yang diterbitkan di Singapura sekitar tahun 1906 M<sup>77</sup> ikut memainkan peran dalam melakukan pembaharuan terhadap ajaran agama Islam dan pencerahan umat Islam di Indonesia pada awal abad ke 20 M.

Majalah al-Imam ini memuat artikel tentang pengetahuan populer, komentar tentang kejadian-kejadian penting di dunia, terutama di dunia Islam dan juga mengenai masalah-masalah agama. Dalam hal ini penulis makalah atau jurnal-jurnal pada waktu itu sering kali mengutip pendapat Muhammad Abduh di Mesir. Majalah al-Imam tersebar di kawasan Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Majalan inilah yang banyak mengilhami H. Abdullah Ahmad untuk menerbitkan Majalah al-Munir di Padang tahun 1911.<sup>78</sup>

Berdasarkan pemikiran di atas dapat difahami bahwa tumbuhnya kesadaran untuk melakukan perubahan pada kehidupan, pemikiran, pendidikan, dan cara

---

<sup>76</sup>Hasballah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 58.

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, h. 41.

berpolitik rakyat Indonesia, khususnya umat Islam didasarkan pada beberapa hal, yakni “Hasil perubahan-perubahan sosial dan ekonomi, dampak dari pendidikan Barat”.<sup>79</sup> Kemudian menurut Ajib Thohir yang mengutip pendapat G.W.J. Drewes hal ini juga disebabkan adanya “Gagasan aliran pembaharuan Islam dari Mesir”.<sup>80</sup>

Selain adanya ide-ide pembaharuan pemikiran yang mempengaruhi pola berpikir para pemimpin umat, juga tak kalah pentingnya adalah tumbuhnya kesadaran nasionalisme dan patriotisme di kalangan pemimpin dan rakyat Indonesia. Orang-orang Islam yang berpendidikan Barat tidak kehilangan identitasnya sebagai seorang muslim dan sebagai orang Indonesia. Ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Barat tidak mengubah keyakinan agama dan rasa nasionalismenya. Justru semakin menebalkan keyakinan mereka akan perjuangan menegakkan kalimat Tauhid dan jiwa patriot.

Hal ini mendorong mereka membentuk organisasi-organisasi bercirikan nasionalisme dan keagamaan (Islam), untuk melawan tekanan politik yang dilakukan oleh Belanda, baik secara ekonomi, politik maupun pendidikan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah membentuk lembaga yang disebut “Perguruan-perguruan Nasional, yang ditopang oleh usaha-usaha swasta (partikelir menurut istilah pada waktu itu yang berkembang pesat sejak awal tahun 1900-an”.<sup>81</sup>

Para pemimpin pergerakan Nasional dan Islam dengan kesadaran penuh ingin mengubah keterbelakangan bangsa Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Mereka insyaf bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional harus segera dimasukkan ke dalam agenda perjuangannya. Maka lahirlah sekolah-sekolah partikelir (swasta) atas usaha para perintis kemerdekaan, yakni:

- a. Sesuai dengan haluan politik, seperti:
  - 1) Taman Siswa, yang mula-mula didirikan di Yogyakarta.
  - 2) Sekolah Sarikat Rakyat di Semarang, yang berhaluan komunis.
  - 3) Ksatrian Institut, yang didirikan oleh Dr. Douwes Dekker (Dr. Setia Budi) di Bandung.
  - 4) Perguruan Rakyat, di Jakarta dan Bandung.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup>Zaini Muchtrom, *Santri dan Abangan di Jawa* (Jakarta: INIS, 1988), h. 16.

<sup>80</sup>Ajib Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, h. 298.

<sup>81</sup>Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 158.

<sup>82</sup>Djumhur, H. Danusuprata, *Sejarah Pendidikan* (Bandung: Cerdas Cet. II, 1961), h. 121.

Upaya ini tentu saja mendapat tekanan dari pemerintahan penjajahan Belanda. Namun, para pemimpin Nasional tetap berjuang untuk mengembangkannya sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menanamkan kesadaran politik yang kuat kepada rakyat Indonesia untuk melepaskan belenggu dari penjajahan Belanda.

Selain itu, Hasballah menegaskan bahwa “Politik Islam dan politik pendidikan yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda yang menomorsatukan anak-anak pejabat dan pembesar dan membatasi pendidikan pribumi justru menggiring putra pribumi tersebut pergi ke pondok-pondok pesantren. Proses ini di satu pihak justru mendasari kuatnya kepercayaan beragama bagi penduduk pribumi yang beragama Islam”.<sup>83</sup>

Mencermati hal ini, Ridwan Saidi mengutip pernyataan Wertheim menegaskan bahwa “Apa pun politik terhadap Islam yang akan dilancarkan oleh kekuasaan non Islam, hasilnya senantiasa berbeda dari apa yang ingin dikejar kekuasaan tersebut”.<sup>84</sup> Justru tekanan demi tekanan yang dilakukan tidak akan menggoyahkan semangat untuk memberontak di kalangan umat Islam Indonesia, terutama melakukan perlawanan di bidang politik dan ketatata negaraan.

Setelah Belanda bertekuk lutut kepada Jepang dan mengakui kekalahannya, maka kekuasaan pemerintahan penjajahan beralih dari kolonial Belanda kepada pemerintahan penjajahan Jepang, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942.<sup>85</sup> Adanya peralihan kekuasaan pemerintahan, maka beralih pula kebijakan-kebijakan di bidang politik dan kehidupan beragama umat Islam di Indonesia.

Jepang menyatakan dirinya sebagai saudara tua bangsa Indonesia, dan akan memerdekakan bangsa ini di suatu waktu. Tetapi, janji Jepang itu tak pernah terwujud. Malah selama penjajahan Jepang, penderitaan rakyat semakin berat, karena pasukan tentara Jepang sangat sadis menyiksa, bahkan membunuh rakyat yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap pemerintahan penjajahan Jepang. Di awal penjajajahannya, Jepang masih bertindak progresif dengan tindakan

---

<sup>83</sup>Hasballah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 55.

<sup>84</sup>Ridwan Saidi, *Pemuda Islam Dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984* (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 3.

<sup>85</sup>I. Djumhur, *Sejarah Pendidikan* (Bandung: CV. Ilmu, 1979), h. 195.

militernya. Selama penjajahan Jepang, bangsa Indonesia menahankan kepedihan dan penderitaan.

Namun, pada tahun-tahun berikutnya Jepang mulai melunak terhadap rakyat Indonesia. Hal ini karena posisinya yang melemah akibat tekanan dari Sekutu. Kekalahan demi kekalahan dalam perang Pasifik menyebabkan Jepang tidak memiliki kekuatan memadai lagi. Menyikapi hal ini, Jepang merubah sikap dari progresif militer menjadi sikap defensif dan sikap lemah lembut. Hal ini untuk mengambil hati rakyat Indonesia, agar dapat membantu perjuangan Jepang dalam penjajahannya.

Khususnya kepada umat Islam, dari sisi politik, selama penjajahannya Jepang berpihak kepada kaum muslimin atau yang dinamakan nasionalis Islami, dan mengabaikan kaum nasionalis sekuler. Sikap penjajahan Jepang terhadap umat Islam adalah dengan mendekati umat Islam dan tokoh-tokohnya serta mengambil beberapa kebijakan antara lain “Pondok Pesantren yang besar-besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang. Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta”.<sup>86</sup> Hal ini tidak lain adalah dimaksudkan untuk tujuan memperkuat kekuatan Jepang memimpin perang Asia Timur Raya pada Perang Dunia II.

Ketika Perang Dunia II berkecamuk, Jepang mengalami tekanan hebat, baik dari Sekutu maupun dari rakyat Indonesia yang melakukan pemberontakan. Akibatnya dunia pendidikan menjadi terbengkalai, karena tidak dapat lagi belajar. Hal ini disebabkan murid-murid sekolah setiap hari hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti (romusha), bernyanyi dan lain-lain.

Namun lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang sedikit mengalami keuntungan, karena diberikan kesempatan untuk mendirikan dan kebebasan untuk belajar. Hal ini tidak disia-siakan oleh umat Islam, maka banyaklah berdiri madrasah-madrasah, terutama di daerah Sumatera yang terkenal

---

<sup>86</sup>Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 151.

dengan sebutan “Madrasah Awaliyahnya, yang diilhami oleh Majelis Tinggi Islam”.<sup>87</sup>

Kenyataan ini menunjukkan bahwa “Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia ada pemerintah yang memberikan tempat penting kepada golongan Islam”.<sup>88</sup> Adapun maksud keberpihakan Jepang adalah agar tujuan mereka menguasai bumi pertiwi ini dapat lebih mudah terlaksana tanpa adanya perlawanan dari rakyat.

Keberpihakan Jepang berlanjut dengan tindakan “Pemerintahan Jepang secara bertahap mengakui kembali organisasi-organisasi Islam yang sebelumnya dibekukan. Pada tanggal 10 September 1943 Muhammadiyah dan NU disahkan kembali, disusul dengan Persyarikatan Umat Islam di Majalengka pada tanggal 1 Februari 1944 dan Persatuan Umat Islam di Sukabumi”.<sup>89</sup>

Penyatuan organisasi dilakukan oleh pemerintahan penjajahan Jepang dengan membentuk organisasi baru yang bernama “Masyumi, yakni singkatan dari Majelis Syura Muslimin Indonesia menggantikan MIAI yang dibubarkan pada bulan Oktober 1943”.<sup>90</sup> Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk memperkokoh persatuan umat Islam, dan meningkatkan bantuan kaum muslimin kepada usaha peperangan Jepang (adanya tujuan dan politik timbal balik).

Keberpihakan lain yang dilakukan oleh pemerintahan penjajahan Jepang dapat dilihat dari kebijakan yang diambil, yakni dengan mendirikan organisasi atau lembaga baru di bidang agama seperti “*Shumubu*, yaitu Kantor Urusan Agama yang menggantikan Kantor Urusan Pribumi zaman Belanda, dipimpin oleh seorang Indonesia yaitu Hoesein Djayadiningrat pada 1 Oktober 1943”.<sup>91</sup> “Pada awalnya *Shumubu* dikepalai oleh Jepang yang bernama Kolonel Horie. Kemudian

---

<sup>87</sup>Hasballah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 70.

<sup>88</sup>Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), h.

<sup>89</sup>*Ibid.*, h. 23-25

<sup>90</sup>Muchtrom, *Santri dan Abangan*, h. 43.

<sup>91</sup>Harry J. Benda, *The Crescent and The Rissing Sun : Indonesia Islam under Javanese Occupation 1942-1980*, Terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), h. 158.

digantikan oleh K.H. Hasjim Asj'ari, tokoh ulama terkenal dari Jombang Jawa Timur".<sup>92</sup>

Kemudian dibentuk pula organisasi kemiliteran dengan nama "Hizbullah (Partai Allah atau Angkatan Allah), semacam organisasi militer untuk pemuda-pemuda Muslim yang dipimpin Zainul Arifin".<sup>93</sup> Organisasi ini juga dibentuk dengan tujuan "Meningkatnya bantuan dan kepercayaan umat Islam terhadap Jepang",<sup>94</sup> serta menunjukkan keberpihakan Jepang terhadap umat Islam.

Di samping itu, usaha ini dimaksudkan untuk memperkuat keyakinan rakyat dan bangsa Indonesia bahwa eksistensi pemerintahan penjajahan Jepang di bumi pertiwi ini membawa manfaat bagi kemaslahatan perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Kemudian Jepang mengharapkan adanya dukungan yang diberikan umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia umumnya terhadap eksistensi Jepang dalam menguasai wilayah Indonesia. Dengan demikian kedua belah pihak dianggap akan merasa diuntungkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan penjajahan Jepang.

Dengan adanya peran umat Islam pada berbagai organisasi dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan penjajahan Jepang, merupakan kesempatan bagi umat Islam mempersiapkan diri untuk menyatukan langkah dalam meraih cita-cita yang sudah lama ditunggu-tunggu, yakni menjadikan rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari penderitaan penjajah, menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat. Sikap dan tindakan yang diambil oleh pemerintahan penjajahan Jepang ini menghapus kebijakan pemerintah penjajahan Belanda yang memisahkan agama dari politik.

Kebijakan politik Jepang tersebut disambut umat Islam dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Tetapi janji yang ditunggu-tunggu tidak pernah terwujud, yang mengakibatkan timbulnya protes sosial, seperti yang terjadi di Blitar, yakni terjadinya Pemberontakan Peta yang dipimpin oleh Supriyadi (14 Februari 1945).

---

<sup>92</sup>Katimin, *Politik Islam Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hl. 74.

<sup>93</sup>Ajib Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, h.303.

<sup>94</sup>Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, Cet. IV, 1998), h. 265.

Adapun motivasi yang mendorong terjadinya pemberontakan tersebut disebabkan:

1. Tidak tahan melihat penderitaan rakyat
2. Tidak tahan melihat kesombongan dan kesewenangan Jepang.
3. *Sorei no dokuritsu* (janji Kemerdekaan) itu omong kosong, Karena merebut kemerdekaan harus dengan senjata.<sup>95</sup>

Setelah pemberontakan Peta, Jepang terus mengalami tekanan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, di samping mengalami tekanan dari Sekutu agar menyerahkan kekuasaannya di seluruh wilayah Asia. Jepang bertekuk lutut kepada Sekutu pada perang dunia II, dengan dijatuhkannya bom atom di dua kota penting di Jepang, yakni Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 14 dan 15 Agustus 1945, yang menewaskan ribuan orang penduduk di dua kota ini.

Kondisi ini mengakibatkan pemerintahan penjajahan Jepang tidak lagi mampu berkonsentrasi untuk melanjutkan penjajahannya di Indonesia. Sehingga kejadian ini juga mengakibatkan terjadinya “*vakum of power*” atau kekosongan kekuasaan di Indonesia. Melihat keadaan ini, para pejuang Indonesia mengambil kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, diproklamasikanlah kemerdekaan bangsa Indonesia, yang teks proklamasinya dibacakan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai orang yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam usaha mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia, tidaklah berlebihan dikatakan peran serta umat Islam cukup besar, terutama di bidang politik pergerakan kebangsaan. Bahkan jauh-jauh hari, sejak pertama kali bangsa Indonesia mulai dijajah oleh bangsa Barat di awal abad ke 16 M, umat Islam bersama para Ulama berada di garda depan perjuangan penegakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Keberadaan umat Islam dalam perjuangan bangsa Indonesia merdeka merupakan prinsip dasar dari ajaran Islam, yakni jihad fi sabilillah yang ganjarannya di akhirat kelak adalah sorga.

---

<sup>95</sup>*Ibid.*

## 2. Pasca Kemerdekaan RI (1945) Hingga Sekarang

Setelah penjajahan Jepang berlalu, Indonesia memasuki babak baru, yakni sebagai negara berdaulat dan merdeka, lepas dari tangan para penjajah yang ingin menguasai negara Indonesia. Dalam konteks ini, eksistensi umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia diakui secara umum. Ini ditandai dengan dituliskannya pernyataan pada Piagam Jakarta yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan alinea ketiga bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas kebesaran dan rahmat dari Allah SWT. Teks atau kalimat tersebut berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”.<sup>96</sup>

Walaupun pada alinea ke empat dari Pembukaan UUD 1945 terjadi perubahan, yakni pada sila pertama dari isi Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sebelumnya berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa umat Islam memainkan peranan yang signifikan terhadap kehadiran negara Indonesia, lewat berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang menjadi cikal bakal partai politik Islam Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia.

Pelibatan umat Islam dalam gerakan politik dan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fakta sejarah yang terjadi. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Katimin bahwa “Golongan Islam selalu dipinggirkan dan dipandang sebelah mata oleh pihak Kolonial. Kondisi demikian tampak dari sikap Belanda yang banyak memberi peran pada golongan sekuler sebagai wakil dari bangsa Indonesia dalam berbagai persoalan Hindia Belanda. Sikap demikian agak berbeda dengan Jepang yang lebih banyak memberi peran kepada golongan Islam di samping golongan sekuler”.<sup>97</sup>

Kenyataan ini semakin memberikan keyakinan bahwa umat Islam sejak jauh-jauh hari sudah memainkan peran sentral demi terwujudnya Indonesia merdeka dan berdaulat.

---

<sup>96</sup>Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*, h. 314-315.

<sup>97</sup>Katimin, *Politik Islam Indonesia*, h. 65.

## 2. Pasca Kemerdekaan RI (1945) Hingga Sekarang

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa umat Islam mengalami marginalisasi di bidang politik sejak zaman penjajahan sampai menjelang kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan setelah kemerdekaan pun hal ini terus berlanjut. Gesekan-gesekan politik dibarengi dengan gesekan militer terjadi antara umat Islam dengan kaum penjajah, seperti dengan pemerintahan kolonial Belanda. Katimin menegaskan bahwa “Hal ini tampak dari sikap Belanda yang banyak memberi peran pada golongan sekuler sebagai wakil dari bangsa Indonesia dalam berbagai persoalan Hindia Belanda”.<sup>98</sup>

Upaya ini dilakukan oleh Belanda dengan tujuan “Untuk mendekatkan masyarakat pribumi agar menyesuaikan diri dengan kebudayaan Belanda. Prinsip ini bertujuan untuk memenangkan persaingan pihak kolonial terhadap umat Islam”.<sup>99</sup> Oleh karenanya berbagai cara ditempuh pemerintahan kolonial Belanda melakukan politik kolonialnya. Salah satunya menurut Aqib Suminto adalah “Politik asosiasi lewat jalur budaya, terutama pendidikan. Snouck berharap melalui politik asosiasi ini Islam dapat dikalahkan dengan melarutkan umat Islam ke dalam kebudayaan Belanda”.<sup>100</sup>

Melalui politik asosiasi dan politik Islam yang dikembangkan oleh pemerintahan kolonial Belanda, sengaja atau tidak telah melahirkan dua kelompok terpelajar sejak permulaan abad ke 20, yakni “Golongan sekuler dan golongan Islam, karena sistem pendidikan kolonial dirancang sebagai upaya penghancuran kekuatan Islam”.<sup>101</sup> Oleh karenanya, melalui politik asosiasi, terutama di bidang pendidikan, pemerintahan kolonial Belanda menerapkan diskriminasi, yakni “Memberi subsidi dan fasilitas pendidikan yang luar biasa kepada lembaga pendidikan yang didirikan kolonial, sementara lembaga pendidikan pribumi (pesantren) dibiarkan bahkan dicurigai”.<sup>102</sup>

---

<sup>98</sup>Katimin, *Politik Islam Indonesia*, h. 65

<sup>99</sup>*Ibid.*, h. 68.

<sup>100</sup>Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 43.

<sup>101</sup>Katimin, *Politik Islam Indonesia*, h. 69.

<sup>102</sup>*Ibid.*, h. 69.

Kemudian, pada masa pemerintahan penjajahan Jepang, sedikit terjadi keseimbangan peran antara umat Islam dengan kelompok masyarakat berhaluan nasionalis sekuler, seperti ditegaskan oleh Katimin bahwa "... Jepang yang lebih banyak memberi peran kepada golongan Islam di samping golongan sekuler".<sup>103</sup> Hal ini dikarenakan ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin diraih oleh pemerintahan penjajahan Jepang, dengan memberikan dukungan kepada umat Islam.

Yakni agar umat Islam memberikan dukungan terhadap eksistensinya di Indonesia, serta untuk memenangkan "Perang Asia Timur Raya". Ini diperkuat dengan pernyataan Harry J. Benda bahwa "Jepang ingin memobilisasi seluruh kekuatan rakyat dalam rangka menyokong tujuan-tujuan perang mereka yang cepat dan mendesak".<sup>104</sup>

Untuk merealisasikan upaya-upaya tersebut, Jepang melakukan langkah-langkah strategis di Indonesia, yakni "Melarang semua kegiatan organisasi-organisasi politik yang ada dan berupaya membangun organisasi semi militer".<sup>105</sup> Oleh karenanya, Jepang melakukan tindakan mempekerjakan rakyat Indonesia sebagai Romusha (kerja paksa), melatih rakyat jadi bala tentara Jepang. Di samping membagi-bagi wilayah Indonesia berdasarkan kekuatan angkatan bersenjata.

Setelah itu, pergerakan politik umat Islam mengalami kemandekan. Di masa selanjutnya, Jepang melakukan pendekatan terhadap umat Islam dengan mengakomodir kepentingan-kepentingan umat Islam. Namun menjelang kemerdekaan Indonesia, Jepang tidak mampu lagi mengakomodir kepentingan umat Islam akibat kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.

Setelah bangsa Indonesia merdeka, konstalasi politik bangsa Indonesia mengalami dinamika yang cukup beragam, dengan kehadiran berbagai partai politik. Dalam konteks ini, sistem kepartaian Indonesia diwakili dua kelompok ideologi, yakni Ideologi Nasionalis dan ideologi Islam. Hal ini dipelopori oleh

---

<sup>103</sup>*Ibid.*, h. 65.

<sup>104</sup>Benda, *The Crescent*, h. 15.

<sup>105</sup>Katimin, *Politik Islam Indonesia*, h. 70.

tokoh-tokoh berhaluan nasionalis sekuler dengan tokoh-tokoh nasionalis berhaluan religus Islam.

Ini berlanjut terus di masa-masa selanjutnya, bahkan dapat dirasakan sampai saat sekarang. Namun, sama dengan masa penjajahan, sejak menjelang kemerdekaan RI sampai proklamasi, kelompok Islam tetap dimarginalisasikan, termasuk partai politik Islam sebagai saluran aspirasi umat Islam. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Katimin yang menegaskan bahwa “Sejak masa persiapan kemerdekaan golongan Islam tidak terwakili secara signifikan”.<sup>106</sup>

Peristiwa yang dapat dikemukakan adanya upaya-upaya marginalisasi kelompok Islam dalam sistem kebangsaan dan ketata negaraan Indonesia, termasuk memarginalkan partai politik Islam dapat dilihat ketika 3 bulan menjelang kemerdekaan Indonesia. Para wakil pejuang dari berbagai latar belakang aliran ideologi politik terlibat dalam persiapan perumusan dasar Negara yang diwarnai oleh perbedaan-perbedaan visi yang cukup tajam. Perbedaan pendapat dan pertikaian muncul di lembaga persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang yang dinamakan BPUPKI.

...Dibentuklah “Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai” (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945, hari ulang tahun Kaisar Jepang. Badan yang beranggotakan 62 orang, termasuk ketua dan wakil ketua tersebut dilantik pada tanggal 28 Mei. Kemudian ditambah 6 anggota menjadi 68 orang. Panitia ini menyelesaikan tugasnya di gedung Pejambon setelah melalui dua sidang. Sidang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, dan sidang kedua berlangsung dari tanggal 10-16 Juni 1945.<sup>107</sup>

Dari 68 orang jumlah anggota BPUPKI, 15 orang dari golongan Islam, 8 orang dari Jepang, dan selebihnya dari golongan nasionalis sekuler. Ini berarti hanya sekitar 20 % saja yang mewakili aspirasi politik pendukung dasar Negara Islam bagi Negara yang hendak diciptakan. Adapun wakil-wakil golongan Islam diantaranya adalah “K.H.A. Sanusi (PUI), Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Mas Masykur, Abdul Kahar Muzakir (Muhammadiyah), K.H.A. Wachid Hasjim

---

<sup>106</sup> Katimin, *Politik Islam Indonesia*, h. 66.

<sup>107</sup> H. Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960), h. 239.

(NU), Sukiman Wirjosandjojo (PII sebelum perang), dan K.H. Abdul Halim (PUI)”.<sup>108</sup>

Tema sentral yang dibicarakan di dalam forum BPUPKI adalah rancangan konstitusi Negara, bentuk Negara, batas Negara, dasar filsafat Negara, dan hal-hal lain terkait dengan konstitusi. Persoalan hangat yang dibahas dalam forum BPUPKI adalah mengenai dasar Negara. Sementara itu masalah-masalah lain sudah disepakati bersama. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan untuk menentukan dasar Negara.

Dari kubu nasionalis sekuler lebih mengedepankan dasar Negara adalah difokuskan pada fondasi dasar bangsa, yakni Pancasila. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ir. Soekarno. “Soekarno berpandangan, landasan filosofis (*Weltanschauung* atau *philosophische Grondslag*) bagi Negara adalah fondasi yang fundamental, sebuah filsafat, alasan mendasar, sebuah spirit yang kuat dan hasrat yang mendalam yang mendasari struktur Negara merdeka yang hendak dibangun”<sup>109</sup>, yakni Pancasila.

Sementara itu dari kelompok Nasionalis Islam (baik tradisional maupun moderat) yang mengetahui persis prinsip politik Islam dan fakta sejarah perjuangan bangsa Indonesia, mengajukan ajaran Islam sebagai dasar Negara. Argumentasi yang dikemukakan adalah “Karena umat Islam Indonesia yang berjumlah 90 % membentuk nation Indonesia, sehingga tak akan ada nation Indonesia tanpa umat Islam”.<sup>110</sup>

Dalam pertemuan di forum BPUPKI tersebut tidak dicapai kesepakatan mengenai dasar Negara, karena kedua belah pihak (nasionalis sekuler dan nasionalis Islam) masing-masing dengan pendapatnya. Munculnya perbedaan pendapat di antara kedua golongan (nasionalis sekuler dan nasionalis Islam), karena kedua-duanya memiliki akar sejarah yang panjang terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam usaha mencapai kemerdekaannya.

---

<sup>108</sup>*Ibid.*, h. 61.

<sup>109</sup>Soekarno, *Pancasila Dasar Negara* (Jakarta: Inti Idayu Press, Yayasan Pendidikan Soekarno, 1986), h. 133.

<sup>110</sup>Endang Saifuddin Anshari, *Komitmen Umat Islam, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam* (Jakarta: Usaha Enterprises, 1976), h. 143-144.

Nasionalis sekuler memberikan penegasan bahwa perjuangan melawan penjajahan untuk mencapai Indonesia yang merdeka telah dimulai sejak berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya organisasi ini merupakan “Organisasi pertama bangsa Indonesia yang disusun dengan bentuk modern dan yang besar artinya”.<sup>111</sup> Dengan lahirnya organisasi ini memunculkan organisasi dan partai politik lainnya, seperti “Partai Nasional Indonesia (PNI) 4 Juli 1927, Partai Indonesia (Partindo) April 1931, Partai Nasional Indonesia (PNI Baru) Desember 1933, Partai Indonesia Raya (Parindra) 26 Desember 1935, dan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) 24 Mei 1937”.<sup>112</sup>

Sementara itu, nasionalis golongan Islam memiliki pemikiran bahwa titik awal pergerakan kebangsaan Indonesia dimulai dengan berdirinya organisasi “Sarikat Islam pada tanggal 16 Oktober 1905”.<sup>113</sup> Prinsip dasar perjuangan Sarikat Islam diarahkan kepada “Rakyat jelata dengan ruang lingkup Indonesia”.<sup>114</sup> Selanjutnya, organisasi sosial ini berubah menjadi organisasi politik, yakni “Partai Sarekat Islam (PSI) pada tahun 1923, kemudian menjadi Partai Sarekat Islam Hindia Timur (PSIHT) pada tahun 1927, dan akhirnya menjadi Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1930”.<sup>115</sup> Kemudian, berdiri pula organisasi partai politik lainnya, seperti “Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) didirikan di Sumatera”.<sup>116</sup> Selanjutnya “Pada tahun 1938 Partai Islam Indonesia (PII) didirikan juga di Jawa”.<sup>117</sup> Partai-partai ini semua berdasarkan ajaran agama Islam sebagai landasan ideologinya.

Disebabkan perbedaan latar belakang pemikiran yang memberikan penegasan tentang titik awal pergerakan kebangsaan Indonesia antara kelompok nasionalis sekuler dan kelompok nasionalis Islam mengakibatkan diskusi tentang dasar negara tidak tuntas dibahas, dan memerlukan pendekatan-pendekatan yang lebih dinamis dalam memecahkan masalah-masalah ideologi ini.

---

<sup>111</sup>A.K. Pringgogidgo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1967), h. 1.

<sup>112</sup>*Ibid.*, h. 55-62.

<sup>113</sup>M. Natsir, *Capita Selecta II* (Jakarta: Pendis, 1957), h. 124.

<sup>114</sup>Pringgogidgo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, h. 124.

<sup>115</sup>*Ibid.*, h. 35.

<sup>116</sup>Ensiklopedia Indonesia, *Artikel Permi* (tt, tp, tt), h. 1098.

<sup>117</sup>Pringgogidgo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, h. 1.

Akhirnya, untuk menjembatani perbedaan-perbedaan persepsi dan pemikiran mengenai konsep dasar negara, maka dibentuklah Panitia Kecil yang disebut Panitia 9, yang anggotanya terdiri dari “Empat wakil nasionalis Islam (Abi Koesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, dan Wahid Hasyim) dan lima wakil nasionalis sekuler (Soekarno, Moh. Hatta, AA Maramis, Achmad Soebarjo, dan Mohammad Yamin)”.<sup>118</sup>

Dari hasil pertemuan panitia 9 tersebut tercapai kesepakatan mengenai dasar Negara yang tertuang dalam *Preamble* yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945, ditambahkan lagi kesepakatan batang tubuh rancangan UUD. Kompromi politik antara kubu nasionalis sekuler dan nasionalis Islam ini diberi istilah oleh beberapa orang. “Oleh Muhammad Yamin disebut Piagam Jakarta (*The Jakarta Charter*). Soekiman menyebutnya *Gentleman’s Agreement*. Soekarno menilai kesepakatan itu sebagai kompromi antara golongan Islam dan kebangsaan yang hanya didapat secara susah payah, didasarkan atas “memberi dan mengambil”.<sup>119</sup> Beberapa hal yang disepakati antara lain:

Nasionalis Islam memberi (nasionalis sekuler mengambil) dua konsesi: *Pertama*, Islam tak dijadikan dasar Negara. *Kedua*, tak menjadikan Islam sebagai agama Negara. Sebaliknya nasionalis sekuler (netral agama) memberikan (nasionalis Islam mengambil) konsesi : *Pertama*, sila ketuhanan ditaruh pada urutan pertama Pancasila. *Kedua*, sila ketuhanan—dan pasal 29 batang tubuh—dirumuskan dalam: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. *Ketiga*, presiden Indonesia beragama Islam.<sup>120</sup>

Kesepakatan yang diambil oleh kedua pihak (Nasionalis Islam dan Nasionalis sekuler) tersebut akan menjadi dasar negara kelak jika Indonesia merdeka. Namun pada tanggal 18 Agustus 1945, atau sehari setelah Indonesia merdeka, kesepakatan tersebut berubah. Hal ini ditandai adanya perubahan beberapa hal pada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, sebagaimana diperjelas melalui pernyataan berikut:

Atas inisiatif Moh. Hatta yang di dukung oleh Soekarno, kesepakatan “hasil memberi dan mengambil” yang dicapai susah payah itu dirombak Panitia

---

<sup>118</sup>Mashad, *Akar Politik*, h. 57.

<sup>119</sup>*Ibid.*

<sup>120</sup>*Ibid.*

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Alasan yang mendasar yang dikemukakan Hatta adalah untuk mencegah masyarakat Kristen di Indonesia Timur memisahkan diri seperti telah dikemukakan seorang Kaigun Jepang kepada Hatta (pada petang hari, 17 Agustus 1945)".<sup>121</sup>

Beberapa hal pokok yang dirubah melalui rapat PPKI diantaranya adalah:

1. Kata "Mukaddimah" diganti "Pembukaan" meskipun artinya sama.
2. Kalimat "berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", baik dalam Preambule maupun dalam batang tubuh pasal 29.
3. Pasal 6 ayat 1 "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam", kata "dan beragama Islam" dicabut.<sup>122</sup>

Salah satu isu pokok yang hangat dibicarakan sampai saat sekarang ini adalah hapusnya tujuh kata pada Pembukaan UUD 1945, yakni "dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" yang diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kompromi politik antara umat Islam yang diwakili partai politik Islam di parlemen dan ingin menegakkan syari'at di Negara Indonesia dengan kelompok elit politik nasionalis berpendidikan Barat.

Kemudian, adanya kekhawatiran sebahagian anggota panitia 9 apabila tujuh kata tersebut dimasukkan dalam Pembukaan UUD 1945 akan menyebabkan terpisahkan sebahagian wilayah Indonesia, terutama wilayah Indonesia bagian Timur. Demi menjaga keutuhan bangsa Indonesia, maka anggota panitia 9 bersepakat menghapus 7 kata tersebut.

Adanya penghapusan 7 kata penting bagi peluang umat Islam menegakkan syari'at Islam, menyebabkan kelompok nasionalis Islam terbelah ke dalam dua sikap, antara lain:

*Pertama* kelompok yang realistik. Alasan mereka: *Pertama*, meskipun Indonesia bukan Negara Islam, tetapi dengan sila pertama Pancasila, berarti Indonesia bukan Negara sekuler yang memandang agama semata-mata masalah pribadi. Alasan mereka lainnya, kata "Yang Maha Esa" yang mengiringi kata "Ketuhanan", hakikatnya merujuk pada surah Al-Ikhlâs, yakni tentang konsep Tauhid dalam Islam. Ketuhanan Yang Maha Esa dinilai sebagai kalimat yang menyatakan bahwa Dialah satu-satunya yang mutlak adalah Tuhan. Ia

---

<sup>121</sup>Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi* (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 60.

<sup>122</sup>Mashad, *Akar Politik*, h. 14.

menonjolkan akidah Islam, tetapi pernyataannya dengan sengaja “menyimpang” agar pengikut agama-agama lain dapat juga menyetujui pernyataan itu. Alasan lain, semangat Piagam Jakarta bukan berarti lenyap. Apalagi dalam Negara Indonesia yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika, dimana tiap-tiap peraturan dalam kerangka syari’at Islam, yang hanya mengenai orang Islam dapat dimajukan lewat DPR sebagai rancangan Undang-Undang. Jika hal itu diwujudkan, maka tak ada bedanya dengan implementasi dari substansi Piagam Jakarta.

*Kedua*, kelompok yang kecewa dan karenanya selalu memunculkan *Historische Vraag* (pertanyaan sejarah) tentang segala hal di balik proses perubahan Piagam Jakarta.<sup>123</sup>

Kondisi ini juga menunjukkan adanya pelemahan kekuatan umat Islam di bidang politik di awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Bila mengacu kepada pernyataan berikut mungkin ada benarnya, karena dinyatakan bahwa “Islam di Indonesia telah diakui sebagai kekuatan kultural, tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam”<sup>124</sup>

Pernyataan ini menegaskan bahwa ajaran Islam dan umat Islam hanya diakui dan berperan pada aspek budaya dan pengamalan agama semata berupa ibadah, yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian pada aspek pembinaan moral masyarakat semata, penataan pranata-pranata sosial, dan pencerminan nilai-nilai ruhaniyah.

Sementara itu pada aspek politik, ajaran Islam dan umat Islam tidak memainkan peranan sama sekali. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan politik umat Islam, karena tidak mampu mempengaruhi kebijakan politik nasional pada awal kemerdekaan Indonesia. Di samping jumlah keanggotaan perwakilan umat Islam di BPUPKI maupun PPKI tidak signifikan dengan jumlah keseluruhan anggota forum tersebut maupun dibandingkan jumlah umat Islam seluruhnya.

Peristiwa politik yang berkembang di awal kemerdekaan Indonesia menunjukkan ajaran Snouck Hurgronje masih melekat bagi sebahagian kalangan masyarakat Indonesia, yang sinis terhadap keberadaan Islam dan umat Islam yang komitmen menjalankan ajaran Islam. Pesan Snouck Hurgronje yang menyebutkan “Islam sebagai kekuatan ibadah (sholat) atau sosial (haji) perlu diberi kebebasan,

---

<sup>123</sup>*Ibid*, h. 59-60.

<sup>124</sup>Thohir, *Perkembangan Peradaban*, h.304.

namun Islam sebagai kekuatan politik perlu dibatasi”,<sup>125</sup> juga diterapkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, menjelang maupun setelah diperolehnya kemerdekaan bangsa Indonesia.

Hal ini dilatar belakangi sikap dan perilaku sebahagian masyarakat Indonesia dalam praktek keagamaannya tidak mencerminkan sebagai pemeluk agama Islam yang kaffah. Kebanyakan dari umat Islam menjalankan ajaran agama sekedar memenuhi kewajiban semata. Di samping tidak mengenal ajaran Islam secara utuh. Hal ini bisa disebabkan oleh kehidupan keluarga yang tidak menopang atau menuntun seorang pribadi muslim Indonesia untuk taat menjalankan perintah agama. Kemudian, latar belakang pendidikan yang diperoleh tidak signifikan untuk memahami ajaran Islam.

Di samping itu, sejak zaman penjajahan Belanda masyarakat muslim Indonesia telah terbagi kepada tiga kelompok, yakni kaum priyayi, yaitu orang-orang terhormat atau kaum bangsawan, kaum abangan, yaitu orang-orang kaya, pegawai-pegawai pemerintah, dan pengusaha, kaum santri, yaitu kelompok masyarakat biasa, dan orang-orang yang belajar agama di pesantren.

Adanya pengelompokan ini juga berpengaruh terhadap perilaku keagamaan dan pemikiran politiknya. Kelompok masyarakat priyayi maupun abangan tidak melaksanakan ajaran Islam secara konsisten. Mereka hanya sekedarnya saja menjalankan ajaran agama. Bahkan lebih mengedepankan aspek sinkritisme dalam praktek keagamaan pada hari-hari tertentu. Kemudian, sikap politik yang diperlihatkan lebih bersifat sekuler, dan mendekati diri kepada pemikiran nasionalis sekuler.

Hanya kelompok masyarakat kalangan santri yang mau menjalankan ajaran agama Islam secara sungguh-sungguh. Ini bisa terjadi karena pembinaan dan pendidikan Islam yang di terima sudah melekat sejak dini di lingkungan kehidupannya maupun lembaga pendidikan, yakni Pesantren. Kondisi ini tentu mempengaruhi cara berfikir dan pemahaman politiknya yang lebih mengedepankan pemikiran politik Islam, dengan semangat jihad fi sabilillah. Hal ini dikarenakan adanya upaya untuk mengusir penjajahan, dan dalam konsep

---

<sup>125</sup>*Ibid.*

Islam ditanamkan untuk cinta kepada tanah air (bangsa) dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah yang ingin menguasai wilayah kehidupan masyarakat.

Fakta ini memperlihatkan ketika umat Islam berada dalam lingkaran penentu kebijakan dan pelibatan diri pada partai politik menjelang dan pasca kemerdekaan bangsa Indonesia, sebahagian besar kelompok Islam abangan dan priyayi yang dilibatkan. Sementara itu, kelompok masyarakat Islam kalangan santri sangat sedikit. Ini bisa terjadi karena faktor sejarah dan pertikaian kelompok yang masih terus berkembang sejak dari dahulu sampai Indonesia Merdeka.

Dengan demikian, umat Islam Indonesia tidak mampu memainkan peran apa-apa dalam perjuangan menegakkan sistem pemerintahan berbasiskan ajaran agama Islam di awal kemerdekaan, melalui saluran partai politik yang ada, yakni partai politik Islam. Hal ini sungguh sangat disayangkan, karena ketika melakukan perjuangan melawan dan mengusir penjajah, serta merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Indonesia, umat Islam menjadi benteng kekuatan melawan serangan yang bertubi-tubi terhadap bangsa Indonesia.

Tetapi setelah kemerdekaan, terjadi pertikaian politik dalam menentukan kebijakan dasar Negara. Kondisi ini ikut mempengaruhi ideologi keagamaan masyarakat muslim pasca kemerdekaan. Adanya perbedaan dalam menentukan ideologi Negara berdasarkan Pancasila atau Islam mempengaruhi hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dan keagamaan masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Syafii Ma'arif berikut ini:

Konstelasi politik Indonesia menjelang dan awal kemerdekaan, rusaknya persaudaraan umat juga bermula dari mazhab politik praktis. Sebab, masalah-masalah khilafiyah tidak begitu dirasakan seperti pada dekade dua atau ketiga abad ke 20. Bahkan, pada masa Demokrasi Terpimpin iklim persaudaraan umat lebih runyam dibandingkan era sebelumnya. Fakta ini jelas memperlihatkan jarak antara doktrin yang diyakini tentang persaudaraan dan realitas kehidupan umat. Kelompok modernis dan sayap pesantren sebagai actor utama dalam konflik selalu sama-sama menyatakan bahwa pemeluk Islam yang beriman adalah bersaudara, bahwa hal itu menjadi basis solidaritas,

termasuk dalam kehidupan politik. Tetapi sejarah justru menunjukkan bahwa antara ajaran dan realitas ternyata tidak sama.<sup>126</sup>

Termasuk peristiwa penghapusan 7 kata dalam piagam Jakarta merupakan tarik menarik antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis. Kelompok Islam menginginkan 7 kata tersebut dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, sebagai wujud nyata untuk menegaskan bentuk Negara Indonesia, sebagai Negara Islam. Sementara itu kaum nasionalis menginginkan 7 kata tersebut dihilangkan saja, juga bertujuan untuk menentukan identitas diri Negara sebagai Negara yang bukan didasarkan agama, tetapi didasarkan pada asas Pancasila.

Walaupun demikian, ada implikasi positif yang dapat diketengahkan terhadap keterlibatan umat Islam dalam urusan politik Indonesia, diantaranya: “*Pertama*, adalah dengan melibatkan diri dalam urusan-urusan politik, maka umat Islam telah banyak melahirkan banyak pejuang-pejuang tangguh dalam upaya merebut kemerdekaan. *Kedua*, mengkrystalkan semangat nasionalisme anti penjajahan yang pada akhirnya mempercepat pencapaian kemerdekaan”.<sup>127</sup> Tetapi setelah kemerdekaan RI, umat Islam mengalami penurunan yang tajam terhadap eksistensinya di bidang politik.

Realitas politik yang demikian, mempengaruhi timbulnya gerakan-gerakan radikal untuk memperjuangkan syari’at agama Islam masuk dalam sistem ketata negaraan dan politik Indonesia. Salah satunya adalah lahirnya Gerakan Darul Islam di Indonesia. Gerakan ini lahir karena ketidak puasan terhadap pemerintahan pusat dalam kebijakan kenegaraan, yang dianggap kurang mengakomodir kepentingan daerah dan kepentingan umat Islam.

Karena itu Darul Islam diartikan sebagai “Gerakan-gerakan sesudah tahun 1945 yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita Negara Islam Indonesia”.<sup>128</sup> Gerakan-gerakan yang berdimensikan kekerasan ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya di Jawa Barat pada tahun 1949-1962, di

---

<sup>126</sup> Ahmad Syafii Ma’arif, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 99.

<sup>127</sup> Katimin, *Politik Islam Indonesia*, h. 66.

<sup>128</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Grafittipers, 1983), h. 1.

Jawa Tengah pada 1965, di Sulawesi, berakhir 1965, di Kalimantan, berakhir 1963, dan di Aceh pada 1953 yang berakhir dengan kompromi pada 1957.<sup>129</sup>

Selanjutnya, pada masa Orde Lama yang menamakan diri dengan sebutan sistem demokrasi terpimpin, ajaran Islam dan umatnya dikebiri oleh penguasa, termasuk di bidang politik. Pemimpin-pemimpin Islam dipinggirkan, dikucilkan, bahkan bila perlu dijauhkan dari dunia politik dan pemerintahan. Hanya pada waktu ada kepentingan sesaat, ajaran Islam dan umat Islam dijadikan rujukan dan perlindungan sekaligus meminta dukungan.

Seperti halnya pada peristiwa G. 30 S /PKI, kembali umat Islam, ajaran Islam, dan partai politik Islam berada di depan digandeng untuk menjatuhkan komunis dan antek-anteknya. Setelah komunis hilang, kembali umat Islam dipinggirkan oleh penguasa yang bernama Orde Baru secara perlahan-lahan, bahkan kadang secara radikal dan tegas, termasuk mematikan pergerakan politik Islam.

Kemesraan umat Islam dengan Orde Baru hanya berjalan sebentar saja, yakni setelah peristiwa G. 30 S/PKI. Setelah itu, lambat laun penguasa Orde Baru menjauh dari umat Islam, termasuk di bidang politik. Apalagi sejak pecahnya peristiwa Tanjung Periok pada tahun 1984. Kecurigaan kepada umat Islam semakin dipertunjukkan, dengan menangkap dan memenjarakan orang-orang yang dianggap sebagai “teroris”, atau perusuh, atau dianggap anti Pancasila dan pemerintah.

Penguasa yang merupakan perpanjangan tangan militer pada waktu itu menggandeng organisasi Golongan Karya, memperlihatkan taring kekuasaannya, sehingga menyulitkan umat Islam untuk berdakwah dan berpolitik. Karena adanya perasaan curiga dan menganggap materi dakwah yang disampaikan berbau politik yang bisa mempropokasi umat Islam untuk melawan pemerintahan yang berkuasa. Mulailah dilakukan kontrol sosial pemerintah, misalnya dengan mencetak buku khutbah secara Nasional yang harus dibaca khatib dari pusat pemerintahan sampai ke desa-desa atau kampung-kampung, baik ketika khutbah Jum'at maupun ketika khutbah Idhul Fitri dan Idhul Adha.

---

<sup>129</sup>Thohir, *Perkembangan Peradaban*, h.305.

Sikap pemerintah terhadap umat Islam baru berubah sekitar tahun 1992-1995, karena kekuatan penguasa yang mulai melemah, dan semakin banyaknya para cendekiawan muslim muncul memberikan penguatan dan pencerahan terhadap penguasa untuk memperlakukan umat Islam dan ajaran Islam secara lebih elegan dan harmonis. Kemudian kondisi ini berlanjut sampai berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang memunculkan Orde Reformasi.

Secara perlahan namun pasti pada era ini ajaran Islam mulai memasuki wilayah atau domain pemerintahan/politik, produk perundang-undangan maupun perda. Hal ini ditandai banyaknya peraturan dan perundang-undangan yang diwanai oleh ajaran Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kondisi menguntungkan ini diilhami oleh banyaknya tokoh politik nasional dan daerah yang memiliki latar belakang pendidikan agama Islam.

Di samping adanya kesadaran yang tinggi atas tegaknya ajaran Islam di semua lini kehidupan masyarakat. Karena itulah ketika menjadi penguasa (kepala pemerintahan) maupun sebagai wakil rakyat (anggota DPR, DPRD) dan lain-lain, isu menegakkan syari'at Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia perlahan-lahan dihidupkan kembali dan diperjuangkan untuk diterapkan menjadi produk hukum Nasional.

Di era reformasi ini politik umat Islam semakin dinamis, dan memainkan peran yang cukup signifikan. Walaupun masih ada fenomena-fenomena negatif yang lahir dari sikap dan perilaku umat Islam. Hal ini ditandai adanya gerakan-gerakan seporadis dan radikal serta perilaku kriminal yang mengatas namakan agama Islam. Salah satu contoh nyata adalah munculnya para teroris yang "katanya" ingin tegaknya Negara Islam. Tindakan yang diambil adalah dengan menciptakan suasana mencekam di masyarakat. Pemboman tempat-tempat vital dan gerakan-gerakan radikal yang ditimbulkan adalah dengan maksud dan tujuan untuk tercapainya keinginan menegakkan Negara Islam versi mereka.

Upaya ini sebenarnya sudah tumbuh sejak jauh-jauh hari, bahkan sejak Indonesia baru merdeka, di zaman Orde Lama maupun Orde Baru. Ada yang bersikap radikal dan brutal demi tegaknya syari'at Islam. Namun ada yang

berjuang sampai saat ini untuk menegakkan syari'at Islam dengan cara yang damai, elegan, dan dinamis, berkembang seiring dengan dinamis dan berkembangnya masyarakat dan kehidupan modern.

Di sisi lain pada bidang sosial, ada beberapa kebijakan yang diambil pemerintahan Negara Indonesia pasca kemerdekaannya, diantaranya adalah pendirian Kementerian Agama (berubah nama menjadi Departemen Agama, dan kemudian dewasa ini kembali dinamakan Kementerian Agama). “Departemen Agama (dulu namanya Kementerian Agama) didirikan pada masa Kabinet Syahrir yang mengambil keputusan tanggal 3 Januari 1946 untuk memberikan sebuah konsesi kepada kaum muslimin”.<sup>130</sup> Menteri agama pertama adalah M. Rasyidi yang diangkat pada tanggal 12 Maret 1946.

Pernyataan B.J. Boland yang menegaskan kehadiran Departemen Agama sebagai konsesi kepada kaum muslimin menunjukkan adanya keinginan untuk mengapresiasi kepentingan umat Islam, dan mendinginkan suasana politik Indonesia. Pendirian Departemen Agama ini juga mendapat halangan dari kelompok perumus UUD 1945. Tetapi anggota KNIP dari kelompok Islam memberikan persetujuan untuk didirikan. Akhirnya berdirilah Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946.

Selain itu apresiasi pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan di bidang sosial adalah didirikan dan diusahakannya penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam, baik berbentuk madrasah, perguruan tinggi, maupun penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah umum. Kebijakan ini diserahkan kepada Departemen Agama untuk menyelenggarakannya. Hal ini sebagaimana kutipan berikut: “Departemen Agama adalah menyelenggarakan, membimbing, dan mengawasi pendidikan agama”.<sup>131</sup>

Kemudian di bidang hukum Islam, pemerintah Indonesia menyerahkan pembentukan pengadilan agama kepada Departemen Agama. “Pengadilan Islam di Indonesia membatasi dirinya pada soal-soal hukum muamalat yang bersifat

---

<sup>130</sup>B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafiti pers, Cetakan Pertama, 1985), h. 110.

<sup>131</sup>Badri yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 309.

pribadi. Hukum muamalat pun terbatas pada masalah nikah, cerai, dan rujuk, hukum waris (faraidh), wakaf, hibah, dan baitul mal”<sup>132</sup>.

Kebijakan lain diambil pemerintah di bidang sosial keagamaan adalah mengurus masalah perhajian atau mengatur kepergian orang/umat Islam ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Melalui Departemen Agama urusan haji dilaksanakan. Dewasa ini, urusan haji diurus oleh pemerintah, juga dikelola oleh swasta dalam urusan keberangkatan ke Kota Mekkah.

Kemudian, untuk menjembatani hubungan sosial pemerintah dengan umat Islam, selain Departemen Agama, dibentuklah satu organisasi keIslaman yang bernama Majelis Ulama Indonesia, disingkat MUI. Selain jembatan sosial pemerintah dengan umat Islam, juga sebagai jembatan untuk merealisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat, khususnya umat Islam. Badri Yatim mengatakan bahwa “Suatu program pemerintah, apalagi yang berkenaan dengan agama, hanya bisa berhasil dengan baik bila disokong ulama. Karena itu, kerjasama antara pemerintah dan ulama perlu terjalin dengan baik”<sup>133</sup>. Untuk menciptakan suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat, serta dapat terlaksananya program pemerintah, maka kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang dibutuhkan.

Seiring dengan perkembangan zaman, dewasa ini telah dibentuk lembaga pengelola zakat. Di tingkat Nasional disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Sementara itu di tingkat daerah adalah BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), baik tingkat I, maupun tingkat II. Lembaga zakat ini dibentuk dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah.

Untuk tingkat nasional di bawah koordinasi Menteri sosial dan menteri agama. Kemudian, di tingkat daerah di bawah koordinasi kepala pemerintahan (Gubernur dan Bupati). Selain itu juga pihak swasta diberi kesempatan atau peluang untuk mengelola lembaga zakat. Semua ini dilakukan untuk pembinaan terhadap umat, meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan.

---

<sup>132</sup>Noer, *Gerakan*, h. 84.

<sup>133</sup>Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 320.

Selain itu, ajaran (syari'at) Islam memasuki sentra-sentra bisnis dan keuangan dengan munculnya bank-bank berlabelkan syari'ah. Produk-produk makanan yang berlisensi halal dan lain-lain. Ini semua dilakukan untuk menyahuti aspirasi umat Islam yang menginginkan adanya prinsip-prinsip ajaran Islam dalam tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Dengan demikian perlu digaris bawahi bahwa eksistensi hubungan sosial politik umat Islam adalah upaya mengakomodir kepentingan umat Islam, dan mengakomodir kepentingan pemerintah terhadap umat Islam, dalam hal pelaksanaan program-program pemerintah, dan menciptakan kondisi nyaman antara pemerintah dengan umat Islam.

#### **D. Partisipasi Partai Politik Islam Dalam Pemilu di Indonesia**

##### **1. Eksistensi Partai Islam (Cikal Bakal PPP) Pada Pemilu di Masa Orde Lama (1945-1965)**

Upaya menciptakan suatu negara modern yang demokratis adalah diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu), yang dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menempatkan orang-orang yang dipilih sebagai wakil rakyat untuk mengakomodir dan menyampaikannya kepada pemerintahan yang berkuasa.

Setelah kemerdekaan diperoleh, maka Indonesia memasuki sistem pemerintahan demokrasi yang mengharuskan diadakannya pemilihan umum (Pemilu). Pemilu dianggap sebagai “Satu kriteria penting untuk mengukur kadar demokrasi sebuah sistem politik. Kadar demokrasi sebuah pemerintahan dapat diukur, antara lain, dari ada tidaknya pemilu yang mengabsahkan pemerintahan itu”.<sup>134</sup>

Oleh karenanya pemerintahan Republik Indonesia mengupayakan agar dilakukannya proses demokrasi, yakni Pemilu. Pemilu sebagai alat demokrasi, harus dijalankan dengan “Jujur, bersih, bebas, kompetitif dan adil”.<sup>135</sup> Dalam

---

<sup>134</sup>Seri Penerbitan Studi Politik, *Evaluasi Pemilu Orde Baru, Mengapa 1996-1997 Terjadi Berbagai Kerusuhan ? Menyimak Gaya Politik M. Natsir* (Bandung: Mizan, 1997), h. 14.

<sup>135</sup>*Ibid.*

konteks ini, pemilu benar-benar dijadikan sebagai “Alat ukur yang valid untuk menentukan kualitas demokrasi suatu sistem politik”<sup>136</sup> dari suatu bangsa yang berdaulat.

Untuk merealisasikannya, maka pemerintahan Presiden Soekarno setelah 3 bulan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, mengumumkan rencana akan diadakannya pemilu. Ini disampaikan “Pada tanggal 5 Oktober 1945. Kemudian dalam manifesto politik pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Nopember 1945 sebagai tindak lanjut maklumat No. X”.<sup>137</sup> Kemudian “Pelaksanaan tentang akan diadakannya pemilu ditetapkan dengan pengumuman pemerintah tanggal 3 Nopember 1945”.<sup>138</sup>

Realisasi pengumuman yang dikeluarkan pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 adalah “Keinginan untuk membentuk partai-partai politik, sehingga berlakulah sistem parlementer sekaligus sistem multipartai. Partai-partai tumbuh bagai cendawan di musim hujan banyaknya”.<sup>139</sup> Sesungguhnya partai-partai yang ada di Indonesia sudah berdiri dan berkembang sebelum masa kemerdekaan. Kemudian bertambah banyak setelah Indonesia merdeka, terlebih-lebih lagi dengan dikeluarkannya pengumuman pemerintah yang memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik.

Selanjutnya, pada tanggal 14 Nopember 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah tentang pembentukan “Kabinet Parlementer pertama di bawah pimpinan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri (PM) dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada KNIP sebagai substitut MPR/DPR”.<sup>140</sup> Dalam konteks ini dapat difahami bahwa MPR/DPR pada masa awal kemerdekaan diwakili oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang dipilih mewakili masyarakat sebelum diadakannya Pemilu. Di daerah-daerah dibentuk pula lembaga perwakilan rakyat yang disebut “Komite Nasional Daerah”<sup>141</sup>, walaupun belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

---

<sup>136</sup>*Ibid.*, h. 15.

<sup>137</sup>Katimin, *Politik Islam Indonesia*, h. 91.

<sup>138</sup>*Ibid.*

<sup>139</sup>Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 107.

<sup>140</sup>*Ibid.*

<sup>141</sup>*Ibid.*, h. 111.

Aplikasi dari keputusan pemerintah pada tanggal 3 Nopember 1945, telah ditindak lanjuti pada tahun 1946, dan menurut Katimin mengutip pendapat Herbert Feith telah diselenggarakan beberapa pemilu di daerah-daerah, seperti di “Kediri dan Surakarta”.<sup>142</sup> Akan tetapi, sampai beberapa tahun kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945, upaya untuk menyelenggarakan Pemilu tidak dapat tercapai.

Kondisi ini dikarenakan berbagai hal yang terjadi, diantaranya adanya pergolakan fisik melawan Belanda yang mencoba kembali memasuki Indonesia melalui Agresi I (1947) dan II (1948), pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, pemberontakan-pemberontakan lain yang harus diatasi oleh pemerintahan yang berkuasa, ditambahkan lagi gonjang ganjing politik yang tidak stabil di Indonesia, yang mengakibatkan Pemilu di Indonesia tertunda-tunda.

Secara umum dapat dikemukakan alasan penundaan Pemilu di Indonesia, yakni “Suasana yang masih diliputi ketidakstabilan sosial politik, mayoritas rakyat yang masih buta huruf, dan buta politik, pemilihan umum selain tidak akan berkualitas dan mendapatkan hasil yang diharapkan, juga dikhawatirkan semakin memperburuk keadaan”.<sup>143</sup> Di samping berbagai pertimbangan lain yang menjadi alasan ditundanya Pemilu di Indonesia sampai pada tahun 1952.

Tahun 1952 terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan Indonesia akibat krisis yang terjadi menyangkut masalah ekonomi Indonesia, yang berimbas pada sektor-sektor lain, termasuk adanya gesekan di kalangan militer karena adanya pengurangan pegawai dan tentara. Tepat pada tanggal “17 Oktober 1952 peristiwa yang cukup menggemparkan seluruh tanah airpun terjadi. Sekitar 5000 massa sipil dan militer berdemonstrasi menuntut dibubarkannya parlemen dan dewan perwakilan rakyat sementara (DPRS) serta tuntutan agar segera diadakan pemilihan umum”.<sup>144</sup>

Setelah peristiwa demonstrasi yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952 memberikan pencerahan bagi upaya percepatan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Kabinet Wilopo yang berkuasa mengambil keputusan resmi empat hari

---

<sup>142</sup>Katimin, *Politik Islam Indonesia*, h. 91.

<sup>143</sup>*Ibid.*, h. 93.

<sup>144</sup>*Ibid.*, h. 96.

kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1952, dengan menyerahkan rancangan undang-undang pemilihan umum kepada parlemen, dan disahkan pada tanggal 4 April 1953 menjadi undang-undang pemilu, yang dimaksudkan untuk mempercepat pemilihan umum bagi anggota Dewan Konstituante, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian dinyatakan oleh Katimin.<sup>145</sup>

Setelah mengalami proses dinamika yang cukup panjang, akhirnya pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955. Pemilu dilaksanakan dua kali, yakni “Pemilu untuk membentuk badan perwakilan berlangsung pada tanggal 29 September 1955, dan untuk membentuk Konstituante berlangsung pada tanggal 15 Desember 1955 di bawah kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi)”.<sup>146</sup>

Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1955 dapat disebut sebagai Pemilu dengan “Sistem proporsional murni dengan sistem daftar (list systems). Para pemilih diberi kesempatan secara teoritis untuk memilih tanda gambar atau orang yang ada dalam daftar calon yang diajukan orsospol peserta pemilu dan perorangan”.<sup>147</sup>

Ketika Pemilu tahun 1955 diadakan, partisipasi masyarakat cukup tinggi. Dalam catatan Katimin menyebutkan bahwa “91,54 % rakyat yang turut memberi suara. Dari jumlah tersebut 87,65 % dinyatakan sah. Sebanyak 2,5 % dinyatakan meninggal 12-17 bulan antara waktu pendaftaran dan saat pemilihan umum. Dengan demikian hanya 6 % dari pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih”.<sup>148</sup>

Selama masa kampanye sampai dilaksanakannya Pemilu tahun 1955, telah terjadi gesekan-gesekan di kalangan partai politik peserta Pemilu, terutama antara partai politik berhaluan nasionalis sekuler dengan partai politik nasionalis Islam yang mengakibatkan suasana kebatinan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Peristiwa ini menurut Tobroni dan Syamsul Arifin sebagai

---

<sup>145</sup>*Ibid.*

<sup>146</sup>*Ibid.*, h. 98.

<sup>147</sup>Seri Penerbitan Studi Politik, *Evaluasi Pemilu Orde Baru*, h. 33.

<sup>148</sup>Katimin, *Politik Islam Indonesia*, h. 98.

“Pergumulan antara agama dan politik”<sup>149</sup> yang dikategorikan sebagai pergumulan dengan “Corak dan motif yang berbeda”.<sup>150</sup> Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno di Amuntai (Kalimantan) bahwa:

Negara yang ingin kita susun dan yang kita ingini ialah negara nasional yang meliputi seluruh Indonesia. Kalau kita dirikan negara berdasarkan Islam, maka banyak daerah-daerah yang penduduknya tidak beragama Islam akan melepaskan diri, misalnya Maluku, Bali, Flores, Timor, Kai, dan juga Irian Barat yang belum masuk wilayah Indonesia tidak akan mau ikut dalam republik.<sup>151</sup>

Akibat pernyataan yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno ini mendapat kecaman dan protes dari tokoh-tokoh dan partai politik Islam. Protes dilancarkan karena kapasitas Soekarno bukan hanya dipandang sebagai anggota partai politik semata, tetapi lebih dari itu karena Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang harusnya menaungi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam yang mayoritas. Ucapan Soekarno tersebut dinilai tidak etis dan tidak mencerminkan sikap kenegarawanan.

Salah satu organisasi partai politik yang mengomentari pernyataan Presiden Soekarno adalah Perti. Katimin menjelaskan bahwa “Perti menilai bahwa pidato Presiden tersebut bertendensi adu domba dan menggelisahkan umat Islam, karena menurut wakil Islam ini, dasar negara Republik Indonesia yang akan datang seharusnya diserahkan kepada dewan konstitusional secara demokratis, bukan pada pikiran-pikiran dan pendapat presiden seorang diri”.<sup>152</sup>

Sementara itu PP GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) menegaskan sebagaimana dikatakan Katimin bahwa “Kini Bapak sudah menambah benih-benih separatisme kepada rakyat dan ternyata dengan itu Bapak telah menyatakan memihak kepada golongan rakyat yang tidak setuju dengan golongan Islam”.<sup>153</sup> Dan pada akhirnya, setelah pernyataan tersebut, dinamika suhu politik bangsa Indonesia mengalami peningkatan sampai menjelang diadakannya Pemilu 1955.

---

<sup>149</sup> Arifin, *Islam Pluralisme Budaya*, h. 53.

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 68.

<sup>152</sup> Katimin, *Politik Islam Indonesia*, h. 116.

<sup>153</sup> *Ibid.*, h. 116.

Pemilu tahun 1955 diikuti oleh 34 partai politik, yang terdiri dari 4 partai besar, yakni PNI, Masyumi, NU dan PKI, ditambah partai-partai kecil lainnya. Masyumi dan NU merupakan partai berbasis Islam mewakili sebahagian aspirasi umat Islam. Hasil yang diperoleh dari Pemilu 1955 dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL II<sup>154</sup>  
HASIL PEMILU 1955

Nama Partai	Jumlah Suara	Persentase	Kursi Parleman
PNI	8.434.653	22,3 %	57
Masyumi	7.903.886	20,3 %	57
NU	6.955.141	18,4 %	45
PKI	6.176.913	16,4 %	39
Lain-lain	8.314.705	22.0 %	59
Total	-	100,0 %	257

Hasil Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1955, memberikan gambaran bahwa telah terjadi peningkatan signifikan suara dan kursi yang diperoleh oleh partai politik. Ini dapat dilihat dari pernyataan berikut:

Jumlah kursi yang diperoleh PNI mengalami peningkatan, yaitu dari 42 kursi yang diperoleh di DPRS, menjadi 57 kursi di DPR hasil pemilu, Masyumi juga mengalami penambahan jumlah kursi, dari 44 kursi di DPRS naik menjadi 57 kursi di DPR. PKI mengalami jumlah kursi yang cukup signifikan, dari 17 kursi yang diperoleh di DPRS, naik menjadi 39 kursi di DPR. Hal yang sama juga dialami oleh NU, dari 8 kursi yang diperoleh di DPRS, menjadi 45 kursi di DPR, suatu kenaikan yang fantastik.<sup>155</sup>

Apabila dicermati secara mendalam umat Islam dan partai politik Islam sesungguhnya hampir dapat memenangkan hasil Pemilu 1955, andai saja antara Masyumi dan NU bisa bergandengan tangan dan bekerja sama. Tetapi hal itu tidak terjadi, malah akibat konflik yang tajam diantara keduanya menyebabkan NU harus keluar dari Masyumi dan mendirikan partai politik sendiri. Ketika Pemilu 1955 keduanya malah berseberangan dalam haluan politiknya. Katimin menjelaskan bahwa “NU yang justeru melirik PNI sebagai mitra koalisinya”.<sup>156</sup>

<sup>154</sup>*Ibid.*, h. 102.

<sup>155</sup>*Ibid.*, h. 101.

<sup>156</sup>*Ibid.*

Akibatnya kabinet Parlemerter yang dikomandoi oleh Burhanuddin Harahap dari Masyumi tidak bisa lagi berkuasa dan harus menyerahkan mandatnya kepada DPR hasil Pemilu 1955. Di samping itu, Pemilu 1955 menciptakan “Polarisasi antara partai-partai non agama dengan partai-partai yang berazaskan agama (Islam)”.<sup>157</sup>

Setelah Pemilu tanggal 29 September 1955 diadakan yang dimaksudkan untuk memilih anggota perwakilan rakyat, maka pada tanggal 15 Desember dilakukan Pemilu untuk membentuk Badan Konstituante, atau semacam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada lembaga Konstituante ini jumlah anggota yang ditetapkan sebanyak dua kali lipat dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berjumlah 257 orang. Dengan demikian, jumlah anggota Konstituante sebanyak 514 orang.

Sebanyak 34 partai politik yang ikut serta Pemilu 1955, dari 514 kursi anggota Konstituante, dibagi kepada tiga kelompok besar berdasarkan ideologi yang diusung, yakni: “Kelompok pertama adalah golongan Pancasila yang mengajukan Pancasila sebagai dasar negara. Kelompok kedua adalah golongan Islam yang mengajukan Islam sebagai dasar negara. Kelompok ketiga adalah golongan sosial-ekonomi yang mengajukan ekonomi sosialis dan demokrasi sesuai dengan pasal 33 dan Pasal 1 dari UUD 1945 sebagai dasar negara”.<sup>158</sup>

Khusus bagi partai politik Islam memperoleh 230 kursi di Kontituante dengan jumlah partai politik sebanyak 7 partai, yakni:

TABEL III<sup>159</sup>  
PEROLEHAN KURSI TIGA KELOMPOK  
IDEOLOGI DI KONSTITUANTE

No	Nama Fraksi	Jumlah Kursi
II	Kelompok Islam	
1	Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)	112
2	NU (Nahdatul Ulama)	91
3	PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia)	16
4	Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah)	7

<sup>157</sup>*Ibid.*

<sup>158</sup>*Ibid.*, h. 104.

<sup>159</sup>*Ibid.*, h. 106.

5	PPTI	1
6	Gerakan Pilihan Sunda	1
7	Pusat Penggerak Pencalonan L.E.Idrus Effendi Sulawesi Selatan	1
	Jumlah	230

Dari tujuh partai politik Islam, maka Masyumi merupakan pemilik kursi yang cukup besar, disusul oleh NU, PSII, dan Perti, ditambah perwakilan partai-partai kecil lainnya. Namun, ternyata, jumlah kursi yang diperoleh partai politik Islam yang cukup besar ini tidak mampu mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sidang-sidang konstituante. Hal ini dilatar belakangi beragamnya partai politik Indonesia, tidak adanya mayoritas jumlah partai politik, serta tidak dapat diambil keputusan karena tidak mampu mengakomodir 2/3 jumlah suara yang ada di Konstituante, sehingga sebuah undang-undang tidak dapat disahkan.

Salah satu contoh konkrit, seperti dijelaskan Inu Kencana Syafiie berikut ini:

Ketika Konstituante mengadakan pemungutan suara untuk mengetahui di terima atau tidaknya kembali UUD 1945, yang berturut-turut dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Mei 1959, Senin 1 Juni 1959 dan Selasa 2 Juni 1959. Tetapi hasil pemungutan suara yang diselenggarakan tersebut menunjukkan bahwa dukungan suara yang diperlukan (minimal 2/3 jumlah anggota) tidak diperoleh. Walaupun sebenarnya jumlah suara yang masuk lebih banyak menyetujui untuk kembali pada UUD 1945.<sup>160</sup>

Akhirnya, karena adanya perbedaan-perbedaan yang tajam dalam sidang-sidang Konstituante mengenai dasar negara dan kembali atau tidaknya negara ke UUD 1945, sehingga tidak dapat mengambil keputusan, maka “Konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada bulan Juli 1959 dalam usahanya menciptakan tatatan politik baru yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin”.<sup>161</sup>

Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan keputusan “Presiden menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar

<sup>160</sup>Syafiie, *Ilmu Politik*, h. 112.

<sup>161</sup>Katimin, *Politik Islam Indonesia*, h. 108.

1945”.<sup>162</sup> Melalui sikap yang diambil oleh Presiden menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan yang terjadi di parlemen sesungguhnya sudah muncul di luar ruang sidang Konstituante itu sendiri, dan berakar sejak awal menjelang kemerdekaan Indonesia, di antara kelompok nasionalis sekuler dan kelompok nasionalis Islam.

Setelah peristiwa Pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1955 sampai tahun 1959, belum ada rencana pemerintahan Presiden Soekarno untuk menyelenggarakan kembali pemilihan umum. Presiden Soekarno bahkan berfikir bahwa bentuk pemilu dianggap sebagai demokrasi ala Barat yang harus ditinggalkan.

Melalui sistem Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno menegaskan bahwa “Demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara Indonesia. Prosedur pemungutan suara, dalam lembaga perwakilan rakyat dinyatakan sebagai tidak efektif dan Bung Karno kemudian memperkenalkan apa yang kemudian disebut dengan “Musyawarah untuk mufakat”.<sup>163</sup> Prinsip demokrasi yang dimaksudkan melalui istilah ini adalah “Demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan satu orang”.<sup>164</sup>

Selain itu, Presiden Soekarno sebagai pemimpin tertinggi bangsa, serta yang mengkomandoi sistem demokrasi terpimpin menegaskan bahwa “banyaknya partai-partai politik oleh Bung Karno disebut sebagai salah satu penyebab tidak ada pencapaian hasil dalam pengambilan keputusan, karena dianggap terlalu banyak debat bersitegang urat leher. Untuk merealisasikan demokrasi terpimpin ini, kemudian dibentuk badan yang dikenal dengan *fron Nasional*”.<sup>165</sup>

Di samping itu, dalam mengakomodir kepentingan pemerintah terhadap partai-partai politik, serta upaya penghayatan terhadap Pancasila, Soekarno menggunakan istilah “Trisila. Kemudian Trisila ini masih dapat diperas menjadi satu unsur utama, yaitu Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan

---

<sup>162</sup>Syafiie, *Ilmu Politik*, h. 112.

<sup>163</sup>*Ibid.*, h. 113.

<sup>164</sup>*Ibid.*, h. 114.

<sup>165</sup>*Ibid.*, h. 113.

Nasakom”.<sup>166</sup> Nasakom adalah perpanjangan makna Nasional, agama dan komunis. Maksudnya, partai-partai politik yang diakomodir pemerintahan Soekarno adalah berasal dari unsur partai-partai berhaluan Nasional, berbasis agama, dan berazaskan komunis.

Dengan istilah Nasakom ini, maka “Partai komunis mendapat posisi dominan, karena merupakan salah satu dari tiga unsur utama di samping partai-partai agama yang ada di Indonesia dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Begitu pentingnya Nasakom sehingga mendapat tempat dalam peraturan pemerintah daerah, yaitu UU No. 18 Tahun 1965”.<sup>167</sup>

Penjelasan dari undang-undang yang dibuat tersebut menegaskan bahwa “Bagaimanapun keadaan anggota parlemen di daerah, unsur Nasakom harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, bila di suatu Daerah hanya ada seorang tokoh PKI, namun ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi salah satu anggota DPR Daerah tersebut”.<sup>168</sup>

Dengan demikian, pada masa Demokrasi Terpimpin ini PKI berhasil mempertahankan dirinya sebagai salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan dalam sistem kepartaian Indonesia. Apalagi, pemerintahan Presiden Soekarno membuka ruang yang luas kepada PKI untuk bekerjasama dalam mengambil berbagai keputusan eksekutif.

Dalam menyikapi sistem Demokrasi Terpimpin, kekuatan politik Islam terbagi kepada dua kelompok, yakni yang menolak dan yang mendukung. Amiruddin menjelaskan bahwa:

Kelompok *pertama*, Masyumi, menilai bahwa sistem Demokrasi Terpimpin otoriter. Sistem demikian, menurut Masyumi merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran Islam.

Sikap penentangan tokoh utama Masyumi di atas cukup memiliki resonansi di kalangan para pemimpin politik Islam. Sikap penolakan untuk bergabung dengan sistem Demokrasi Terpimpin juga diperlihatkan oleh sebahagian tokoh-tokoh NU, kendati sebagian besar di antara mereka menerima. KH. A. Dahlan dan H. Imron Rosyadi memilih bergabung di dalam Liga Demokrasi bersama-

---

<sup>166</sup>*Ibid.*, h. 114.

<sup>167</sup>*Ibid.*

<sup>168</sup>*Ibid.*

sama sejumlah tokoh Masyumi, PSI dan beberapa tokoh partai yang menentang sistem Demokrasi Terpimpin lainnya.

Kelompok *kedua*, yang menerima, NU, PSII dan Perti yang bergabung dalam Liga Muslimin, menilai dukungan terhadap sistem ini sebagai sikap yang realistis dan pragmatik.<sup>169</sup>

Akibat penolakan yang dilakukan oleh Masyumi maupun PSI, keduanya dibubarkan oleh Presiden Soekarno, dengan alasan karena “Keterlibatan sejumlah pemimpin mereka dalam pemberontakan PRRI dan Permesta”.<sup>170</sup> Tak lama kemudian, pecah pemberontakan G30S/PKI pada tanggal 30 September 1965, yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Presiden Soekarno, dan beralihnya kekuasaan kepada Letjend. Soeharto melalui suatu keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966, yakni “Surat Perintah (Supersemar), dari Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS Soekarno.

Hari-hari berikutnya Soeharto berhasil menandatangani keputusan membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI)”.<sup>171</sup> Selanjutnya pada “Tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS yang dipimpin DR. A.H. Nasution menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 27 Maret 1968, beliau resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua setelah Ir. Soekarno”.<sup>172</sup>

## **2. Eksistensi Partai Islam (PPP) Pada Pemilu di Masa Orde Baru (1966-1998)**

Beralihnya kekuasaan negara dari Soekarno kepada Soeharto, maka berganti pula orde pemerintahan dari Orde Lama menjadi Orde Baru. Di awal pemerintahan Orde Baru, hubungan harmonis terjalin antara umat Islam (partai politik Islam) dengan pemerintah yang berkuasa, dan mendapat dukungan militer. Tetapi selang beberapa tahun kemudian terjadi gesekan antara penguasa dengan partai politik Islam. Hal ini dapat dilihat dari dua kategori pokok, yakni:

(1) Pertentangan politik partisan, dan (2) Pertentangan terkait dengan isu-isu kebijakan publik. Konfrontasi yang masuk dalam klasifikasi pertama

---

<sup>169</sup> Amiruddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaann di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 61-62.

<sup>170</sup> Syafiie, *Ilmu Politik*, h. 135.

<sup>171</sup> *Ibid.*, h. 115.

<sup>172</sup> *Ibid.*

adalah ketegangan soal tidak diizinkan berdirinya partai-partai Islam oleh negara, seperti: rehabilitasi Masyumi, Kongres Umat Islam Indonesia (KUII), berdirinya Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII), dan sejenisnya. Termasuk juga, persaingan tajam antara Golkar dengan partai-partai Islam dalam Pemilu 1971 sampai 1982, dimana dalam persaingan tersebut selama masa kampanye acapkali diwarnai bentrokan-bentrokan fisik. Sedangkan konfrontasi yang masuk kategori kedua, antara lain; masalah RUU Perkawinan 1973, Aliran Kepercayaan dalam GBHN (SU MPR 1978), masalah perjudian (Porkas, SDSB), larangan libur sekolah di bulan Ramadhan, dan sebagainya.<sup>173</sup>

Penjelasan lain yang menggambarkan retaknya hubungan partai politik Islam dengan penguasa Orde Baru masa pemerintahan Presiden Soeharto dapat dilihat melalui pernyataan berikut:

Setelah Orde Baru berhasil menguasai keadaan, dukungan umat Islam kurang begitu diperhatikan, seperti yang dialami oleh Mohammad Roem dan Mohammad Natsir. Mohammad Roem sebagai seorang negarawan yang besar jasanya kepada bangsa dan Negara ditolak sebagai ketua Parmusi (Partai Muslim Indonesia) yang merupakan difusi dari beberapa partai Islam yang berhaluan moderat dan modernis.

Seandainya waktu itu Mohammad Roem di terima, Orde Baru sebenarnya akan memperoleh dukungan dari golongan Islam moderat berhaluan modern dan diperkirakan dapat menampilkan citra Islam yang dapat di terima secara nasional. Sikap pemerintah yang sulit dimengerti ini ditambah lagi dengan upaya pemerintah memasukkan bekas-bekas pimpinan PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan Murba dalam kabinet dan pemerintahannya sebagai bagian dari partai yang telah dibubarkan bersama Masyumi.

Sementara itu tokoh-tokoh Masyumi tetap tidak dilibatkan dan bahkan usaha untuk merehabilitasi Masyumi juga tidak diperbolehkan.<sup>174</sup>

Dengan adanya gesekan-gesekan yang terjadi antara partai politik Islam dengan penguasa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, menyebabkan partai politik Islam mengambil jarak. Termasuk melakukan perlawanan dalam setiap kegiatan Pemilu, dimana pemerintahan yang berkuasa di dukung oleh Golkar dan Militer atau ABRI.

Masa pemerintahan Orde Baru dilangsungkan beberapa kali pemilihan umum (Pemilu). Hal ini dimulai dari tahun 1971, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1971. Peserta Pemilu yang mengikuti adalah “Golkar, PNI, NU, Partai Katholik,

---

<sup>173</sup> Amiruddin, *Kekuatan Islam*, h. 60.

<sup>174</sup> Arifin, *Islam Pluralisme Budaya*, h. 54.

Murba, PSII, IPKI, Parkindo, Parmusi, dan Perti”.<sup>175</sup> Setelah Pemilu tahun 1971 dilaksanakan, pemerintahan yang berkuasa melakukan penyederhanaan partai politik pada tahun 1973 dengan program fusi. Dalam hal ini partai-partai politik selain Golkar difusikan menjadi dua, yakni berbasis agama dan berbasis nasional, yakni “PPP (gabungan partai-partai Islam) dan PDI (gabungan partai-partai Kristen ditambah PNI, Murba, dan IPKI)”.<sup>176</sup>

Secara formal bagi partai politik Islam hal ini dinilai positif karena “Seluruh kekuatan politik Islam terintegrasi dalam satu wadah partai, namun secara substansial friksi justru kembali muncul, yang puncaknya tercermin dari langkah NU menggembosi PPP”.<sup>177</sup> Akibatnya terjadi penurunan suara PPP pada Pemilu yang diadakan pada tahun 1977, yakni tanggal 2 Mei 1977.

Kemudian, pada Pemilu yang diadakan pada tanggal 4 Mei 1982 tidak banyak perubahan yang mencolok dan Golkar menjadi pemenang Pemilu sejak tahun 1971. Pada Pemilu yang diadakan pada tanggal 23 Mei 1987, para peserta pemilihan umum yang selama ini mempunyai ciri-ciri tersendiri seperti “Ciri-ciri keislaman (untuk PPP), demokrasi kebangsaan (untuk PDI) dan kekaryaan (untuk Golkar) ditetapkan agar hanya mempergunakan satu-satunya azas, yaitu Pancasila”.<sup>178</sup>

Oleh karenanya lambang partai harus didasarkan kepada Pancasila. Untuk itu PPP diharuskan merubah lambang partai dari berlambang Ka’bah menjadi gambar Bintang segi lima, sesuai dengan sila pertama Pancasila. Hal ini terus berlanjut sampai kepada Pemilu tahun 1992, yang diadakan pada tanggal 9 Juni 1992, dan hasilnya tetap dimenangkan oleh Golkar.

Selama Pemilu di Indonesia dari tahun 1971 sampai 1992, maka Golongan Karya memenangkan Pemilu secara mutlak. Dan di DPR, Golkar bekerjasama dengan ABRI, sehingga memegang kekuasaan penuh untuk mengambil keputusan untuk diaplikasikan dalam kebijakan pemerintah. Untuk mengetahui hasil Pemilu masa Orde Baru dari tahun 1971-1992 dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>175</sup>Syafiie, *Ilmu Politik*, h. 135.

<sup>176</sup>*Ibid.*

<sup>177</sup>Mashad, *Akar Konflik*, h. 15.

<sup>178</sup>Syafiie, *Ilmu Politik*, h. 135.

TABEL IV<sup>179</sup>

## HASIL PEMILU-PEMILU ORDE BARU

Tahun	PPP		Golkar		PDI	
	Suara	Kursi	Suara	Kursi b	Suara	Kursi
1971	27,11	26,67	62,80	65,56	10,09	8,33
1977	29,29	27,50	62,11	64,44	8,60	8,06
1982	27,78	23,50	64,34	60,50	7,88	6,00
1987	15,97	15,25	73,16	74,75	10,89	10,00
1992	17,00	15,50	68,10	70,50	14,90	14,00

Tahun 1997, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1997, diadakan kembali Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat. Pada Pemilu tahun 1997 agak berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya karena adanya tuntutan agar penyelenggaraan Pemilu diluruskan kembali kepada fungsi sebenarnya, yakni “Menciptakan pemerintahan yang representatif (*refresentative government*) melalui proses yang jujur dan bersih”.<sup>180</sup> Namun hasilnya tetap memenangkan Golkar sebagai partai berkuasa, yang kembali mengukuhkan Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Ada hal istimewa yang patut dicermati pada Pemilu tahun 1992 sampai 1997, yakni terjadinya perubahan sikap pemerintah terhadap umat Islam. Pemerintahan Soeharto sedikit melunak dan memberikan perhatian terhadap eksistensi umat Islam. Hal ini ditandai dengan dibebaskannya beberapa tahanan politik yang menyuarakan aspirasi umat Islam.

Selanjutnya mengupayakan mengakomodir kepentingan umat Islam, dengan membentuk lembaga keuangan berbasis syari’ah, seperti Bank Muamalat Indonesia, mendirikan rumah sakit Islam, seperti RS. Haji di beberapa tempat, memberikan perhatian terhadap lembaga pendidikan agama, mendirikan mesjid-mesjid, dan mensyi’arkan kegiatan-kegiatan keagamaan di bulan Ramadhan dengan meluncurkan program kegiatan “Pesantren Kilat Nasional” di seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia.

<sup>179</sup> Seri Penerbitan Studi Politik, *Evaluasi Pemilu Orde Baru*, h. 19.

<sup>180</sup> *Ibid.*, h. 13-14.

Hal yang tak kalah pentingnya adalah lahirnya lembaga pemantau atau pengawas pemilu yang dipelopori oleh beberapa aktivis, yakni: “KIPP (Komite Independen Pengawas Pemilu) yang melibatkan banyak aktivis semacam Nurcholis Madjid dan Goenawan Muhammad. KIPP diharapkan oleh para fungsionarisnya mampu turut serta mewujudkan proses pemilu secara *luber dan jurdil*”.<sup>181</sup> Namun hasilnya, KIPP tidak bisa berbuat banyak, bahkan di beberapa daerah mendapat tandingan.

Mencermati fenomena-fenomena Pemilu yang dilakukan oleh Orde Baru sejak tahun 1971 sampai 1997, secara perlahan namun pasti, berupaya menarik perhatian umat Islam, mengalihkan suara umat Islam dari partai politik Islam kepada partai penguasa (Golkar), membentuk organisasi-organisasi yang berbasiskan umat Islam dengan maksud agar mendapat simpati dari kalangan Islam. Contohnya adalah membentuk “GUPPI, Satkar Ulama, Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Tharekat Islam. Selain itu, rezim Orde Baru juga membentuk Majelis Dakwah Islamiyah (1978) serta Organisasi Dakwah Wanita Golkar Al-Hidayah (1979)”.<sup>182</sup>

Setelah pelaksanaan Pemilu tahun 1997, terjadi perubahan yang tak terduga pada sistem ketata negaraan bangsa Indonesia, gonjang ganjing dan huru-hara politik tiba-tiba menyeruak membahana di muka bumi persada Indonesia. Tuntutan agar Indonesia melakukan peralihan kepemimpinan terus bergulir, di samping tuntutan untuk melakukan perbaikan sistem perpolitikan bangsa Indonesia.

Selain itu pula, gejala ekonomi global (dunia) ikut mempengaruhi keadaan ekonomi bangsa Indonesia. Nilai tukar rupiah mengalami penurunan yang tajam terhadap dolar Amerika Serikat. Terjadi inflasi dimana-mana, yang mengakibatkan terjadi PHK besar-besaran pada semua sektor pekerjaan. Akibatnya pengangguran tercipta dengan sendirinya. Ketidak stabilan ekonomi dan politik ini mengharuskan pemerintah mengambil sikap yang bijaksana untuk mengatasinya.

---

<sup>181</sup>Bambang Cipto, *Duel Segitiga PPP Golkar PDI Dalam Pemilu 1997* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h. vi.

<sup>182</sup>Mashad, *Akar Konflik*, h. 16.

Upaya demi upaya terus dilakukan, namun hasilnya tetap tidak membawa perubahan. Di sisi lain, tuntutan yang demikian deras dari seluruh elemen masyarakat yang menghendaki Soeharto turun dari kursi kepresidenan, terutama dari kalangan aktivis perubahan dan mahasiswa, semakin keras dan tajam didengarkan. Pemerintah bersama DPR serta militer berupaya meredam aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan secara terus menerus sejak selesai Pemilu tahun 1997.

Namun upaya pencegahan yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Selain itu, upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto kepada mahasiswa dan aktivis dengan melakukan dialog untuk mencari solusi penyelesaian masalah yang dialami oleh bangsa Indonesia, ternyata tidak mampu meredam keinginan seluruh lapisan masyarakat agar pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto selama lebih kurang 32 tahun tidak lagi dilanjutkan, alias menginginkan Soeharto harus turun dari tahta kepresidenan.

### **3.Eksistensi PPP Pada Pemilu di Masa Orde Reformasi (1998 sampai sekarang)**

Tepat pada tanggal 21 Mei 1998, jam 10.00 WIB, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan mandatnya untuk diteruskan oleh Wakil Presiden BJ. Habibie. Peralihan masa kepemimpinan dari Soeharto ke BJ. Habibie, maka Indonesia memasuki masa Orde Reformasi. Yakni sebuah orde, masa atau keadaan yang memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses demokrasi Indonesia.

Tidak ada upaya pembatasan yang mengekang kebebasan masyarakat, terutama kebebasan berkumpul, berserikat, atau mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28. Menyahuti hal ini, pemerintahan BJ Habibie, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk partai politik, asal sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian, BJ. Habibie menjanjikan untuk menyelenggarakan Pemilu secepat-cepatnya.

Langkah awal yang dilakukan adalah mengupayakan perbaikan sistem Pemilu dilakukan untuk memperbaiki sistem Pemilu sebelumnya, yakni menyiapkan UU di bidang politik. Undang-Undang yang diperbaiki tersebut diupayakan mengembalikan semangat demokrasi pluralistik dengan sistem penyelenggaraan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Tepat pada bulan Januari 1999 UU Pemilu selesai, yang terdiri dari UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 terdiri dari UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik. Undang-Undang ini membatalkan UU sebelumnya, yakni UU No. 3 Tahun 1975, yang melakukan penyederhaan partai politik. Untuk konteks Orde Reformasi, UU No. 3 Tahun 1975 sudah tidak relevan lagi.

Dengan adanya UU No. 2 Tahun 1999 memberi kesempatan kepada segenap lapisan masyarakat untuk mendirikan berbagai partai politik, termasuk mendirikan partai politik berbasis Islam. Partai politik Islam ketika masa Orde Baru hanya didominasi oleh PPP, terpecah dan terurai menjadi beberapa partai politik Islam. Termasuk orang-orang yang selama masa Orde Baru berkumpul di berbagai partai politik non Islam, seperti PDI dan Golkar, menarik diri dan mencoba bergabung ke dalam partai politik Islam, atau mendirikan sendiri partai politik Islam.

Kenyataan ini sejalan dengan pernyataan Dhuroruddin Mashad bahwa: “Ketika Orde Baru yang dasar politiknya sangat fobi pada Islam Politik tumbang, maka sebagian elit politik Islam yang di masa Orde Baru berpolitik pragmatis, menghindari sikap politik martir. Mereka akhirnya kembali menampilkan wajah aslinya sebagai Islam Politik, menampilkan partai politik Islam dengan segala variannya”.<sup>183</sup>

Tepat pada tanggal 7 Juli 1999, diselenggarakanlah Pemilu dengan sistem multi partai, yakni diikuti sekitar 48 partai politik. Untuk pemilu di era reformasi dimenangkan oleh PDI-P (PDI Megawati Soekarno Putri), diikuti Golkar dan

---

<sup>183</sup>*Ibid.*, h. 99.

partai-partai lainnya. Dari 48 partai politik, hanya beberapa partai politik Islam yang berhasil menempatkan wakil-wakilnya lembaga legislatif, yakni PPP, PKB, PBB, PK, ditambah partai-partai kecil. Namun sayang, partai-partai politik Islam juga tidak mampu menempatkan diri sebagai *win of party demokrasi* (pemenang pada pesta demokrasi) di Pemilu pertama era reformasi.

Daya tarik partai politik Islam tidak mempengaruhi pilihan masyarakat, padahal kalau dilihat jumlah penduduk dan pemilih dari warga negara Indonesia pada Pemilu tahun 1999 tercatat sebanyak “209.389.000 jiwa dan sebanyak 116.254.217 orang tercatat sebagai pemilih”.<sup>184</sup> Jumlah ini memang lebih rendah dari Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1997 yang mencapai sekitar “124 juta”<sup>185</sup> jiwa.

Alasan krusial penyebab rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut memilih karena pendeknya waktu untuk mempersiapkan Pemilu, belum siapnya pemilih dan petugas pendaftaran pemilih menghadapi sistem pendaftaran aktif. Dan paling tidak ada tiga propinsi yang sedang dilanda kerusuhan lokal, seperti Aceh, Kalimantan Barat, dan Maluku.

Hasil Pemilu 1999 menempatkan 500 orang untuk duduk di DPR mewakili dari berbagai basis partai politik. Tetapi, hasil yang diperoleh partai politik Islam pada Pemilu 1999 sungguh sangat mengecewakan, yakni hanya memperoleh 78 kursi saja yang diwakili oleh PPP sebanyak 58 kursi, PBB sebanyak 13 kursi, dan PK sebanyak 7 kursi. Jika dipersentasekan jumlah kursi yang diperoleh partai politik Islam hanya mencapai 16 %. Kondisi ini tentu saja kurang representatif dari keseluruhan jumlah umat Islam yang ada di Indonesia, mayoritas beragama Islam.

Sementara itu, di Sumatera Utara, untuk DPRD Sumut, dari hasil Pemilu 1999, partai-partai politik berbasis Islam hanya diwakili oleh PPP dengan 8 kursi, PBB dengan 1 kursi, PK dengan 1 kursi, serta Masyumi dengan 1 kursi. Sementara itu partai politik Islam lainnya tidak mendapatkan kursi. Kondisi ini juga amat memprihatinkan, sehingga putus harapan umat Islam untuk menegakkan syari'at Islam sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dari

---

<sup>184</sup>DPP Partai Bulan Bintang, *Political Mapping*, Musyawarah Kerja Nasional II DPP PBB, Anjer-Banten, 14-17 September 2001, h. 3.

<sup>185</sup>*Ibid.*, h. 12.

tingkat Nasional sampai ke daerah yang harus diperjuangkan melalui anggota-anggota legislatifnya.

UU Pemilu No. 2 Tahun 1999 menetapkan bahwa setiap peserta pemilu harus melewati *Electoral Threshold* (ambang batas) 2 % agar dapat menjadi peserta pemilu berikutnya. Hasil Pemilu tahun 1999 menetapkan 6 partai saja yang dinilai telah mencapai *Electoral Threshold* (ambang batas) 2 %, dan berhak mengikuti Pemilu berikutnya, yakni PDI-P, Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PBB.

Dari keenam partai politik tersebut, hanya 2 partai politik Islam, yakni PPP dan PBB yang lolos ambang batas 2 % (*Electoral Threshold*). Sementara itu, Partai Keadilan (PK), walau masuk dalam kelompok tujuh besar pada Pemilu 1999, namun karena tidak mencapai 2 %, harus rela mengganti nama dengan sebutan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Begitu juga dengan Partai Nahdhatul Ummat (PNU) berganti nama dengan sebutan Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Proses Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 5 April 2004. Kalau Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik, maka pada Pemilu 2004 diikuti sekitar 24 partai politik hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Pusat. Dengan demikian, berkurang setengah (50 %) dari Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1999.

Dari 24 partai politik peserta Pemilu tahun 2004, ada 5 partai politik yang berazaskan Islam, diantaranya PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PBB (Partai Bulan Bintang), Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Masing-masing partai politik Islam ini mewakili seluruh lapisan umat Islam dengan berbagai corak pemikiran dan aliran.

Khamimi Zada<sup>186</sup> menjelaskan bahwa kelima partai politik Islam itu mewakili tiga aliran Islam yang berkembang di Indonesia. PPP, PBR dan PPNUI mewakili kelompok Islam tradisional (NU). Sementara itu, PBB mewakili kelompok Masyumi yang mengaku sebagai pewaris sahnya Masyumi. Sedangkan

---

<sup>186</sup>Khamimi Zada, *Partai Islam dan Pemilu 2004*, (Jakarta: Kompas, Jum'at, 19 Desember 2003).

PKS mewakili generasi Islam baru yang memiliki basis kader muda di kampus-kampus, dengan format Islam modernis, yang diakomodir juga dari basis partai politik berbasis Nasional seperti PAN.

Saluran aspirasi umat Islam sesungguhnya tidak hanya kepada beberapa partai politik Islam saja. Tetapi juga memasuki kantong-kantong partai nasionalis dan sekuler, seperti PDI-P dan Golkar. Kemudian, ada yang memiliki sikap politik yang moderat dan radikal, seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, serta Majelis Mujahiddin.

Apabila dilakukan perbandingan, akan kelihatan secara nyata bahwa terjadi penurunan secara drastis peserta pemilu dari kelompok partai politik Islam ketika tahun 1999 sampai 2004. Jika pada Pemilu tahun 1999 partai politik Islam yang ikut sebanyak 11 partai, tetapi pada Pemilu 2004 hanya tinggal 5 partai saja. Sesungguhnya kunci utama penurunan suara dan lemahnya peran partai politik Islam dalam kancah Pemilu Nasional adalah kurangnya kesadaran untuk menyatukan visi dan misi, maupun orientasi untuk membawa aspirasi umat Islam.

Di samping itu, menurut hemat penulis, adanya sikap *egosentris* partai politik Islam, yakni sikap merasa hanya partainya saja yang mampu menyahuti dan mengakomodir aspirasi umat Islam, dan mengenyampingkan partai-partai politik Islam lainnya. Padahal masyarakat di tingkat *grassrout* (akar rumput) sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan peran dan sepak terjang partai politik, baik berbasis nasionalis-sekuler, maupun berbasis Islam. Semoga kiranya ke depan partai politik Islam bisa memahami masalah-masalah ini, dan mampu berjaya untuk pelaksanaan pemilu-pemilu berikutnya.

### **BAB III**

#### **PERKEMBANGAN PPP DALAM SKALA NASIONAL**

##### **E. Sejarah Awal Pembentukan PPP**

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai politik berbasis Islam yang muncul di masa awal kekuasaan Soeharto, hasil fusi beberapa partai politik Islam, tepatnya ketika MPR hasil Pemilu tahun 1971 yang memutuskan bahwa untuk Pemilu berikutnya hanya akan diikuti oleh tiga partai politik. Mengenai hal ini, Amiruddin mengatakan bahwa “Negara memandang perlu meneruskan pengendalian partai politik melalui penyederhanaan jumlah partai politik yang telah ada. Menurut Ali Moertopo, langkah penyederhanaan partai dimaksudkan untuk menopang stabilitas politik nasional menghadapi Pemilu. Secara yuridis, pengurangan jumlah partai-partai politik itu sejalan dengan Tap MPR No. XXII/MPRS/1966”.<sup>187</sup>

Rencana penyederhanaan partai politik secara nasional sesungguhnya telah bergulir sebelum dilaksanakannya Pemilu tahun 1971. Ketika itu, Soeharto menghimbau kepada para pemimpin sembilan partai politik dan Golkar (sebelum menjadi partai), agar melakukan pengelompokan (*regrouping*), dari 10 kontestan Pemilu yang ada menjadi tiga kelompok, yakni: “Kelompok pertama adalah kelompok spritual-material, mereka adalah yang menitikberatkan program-programnya pada pembangunan spritual. Kelompok kedua adalah kelompok material–spritual yang menekankan programnya pada pembangunan material. Dan ketiga adalah kelompok karya”.<sup>188</sup> Pengelompokan ini berlanjut dalam pembagian fraksi di DPR.

---

<sup>187</sup> Amiruddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 96.

<sup>188</sup> *Ibid.*, h. 97.

Menyikapi hal ini, partai-partai yang ada pada saat itu tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengikuti keputusan MPR tersebut. Termasuk bagi partai-partai yang berbasiskan dan berazaskan Islam, yang masuk “Kelompok spritual”, yang terdiri dari: NU, Parmusi, PSII, dan Perti”.<sup>189</sup>

Namun upaya pemerintahan Soeharto melakukan pembagian kelompok fraksi dan menyatukan partai politik (fusi) mendapat reaksi yang berbeda-beda dari masing-masing partai-partai Islam. Ada yang bersikap keras dan menolak dengan tegas, dan ada yang bersikap hati-hati, serta ada yang menerima dengan lapang dada, sebagaimana dikemukakan oleh Amiruddin<sup>190</sup> pada penjelasan berikut ini.

Pimpinan Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) hasil kongres 1972, M.CH. Ibrahim dan Bustamam, dengan tegas menolak rencana fusi partai. Mereka sebagai pimpinan pusat PSII malahan mengeluarkan instruksi Nomor 193, 18 Oktober 1972 kepada seluruh wilayah dan cabang PSII seluruh Indonesia untuk melarang menghadiri pertemuan yang akan membicarakan fusi partai-partai. Lebih jauh ditegaskan kepada cabang-cabang dan wilayah yang terlanjur menyetujui fusi diinstruksikan untuk mengundurkan diri.

Sementara itu NU memperlihatkan sikap yang lebih lunak. Pada awalnya NU keberatan terhadap gagasan fusi partai dengan bersandar pada keputusan Mukhtar NU Desember 1971 yang menolak melakukan fusi. Hal ini dikarenakan para pemimpin NU khawatir menjadi minoritas dalam partai yang akan dibentuk. Tetapi akhirnya NU menerima fusi partai, dengan syarat, fusi dalam Persatuan Pembangunan harus berbentuk federasi seperti halnya ketika bergabung dengan Masyumi pada masa rezim Soekarno. Syarat lain yang diajukan adalah; pertama, tetap mempertahankan eksistensi masing-masing parpol Islam. Kedua, susunan pimpinan wadah kerja tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip mayoritas menurut pertimbangan di dalam DPR/DPRD.

Kemudian, respon fusi partai yang positif ditunjukkan oleh Parmusi dan Perti yang sejak semula sudah bersemangat bergabung dalam satu partai Islam

---

<sup>189</sup>*Ibid.*

<sup>190</sup>*Ibid.*, h. 98-99.

baru. Penerimaan mereka terhadap gagasan fusi partai didasarkan pertimbangan normatif, bahwa langkah itu didasarkan atas upaya untuk mempererat semangat ukhuwah Islamiyah.

Setelah melalui negosiasi, musyawarah dan perundingan yang panjang mengenai sistem kepartaian yang baru terbentuk di Indonesia, akhirnya empat partai Islam, yakni NU, Parmusi, PSII dan Perti sepakat untuk melakukan fusi menjadi satu partai, yakni “Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 5 Januari 1973”.<sup>191</sup>

Deklarasi pembentukan partai baru ini ditandatangani oleh KH. Idham Chalid dan KH. Masjkur dari Partai Nahdatul Ulama. HMS. Mintaredja dari Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Anwar Tjokro Amienoto dari Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), dan Rusli Halil dari Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti).<sup>192</sup>

Di awal pendirian PPP, yang menjadi ketua umum adalah KH. Idham Cholid (Ketua PB-NU), dan Majelis Syuro (lembaga yudisial partai) dipimpin oleh KH. Bisri Syansuri (Rois Syuriah PB-NU). Sementara jabatan eksekutif partai diketuai oleh HM. Mintaredja dari MI.<sup>193</sup> Susunan pengurus ini mencerminkan perwakilan dari dua kelompok aliran, yakni kelompok tradisional yang diwakili oleh NU, dan kelompok lebih moderat, yang diwakili MI.

Ketika awal dilakukannya deklarasi pendirian PPP pada tahun 1973 memperlihatkan terjadinya proses tarik menarik antara unsur-unsur partai politik Islam yang berfusi, yakni tetap mempertahankan otonomi organisasi yang berfusi di luar persoalan politik. Persoalan yang menarik untuk dicermati adalah keberadaan perwakilan partai-partai politik Islam yang berfusi di PPP menjadi sumber konflik yang paling potensial bagi partai ini. Kondisi ini akan menyebabkan kemerosotan partai ini di masa depan. Kendati demikian, apabila rekatan kohesi internal PPP dalam kondisi kokoh, partai ini akan menjadi penentu penting agenda politik umat Islam.

---

<sup>191</sup>Mohtar Mas' oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 174.

<sup>192</sup>Hairul Salim HS et all, *Tujuh Mesin Pendulang Suara* (Yogyakarta: Lkis, 1999), h. 238.

<sup>193</sup>Amiruddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, h. 99-100.

Mengenai proses fusi partai-partai politik Islam ke dalam PPP menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus PPP yang menjabat pada awal pembentukan. Hal ini dikritisi oleh seorang pengamat politik yang menyatakan bahwa:

...fusi di PPP cukup unik, masing-masing organisasi tidak melebur menjadi satu sebagaimana yang terjadi di PDI. Hanya aspirasinya saja yang lebur, sedangkan di luar itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Sehingga masing-masing unsur memiliki “dua wajah”: politik dan non politik. Persoalan yang menyelimuti PPP di kemudian hari, antara lain disebabkan oleh sosok seperti itu. Acapkali wajah non politik mempengaruhi wajah politik atau sebaliknya... Tidak tuntas, memang karena secara riil masing-masing bermain politik di PPP.<sup>194</sup>

#### **F. Sepak Terjang PPP Sejak Pembentukan Sampai Menjelang Reformasi 1999.**

Zainal Abidin Amir mengutip pendapat Affan Gaffar mengatakan bahwa berbagai hantaman yang dilancarkan oleh negara Orde Baru terhadap perjalanan partai-partai Islam pada awal berdirinya negara hingga terbentuknya PPP, sebagai penjelmaan dari intervensi negara yang dapat dijelaskan lewat beberapa argumen.

*Pertama*, Intervensi merupakan cerminan paling jelas dari watak otoritarianisme negara Orba. *Kedua*, tentara yang menurut Gaffar komponen utama Orba, menganggap bahwa partai Islam yang terorganisir dengan baik dapat menjadi saingan utamanya. *Ketiga*, pengalaman sejarah menuturkan bahwa partai Islam yang terorganisir dengan baik cenderung memaksa negara untuk memberlakukan hukum Islam sebagai konsitusi nasional.<sup>195</sup>

Pemikiran ini memberi kesan dualisme sikap pemerintah Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto terhadap partai-partai Islam yang sudah diakomodir melalui PPP. Di satu sisi, pemerintahan Soeharto menginginkan agar partai-partai Islam yang bergabung ke dalam PPP agar dapat dikontrol pergerakannya dalam menyampaikan aspirasi anggota partai yang mayoritas adalah umat Islam.

Sementara itu di sisi lain, pemerintah bersama dengan tentara merasa curiga terhadap PPP yang telah difusikan dari beberapa partai-partai Islam, karena dianggap akan menjadi saingan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan

---

<sup>194</sup>Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik, Upaya Mengatasi Kritis* (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984), h. 46-47.

<sup>195</sup>Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 2003), h. 54.

mengembangkan peraturan-peraturan kenegaraan. Hal ini sejalan dengan pernyataan berikut:

Beberapa orang di kalangan ABRI menyarankan pemerintah agar partai-partai Islam jangan disatukan dalam satu partai, karena dikhawatirkan akan menjadi ancaman kekuatan ABRI. Sebab itu, biarkanlah partai Islam terbagi-bagi seperti adanya, paling jauh mereka disatukan dalam bentuk federasi yang longgar. Dengan demikian, kekuatan politik Islam tidak akan menjadi kekuatan yang solid.<sup>196</sup>

Kemunculan PPP secara Nasional pada awal-awalnya cukup vokal dalam mengkritisi berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soeharto. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya para Ulama dengan latar belakang organisasi NU dan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjadi anggota PPP.

Contohnya ketika pemerintahan Soeharto mengeluarkan RUU Perkawinan pada tanggal 31 Juli 1973 untuk disahkan menjadi UU Perkawinan mendapat reaksi yang keras dari berbagai kalangan umat Islam, dan tak kalah pentingnya dari PPP. Sebelum RUU itu dibahas di DPR, sebahagian materinya telah bocor ke media massa, dan diketahui oleh umat Islam. Beberapa pasal dari RUU Perkawinan yang kontroversial itu antara lain:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan seorang pencatat perkawinan .... (Pasal 2 ayat 1).
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 2).
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 tahun (Pasal 7 ayat 1).
4. Perbedaan dikarenakan kebangsaan, kesukuan, tanah asal, agama, kepercayaan dan keturunan bukan merupakan halangan untuk perkawinan (Pasal 11 ayat 2).
5. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu 360 hari, tetapi apabila dia hamil maka waktu tunggu adalah sampai 40 hari setelah kelahirannya (Pasal 12).<sup>197</sup>

Menyikapi RUU Perkawinan ini, anggota DPR RI dari PPP, yakni HM. Yusuf Hasyim mengomentari dengan pedas dan menyatakan bahwa “RUU

---

<sup>196</sup>Kacung Marijan, *Respon NU Terhadap Pembangunan Politik Orde Baru* (Tp, Jurnal Ilmu Politik, 1991), h. 51.

<sup>197</sup>Amiruddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, h. 101.

tersebut bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan pidato kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 1973. Dengan RUU itu minoritas dilindungi mayoritas tidak". Tidak kalah keras komentar umat Islam dari partai lain, yakni dari FK DPR RI, yakni KH. Badruddin Rusli mengatakan bahwa "Alasan umat Islam menolak RUU Perkawinan sudah jelas. Adapun sekiranya saudara-saudara dari agama lain bisa menerima RUU tersebut mungkin karena mendapat banyak untung".<sup>198</sup>

Di samping itu pula umat Islam dari berbagai elemen melakukan penolakan terhadap RUU Perkawinan ini yang dinilai banyak merugikan umat Islam yang mayoritas, dan menguntungkan bagi umat agama lain. Tindakan yang dilakukan adalah dengan unjuk rasa atau demonstrasi ke istana negara dan gedung DPR yang sedang membahas RUU Perkawinan ini.

Akhirnya, pemerintah memberikan respon positif terhadap penolakan yang dilakukan umat Islam dengan melakukan perubahan atau revisi terhadap berbagai rancangan yang diajukan. Dari 73 rancangan pasal yang diajukan, akhirnya disahkan 66 Pasal yang telah mengalami perbaikan, perubahan dan perombakan menyangkut perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, pertunangan dan konsekwensinya, adopsi, prosedur perkawinan serta prosedur perceraian.

Contoh lain adalah ketika Pemilu tahun 1977 akan digelar oleh pemerintahan yang berkuasa. Masing-masing partai politik peserta pemilu harus menyertakan bentuk gambar sebagai lambang partai. PPP hasil fusi beberapa partai politik Islam harus mencari format lambang partai. KH. Bisri Syansuri (Rois Aam PB-NU) mengusulkan lambang PPP dengan gambar Ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam.

Usulan yang dikemukakan oleh KH. Bisri mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk menetapkan Ka'bah sebagai lambang partai. Ketika lambang Ka'bah diajukan sebagai lambang partai ke LPU (Lembaga Pemilu) yang diketuai oleh Mendagri Amir Machmud, ternyata ditolak, dengan alasan bertentangan dengan Pasal 18 UU No. 15/1969 juncto UU 4/1975<sup>199</sup>, dan PPP diminta menggantinya

---

<sup>198</sup> Amiruddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, h. 102.

<sup>199</sup> Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1991), h. 203.

dengan lambang yang lain. Tetapi, PPP bersikeras agar Ka'bah menjadi lambang partai. Setelah diadakan lobi dan tiga kali pertemuan formal, akhirnya ketua LPU (Mendagri) bersedia untuk menerimanya.

Setelah disahkannya gambar Ka'bah sebagai lambang PPP, maka dalam berbagai kampanye yang digelar PPP mendapat sambutan dari umat Islam. Bantuan pun mengalir secara spontan, baik materi maupun immaterial. Selain itu, kampanye menjelang Pemilu tahun 1977 mendapat dukungan yang luas dari para pemimpin politik Islam, diantaranya para mantan pemimpin Masyumi, seperti Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, dan Burhanuddin Harahap. Kemudian, dari tokoh-tokoh populer, seperti Nurcholis Madjid dan Rhoma Irama, PPP juga mendapat dukungan penuh.

Selama masa menjelang Pemilu tahun 1977, gejolak politik secara nasional begitu kuat. Pertentangan dan persaingan antara PPP sebagai basis kekuatan politik umat Islam dengan penguasa (Golkar dan ABRI) begitu tajam. Pemerintahan Soeharto berusaha meredam pergerakan politik PPP dengan melakukan berbagai tekanan dan intimidasi, perlawanan slogan dan sebagainya. Isu-isu ekstrim dilancarkan untuk melemahkan dukungan masyarakat (umat Islam) kepada PPP. Hal ini disebabkan pemerintah beranggapan bahwa PPP merupakan lawan saingan berat bagi Golkar, dibandingkan dengan PDI yang berhaluan nasionalis.

Landasan pemikiran yang dapat dikemukakan karena sejak Soekarno meninggal dunia dan hancurnya kekuatan PKI, secara otomatis mempengaruhi hawa komunitas nasionalisme anggotanya yang melemah. Kharisma Soekarno sebagai satu-satunya tokoh kharismatik membius di kalangan anggota partai nasionalis. Dengan demikian, ketika Soekarno tidak ada, maka tidak ada lagi yang mampu menggantikan perannya. Kondisi ini memperlemah basis kekuatan nasionalisme di akar rumput (*grassrout*).

Sementara itu, PPP sendiri tidak berfokus pada satu tokoh sentral semata yang menjadi ikutan. Begitu banyak para Ulama dan tokoh-tokoh Islam yang dapat dijadikan rujukan bagi pergerakan kebangkitan Islam dalam

memperjuangkan aspirasi umat Islam menghadapi tekanan dari pemerintahan Orde Baru.

Secara tidak sengaja, fusi yang dilakukan pemerintahan Orde Baru terhadap partai-partai Islam menjadi PPP memberikan keuntungan besar bagi umat Islam, antara lain:

*Pertama*, walaupun pemerintah mengupayakan pra kampanye terbaik, PPP dengan jelas tetap diidentifikasi sebagai partai Islam.

*Kedua*, PPP memperoleh sebahagian besar struktur kader NU, satu-satunya partai yang mampu menahan serangan gencar Golkar pada 1971.

*Ketiga*, fusi partai menghasilkan keberuntungan tak sengaja, karena menjadi lebih mudah menyatukan seluruh umat Islam di belakang partai dan tanda gambar Ka'bahnya dibandingkan tahun 1971 ketika ada partai Islam, dimana NU dan Parmusi kerap kali terlibat konflik.<sup>200</sup>

Hasil akhir dari Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1977 menempatkan PPP pada urutan kedua dengan jumlah suara 18.743.491 (99 kursi DPR), setelah Golkar yang memperoleh jumlah suara sebanyak 38.750.096 (232 kursi DPR). Dan PDI menempati urutan ketiga dengan jumlah suara sebanyak 5.504.757 (29 kursi DPR).

Setelah Pemilu tahun 1977 dilangsungkan dengan penuh dinamika dan perjuangan bagi PPP untuk memenangkan aspirasi umat Islam, maka perjuangan PPP tidak berhenti sampai disitu saja. Ketika berlangsung Sidang Umum MPR, PPP mengajukan keberatan terhadap draft GBHN yang diajukan pemerintah dengan memasukkan aliran kepercayaan untuk disetarakan dengan empat agama yang resmi diakui oleh pemerintah. Jika hal ini disetujui MPR, tentu saja merugikan umat Islam secara mayoritas.

KH. Bisri Syansuri sebagai seorang tokoh PPP menegaskan bahwa persoalan aliran kepercayaan atau aliran kebatinan bertentangan dengan akidah Islam karena cenderung ke syirik (menyekutukan Tuhan) dengan fatwa yang dikeluarkannya: "...bahwa orang-orang kebatinan itu sebenarnya adalah orang-orang Islam yang telah tersesat, setidaknya-tidaknya mereka kurang memahami Islam

---

<sup>200</sup>Amiruddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, h. 107.

yang sebenarnya... Bahwa kaum kebatinan telah menyelewengkan ajaran Islam, atau agama Islam”<sup>201</sup>.

Kemudian, kritikan tajam dilancarkan PPP juga ketika membahas rancangan P-4 yang diajukan oleh pemerintahan Soeharto. Alasan keberatan PPP terhadap P-4 karena dikhawatirkan konsep tersebut malah mengaburkan kemurnian Pancasila. Kemudian, ketidaksetujuan PPP jika P-4 ditetapkan melalui TAP MPR, kalau tidak ditetapkan melalui TAP MPR, PPP tidak keberatan. Keputusan final tidak tercapai di MPR, dan sikap yang diambil PPP tetap pada sikap menolak. Kemudian, anggota PPP yang berada di Komisi B membahas masalah ini melakukan walk out.

Sikap konfrontatif yang dilakukan anggota PPP di Komisi B MPR, menjarak ke Komisi A yang membahas draft GBHN, khususnya yang membahas masalah aliran kebatinan, dengan melakukan walk out meninggalkan ruang rapat, dengan juru bicara Yusuf Syakir. Sampai masalah Aliran Kebatinan ini dibawa ke Sidang Paripurna, PPP tetap pada pendirian teguhnya, yakni menolak Aliran Kebatinan setara dengan empat agama resmi di Indonesia.

Gerakan PPP selama pemerintahan Orde Baru juga begitu tajam pada tahun 1980, dalam Sidang di DPR yang membahas masalah RUU Pemilu. Dalam RUU yang disodorkan pemerintah, menegaskan bahwa struktur anggota DPR di samping yang dipilih melalui proses Pemilu, juga terdapat 100 orang yang diangkat. Kemudian, tidak dilibatkannya partai politik dalam panitia Pemilu semacam KPPS.

Dalam hal ini, PPP keberatan dengan draft tersebut dan mengusulkan pengurangan menjadi 75 orang anggota DPR yang diangkat, dan parpol dilibatkan dalam kepanitiaan Pemilu. Ternyata usulan yang dikemukakan oleh PPP, tidak di terima oleh mayoritas fraksi di DPR, yang didominasi oleh Golkar dan ABRI. Walaupun demikian, PPP tidak bergeming dan tidak mau berkompromi dengan fraksi-fraksi pemerintah. Akibat tidak ada kesepakatan, maka dilakukanlah votting. PPP menyadari kalau melalui mekanis votting akan kalah. Langkah

---

<sup>201</sup>Irsyam, *Ulama dan Partai Politik*, h. 92.

berani dilakukan PPP adalah melakukan “Boikot Sidang Pleno DPR-RI pada tanggal 29 Februari 1980 yang akan menetapkan aturan main Pemilu”.<sup>202</sup>

Sikap kritis dan wkl out yang ditampilkan oleh PPP pada Sidang Umum MPR 1978 mendapat reaksi dari pemerintahan Orde Baru. Hal ini diungkapkan oleh Soeharto ketika pidato diluar teks pada tanggal 27 Maret 1980 di Pakanbaru. Soeharto sendiri mempertanyakan sikap PPP mengenai P-4 dengan pernyataan bahwa “.... Apa benar PPP menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas dan menerima Eka Prasetia Panca Karsa, atau hanya permainan saja? Dengan demikia maka berarti PPP itu membuka dirinya untuk selamanya dicurigai, dicurigai terus”.<sup>203</sup>

Walaupun ada kritikan dan kecaman dari pemerintahan Orde Baru, namun PPP tetap membulatkan tekad untuk bersikap kritis dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan membela kepentingan-kepentingan umat Islam yang coba dikebiri oleh pemerintahan yang berkuasa sampai dengan dilaksanakannya Pemilu tahun 1982. Keadaan tetap tidak berubah, karena sampai tahun 1980-an, pemerintahan Soeharto belum menunjukkan adanya sikap simpati dan empati kepada kepentingan umat Islam. Pemerintahan Soeharto lebih mengedepankan prinsip pembangunan ekonomi bangsa, daripada membangun suasana kebatinan dan spritualitas masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam.

Perkembangan lain dari dinamika yang berkembang di PPP adalah ketika ada upaya yang dilakukan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto untuk menerapkan asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai politik, yang sebelumnya masing-masing partai politik menetapkan asasnya masing-masing sesuai dengan haluan politiknya. Contohnya, PPP dengan asas Islam, sebagai asas partai. PDI dengan nasionalisme sebagai asas partai.

Dalam pidato kenegaraan yang dilakukan di hadapan anggota DPR pada tanggal 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto untuk pertama kalinya mengemukakan gagasan menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi

---

<sup>202</sup>KH. Saifuddin Zuhri, *Kaleidoskop Politik di Indonesia I* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), h. 84-90.

<sup>203</sup>Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru* (Jakarta: Grasindo, 1991), h. 47.

seluruh kekuatan sosial dan politik di Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, maka pada tahun 1983, pemerintahan Soeharto mengajukan draft asas tunggal bagi organisasi sosial dan politik.

Rancangan draft yang diajukan ini mendapat reaksi dari berbagai kalangan akademisi, pengamat politik dan mahasiswa. Kemudian terjadi berbagai insiden dan ketegangan antara umat Islam di satu pihak dengan pemerintahan yang berkuasa di pihak lain. Termasuklah ketika itu terjadi dualisme kepemimpinan HMI, yakni ada HMI pro asas tunggal, dan ada HMI yang tetap mengedepankan Islam sebagai asas satu-satunya organisasi.

Di samping itu, terjadi insiden Tanjung Priok yang mencederai pemerintahan yang berkuasa dengan mengucurkan darah umat Islam yang menolak adanya asas tunggal Pancasila diterapkan.

Di tengah suasana kebatinan umat Islam masih bimbang untuk menerima asas tunggal Pancasila sebagai asas berorganisasi dan berpolitik, tiba-tiba secara mengejutkan NU mengambil sikap untuk menerima asas tunggal Pancasila. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa NU begitu cepat menyatakan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi berorganisasi dan berpolitik, yakni:

*Pertama*, terjadinya kemelut internal PPP di sekitar Pemilu 1982 telah merembet ke tubuh NU sehingga masing-masing faksi yang bertikai saling memperebutkan dukungan pemerintah. *Kedua*, munculnya tantangan yang meluas di masyarakat terhadap rencana asas tunggal mengakibatkan kelompok mana yang lebih dulu menerima memiliki bobot politis yang besar, ini berarti merupakan kesempatan gerakan “pemikiran baru” di NU untuk memperoleh kepercayaan kembali negara terhadap NU.<sup>204</sup>

Sikap anggota NU yang masih berafiliasi dengan PPP mendapat tantangan yang cukup keras, apalagi ketika partai ini tidak lagi memakai asas Islam. Sementara itu pemerintahan Soeharto yang berkuasa telah melakukan usaha-usaha untuk meminimalisir karakter Islam dari partai-partai Islam, seraya mempersempit ruang gerak terhadap orang-orang yang tidak akomodatif terhadap kepentingan negara, apalagi sejak diberlakukannya asas tunggal Pancasila.

---

<sup>204</sup> Amiruddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, h. 168.

Sahar L. Hasan mengutip pernyataan Ismail Hasan Meteureum menjelaskan bahwa lunturnya warna Islam dari tubuh PPP yang terpadu dengan dominasi para pemimpin partai yang bercorak akomodatif terhadap negara, sebagai akibat dari proses pembentukannya yang dipaksakan oleh otorianisme kekuasaan. Dan ini menurutnya telah menyeret PPP ke dalam tiga kecenderungan yang terus dipikul selama negara Orde Baru berdiri, antara lain:

*Pertama*, kecenderungan negara Orde Baru menempatkan PPP tidak lebih sekedar partner negara, khususnya dalam hal pembangunan ekonomi. *Kedua*, mandulnya PPP dalam menjalankan fungsi partai karena negara pada saat itu membangun sistem kepartaian tertutup yang tidak memberi ruang gerak yang leluasa bagi partai untuk keluar dan kemudian berhadapan dengan negara. *Ketiga*, keberadaan PPP sejatinya terbelenggu oleh kontrol negara, akibat penerapan asas tunggal Pancasila.<sup>205</sup>

Menyikapi keadaan PPP yang demikian lemah setelah menerima asas tunggal Pancasila, dan adanya campur tangan pihak luar yang sengaja ditempatkan di tubuh PPP, di kemudian hari para kader muda NU melihat bahwa NU tidak mungkin lagi dapat berpartisipasi secara maksimal di bidang politik untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam melalui PPP. Di samping adanya upaya yang masif dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melakukan pendekatan-pendekatan yang intensif kepada para kader NU yang memberikan ruang gerak yang luas untuk ikut berpartisipasi dalam organisasi Golongan Karya.

Oleh karenanya, NU diminta untuk kembali ke Khittah 1926 yang dicetuskan pada Muktamar NU di Situbondoyang menegaskan bahwa “Organisasi Ulama itu menarik diri dari aktivitas politik kepartaian (PPP)”<sup>206</sup> Realisasi dari keputusan Muktamar Situbondo tersebut, PB-NU mengeluarkan “SK No. 1/PB-NU/1-1985 tentang larangan bagi pengurus harian NU memiliki rangkap jabatan sebagai pengurus harian partai politik/organisasi sosial politik manapun”. Kemudian, pada tanggal 26 Oktober 1985, PB NU kembali menegaskan pelarangan rangkap jabatan dengan SK 72/A-II/04-d/XI/85 dan No. 92/1986.<sup>207</sup>

---

<sup>205</sup>Sahar L. Hasan et.all, *Memilih Partai Islam: Visi, Misi dan Persepsi* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 141.

<sup>206</sup>Amiruddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, h. 174.

<sup>207</sup>*Ibid.*

Keluarkan SK tersebut, membuat sebahagian anggota NU yang menjadi pengurus PPP menjadi serba salah. Sebahagian mematuhi instruksi itu dengan menanggalkan jabatan politiknya di PPP, sementara itu sebahagian lain menolaknya. Namun yang lebih prinsipil lagi dengan keluarnya NU dari PPP adalah sebagai upaya untuk melakukan pengembosan menghadapi Pemilu pada tahun 1987.

Hal ini dikarenakan NU sudah mengalami distorsi dari keanggotaan PPP yang sudah disusupi oleh orang-orang luar PPP yang secara diam-diam dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru untuk melemahkan PPP. Sebagai jalan tengah, para pengurus NU memberikan ruang gerak bagi anggotanya untuk bebas memilih partai manapun sebagai aspirasi politik, tetapi tidak boleh menjadi pengurus partai.

Sikap PB NU yang memberikan kebebasan untuk memilih partai manapun, disikap secara tegas oleh kader NU yang berjuang secara terus menerus untuk kepentingan PPP dan umat Islam, yakni KH. Syansuri Badawi, sebagai calon PPP di DPR, yang menyatakan bahwa “Sebagai umat Islam, warga NU tidak punya pilihan kecuali memberikan suaranya kepada partai Islam, PPP”.<sup>208</sup>

Adanya dinamika yang berkembang dari dalam (internal) dan luar (eksternal) PPP, berpengaruh terhadap perolehan suara PPP pada Pemilu tahun 1987. Amiruddin menjelaskan bahwa “Golkar mengalami lonjakan suara yang cukup besar, dari 64,34 % pada Pemilu 1982 menjadi 72,99 % pada Pemilu 1987. Sementara PPP hanya memperoleh 15,96 % yang berarti mengalami penurunan 11,82 % dibandingkan Pemilu sebelumnya. Di daerah-daerah kantong-kantong NU, PPP mengalami kemerosotan suara yang besar, sebaliknya suara Golkar semakin menggelembung”.<sup>209</sup>

Perubahan sikap NU yang sejak semula kehadirannya di PPP memberikan dukungan penuh, dan pada Pemilu 1987 malah bersikap berseberangan dengan PPP, tentu saja merugikan PPP, dan membawa kemenangan besar bagi Golkar, sebagai mesin politik pemerintahan Orde Baru. Masuknya tokoh-tokoh NU yang

---

<sup>208</sup> *Ibid.*, h. 177.

<sup>209</sup> *Ibid.*, h. 178.

pada mulanya adalah anggota PPP ke Golkar, ikut mempengaruhi kebijakan politik pemerintah terhadap umat Islam.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh perubahan suasana politik di tubuh Golkar yang sedikit lebih “hijau” dibandingkan Golkar pada periode-periode sebelumnya. Artinya, Golkar yang dipimpin oleh Sudharmono pada tahun 1987 memberikan masuka kepada pemerintah untuk lebih mengakomodasi kepentingan-kepentingan umat Islam dalam kebijakan-kebijakan yang diambil. Di samping mengakomodasi orang-orang diluar Golkar yang “meloncat” masuk ke Golkar, terutama dari PPP.

Padahal Golkar pada masa-masa sebelumnya, lebih antipati terhadap Islam, dan partai politik Islam yang mengakibatkan terjadinya jurang pemisah antara pemerintah dan umat Islam. Ini pun disebabkan orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan sejak peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto lebih didominasi orang-orang yang secara diam-diam tidak menyukai eksistensi umat Islam dan partai politik Islam dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Selanjutnya, pergerakan politik dari PPP pada Pemilu 1992 tidak mengalami dinamika yang mengkhawatirkan pemerintahan Soeharto. Hal ini dilatar belakangi peran yang dimainkan oleh PPP lebih bersikap akomodatif terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penguasa. Seiring dengan sikap kooperatif penguasa Orde Baru terhadap kepentingan umat Islam. PPP lebih elegan disebut sebagai “Partai sejuk” di bawah kepemimpinan Buya Ismail Hasan Hasan Metereum.

DPR sendiri, sejak Pemilu 1987 telah menetapkan dan mengesahkan beberapa UU yang memberikan peluang emas bagi kiprah umat Islam yang lebih luas. Hal ini tampak pada “Disahkannya Undang-undang Pendidikan Nasional (UU PN) pada 1989, disahkannya Undang-undang Peradilan Agama (UU PA) pada 1989, kompilasi hukum Islam pada 1991, kebijakan baru jilbab pada 1991, dan kebijakan ditutupnya peredaran SDSB 1993”.<sup>210</sup>

Pemerintahan Soeharto sendiri memberikan perhatian besar terhadap kaum muslimin. Terbukti dengan adanya bantuan negara untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan kaum muslimin untuk menjalankan perintah agama. Di samping bantuan-bantuan yang dianggarkan resmi negara (budgetting) untuk

---

<sup>210</sup>*Ibid.*, h. 229.

membantu sarana dan prasarana ibadah kaum muslimin. Presiden Soeharto secara pribadi memprakarsai pendirian Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YABMP).

Kegiatan utamanya adalah mendirikan tempat-tempat ibadah bagi kaum muslimin. Hingga tahun 1994 sudah mendirikan 634 masjid yang tersebar di 206 kabupaten dan kotamadya. Kemudian, di awal tahun 1990-an, YABMP mensponsori pengiriman 1000 da'I ke daerah-daerah transmigrasi atau tempat-tempat terpencil. Selanjutnya adalah keterlibatan secara penuh pemerintah atas berdirinya bank yang mendasarkan operasionalnya pada Syari'at Islam, yang dinamakan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1991.<sup>211</sup>

Sikap akomodatif yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto terhadap kepentingan umat Islam, membuat PPP tidak lagi mau mengusik atau mengkritisi secara tajam. Sikap yang ditunjukkan oleh PPP adalah memberikan dukungan penuh terhadap usaha-usaha tersebut, karena dianggap menguntungkan umat Islam. Walaupun ada hal-hal penting yang ingin disampaikan, sekedar memberikan saran dan masukan demi perbaikan ke arah yang lebih memuaskan semua pihak.

Kondisi ini terus berlangsung sampai tahun 1995. Pada tahun ini, PPP mengambil sikap lebih maju dengan merubah segmen politiknya dari partai sejuk ke partai yang lebih dinamis. Artinya, kalau selama ini PPP diam seribu bahasa terhadap pelaksanaan Pemilu dan kebijakan pemerintah, maka menjelang Pemilu 1997 melakukan beberapa manuver politik, diantaranya "Gebrakan pertama terdengar dari Musyawarah Kerja Nasional PPP di Bogor. Beberapa Dewan Pimpinan Wilayah PPP akan memboikot Pemilu 1997 jika pelaksanaan pemilu tidak berubah lebih baik".<sup>212</sup> Hal ini dilatarbelakangi beberapa kejadian yang menimpa anggota PPP di berbagai daerah.

Selanjutnya, pada tahun 1996, PPP melalui ketua umum menginstruksikan fraksi PPP di DPR untuk melakukan tindakan, yakni "Memprakarsai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif yang belum pernah dilakukan oleh DPR. Dalam

---

<sup>211</sup>*Ibid.*, h. 230.

<sup>212</sup>Bambang Cipto, *Duel Segitiga PPP Golkar PDI Dalam Pemilu 1997* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h. 90.

usulan tersebut PPP menghendaki agar dilakukan perubahan terhadap UU Pemilu, Haji, dan Anti Monopoli”.<sup>213</sup>

Khusus berkaitan dengan RUU Pemilu, PPP mengajukan beberapa usulan, yakni: “Pertama, Golkar dan Parpol perlu dilibatkan dalam Pentarlih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kedua, pungutan suara dilakukan pada hari libur. Ketiga, para saksi diangkat dan diberhentikan oleh parpol. Keempat, para saksi diberikan salinan Berita Acara Penghitungan Suara.”<sup>214</sup>

Walaupun PPP sedikit agak kritis terhadap peraturan Pemilu, namun pada Pemilu 1997 tidak memberikan pencerahan yang baik bagi PPP. Bahkan PPP menjadi partai yang lemah selama menjelang sampai dilaksanakannya Pemilu 1997. Hal ini dilatarbelakangi kekurangan dana dan lingkup kegiatan yang terbatas. PPP dalam berkampanye masih bersifat tradisional, yakni melakukan pertemuan-pertemuan (tatap muka), tanpa memanfaatkan sarana dan fasilitas yang sudah berkembang dewasa ini, seperti televisi dan radio, atau media massa.

Kemudian, kelemahan PPP menjelang dan sampai Pemilu 1997, adalah tidak mampu menangkap isu-isu yang mulai berkembang, seperti isu keterbukaan politik. Kemudian, tidak menyikapi persoalan-persoalan masyarakat menyangkut masalah buruh, tanah, dan persoalan rakyat kecil. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan PDI, yang lebih mampu menyahuti aspirasi masyarakat, dengan sebutan “Partai wong cilik”, dan lebih mampu menyahuti aspirasi anak muda dengan gaya “metal”. PPP lebih banyak menyoroti persoalan teknis kampanye dan proses pemilihan yang kurang menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat pasca pemilu.

Dan pada akhirnya, dalam Sidang Umum MPR tahun 1998, PPP memberikan dukungan penuh dan memberikan kesempatan pada Soeharto di usia yang sudah sepuh untuk dipilih kembali menjadi Presiden RI pada periode ke enam (1998-2003).

---

<sup>213</sup>*Ibid.*, h. 91.

<sup>214</sup>*Ibid.*

### **G. Kondisi Internal PPP di Era Reformasi (1999- Sekarang)**

Memasuki era reformasi, PPP dihadapkan pada suasana yang sangat jauh berbeda pada era sebelumnya. Pada era ini, muncul kesadaran politik yang tinggi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk para kader-kader PPP. Di samping suasana politik dan ekonomi pasca lengsernya Soeharto yang kian terpuruk, yang mendorong pemerintah ketika itu BJ. Habibie yang memimpin untuk melakukan reformasi di segala bidang kehidupan, termasuk di bidang politik.

Pada saat BJ. Habibie berkuasa, pemerintah memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk membentuk dan mendirikan partai. Karena ketidaksamaan cara pandang mengenai esensi partai politik yang berazaskan Islam di kalangan tokoh-tokoh Islam, maka mulailah dilancarkan kritikan dan koreksi terhadap PPP sebagai satu-satunya partai yang mengakomodir kepentingan umat Islam.

Konsekwensi logisnya adalah bermunculan partai-partai yang berasaskan Islam, di samping PPP. Kehadiran partai-partai Islam yang baru ini membawa konsekwensi logis terhadap keberadaan PPP sebagai satu-satunya partai Islam di masa Orde Baru yang menganggap sebagai penyalur aspirasi umat Islam. Bahkan kehadiran partai-partai berbasis Islam ini dibentuk oleh unsur-unsur pendukung yang pada awalnya memberikan dukungan atau membidani lahirnya PPP, dan salah satunya adalah organisasi keagamaan Nahdatul Ulama (NU).

Namun, sebelum pecah gerakan reformasi tahun 1998, tepatnya pada pertengahan Agustus 1994, NU kembali melakukan manuver dengan memasuki gelanggang politik PPP, setelah sebelumnya di tahun 1984 menyatakan keluar dari PPP dan kembali ke Khittah 1926. Alasan kembalinya NU ke gelanggang politik PPP, adalah untuk memimpin PPP yang sejak kelahirannya belum pernah dipimpin oleh orang-orang dari NU. Hal ini seperti dijelaskan pada pernyataan berikut “Dengan cara terbuka para Kiai NU melontarkan keinginan mereka untuk merebut posisi ketua PPP karena sejak terbentuknya partai, NU belum pernah

memperoleh kesempatan naik puncak pimpinan partai. Selama ini porsi ketua PPP selalu dijabat oleh tokoh-tokoh dari MI”<sup>215</sup>

Untuk mencapai usaha-usaha tersebut, para kiai NU melakukan langkah-langkah politik, antara lain memunculkan nama-nama calon ketua umum PPP, seperti “Matori Abdul Djali dan Hamzah Haz”<sup>216</sup> yang dianggap mendapat restu para Kiai NU. Kemudian melakukan pendekatan kepada pihak penguasa, yakni dengan mendatangi Wakil Presiden RI, Tri Sutrisno. Selanjutnya adalah melakukan pertemuan untuk membentuk kelompok pengendali pemilihan ketua PPP guna merebut kursi ketua dari Ismail Hasan Metereum. Kelompok ini terdiri dari “Kiai Syansuri Badawi, Cholil Bisri, Abdul Hasyib, Mussalim Ridho, dan Nadhir Muhammad”<sup>217</sup>.

Menyikapi keadaan demikian, ketua umum PPP, H. Ismail Hasan Metereum mengambil sikap dengan menyatakan bahwa “Siap untuk diserahi tugas apapun oleh PPP”<sup>218</sup>. Dengan demikian menunjukkan bahwa Ismail Hasan Metereum bersedia kembali jika ternyata dipilih untuk menempati posisi ketua umum PPP. Akhirnya, pada Muktamar PPP III, Ismail Hasan Metereum kembali terpilih menjadi ketua umum PPP, dan ini sangat mengecewakan perpolitikan NU.

Pada tahun 1998, PPP melakukan Muktamar IV dan menetapkan Hamzah Haz sebagai ketua Umum PPP periode 1998-2003. Selama masa kepemimpinannya terjadi gonjang ganjing reformasi yang mengakibatkan runtuhnya kekuasaan Soeharto, akibat desakan yang begitu luas dari kalangan aktivis dan mahasiswa.

Dalam konteks ini, NU yang menjadi fraksi terbesar di tubuh PPP, telah melahirkan empat partai baru di masa Orde Reformasi, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Nahdatul Ulama (PNU), dan SUNI. Sementara itu, dari kubu Sarikat Islam (SI) lahir Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) dan PSII 1905. Sedangkan dari Muslimin Indonesia mengelompok di PBB, Masyumi Baru, PUI dan PAN.<sup>219</sup>

---

<sup>215</sup>*Ibid.*, h. 86.

<sup>216</sup>*Ibid.*

<sup>217</sup>*Ibid.*, h. 87.

<sup>218</sup>*Ibid.*, h. 88.

<sup>219</sup>Amir, *Peta Islam Politik*, h. 165.

Walaupun bukan lagi sebagai satu-satunya partai Islam, tetapi pada Pemilu tahun 1999 partai ini berhasil menjadi kelompok 3 besar, setelah PDI-P dan Partai Golkar secara nasional. PPP meraih 58 kursi dari 462 kursi yang diperebutkan dalam kursi DPR RI. Sementara itu di Sumatera Utara, PPP sendiri berhasil meraih 3 kursi di DPRD.

Jumlah kursi yang diperoleh PPP di DPR, menjadi konflik internal di lingkungan PPP sendiri. Apalagi ketika ketua umum PPP, yakni H. Hamzah Haz dalam kampanye pada Pemilu 1999 dengan sangat yakin menjanjikan partainya akan meraih minimal 20 % suara atau 89 kursi di DPR RI, yakni sama dengan perolehan kursi pada Pemilu 1997. Namun ternyata perolehan yang di dapat partai yang sudah berganti dari bintang ke Ka'bah itu hanya meraih 13 persen suara.<sup>220</sup>

Tidak tercapainya target perolehan suara, ditambah dengan mundurnya H. Hamzah Haz dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Kabinet Abdurrahman Wahid, membuat Hamzah Haz seolah-olah kehilangan kepercayaan diri. Bahkan secara non formal kepada rekan-rekannya di DPP PPP Hamzah Haz menyampaikan kerelaan bila posisi dirinya sebagai ketua umum PPP digantikan. Apalagi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP tahun 2000 telah memutuskan percepatan pelaksanaan Muktamar V PPP dari yang semestinya dilaksanakan pada tahun 2003 dipercepat menjadi tahun 2002.

Nama KH. Zainuddin MZ sebagai salah seorang kandidat ketua umum DPP PPP mulai disebut-sebut untuk menggantikan Hamzah Haz. Begitu juga nama Tosari Wijaya. Kedua nama ini muncul dari kalangan NU. Sementara itu, dari kalangan MI muncul nama Bachtiar Chamsjah.

Di tengah-tengah proses suksesi di tubuh PPP, angin politik berubah. Di pertengahan tahun 2002, pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid tumbang dan Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden yang saat itu lowong akibat Megawati Soekarnoputri yang sebelumnya menjabat Wakil Presiden, sesuai dengan konstitusi menduduki jabatan Presiden menggantikan Gusdur.

---

<sup>220</sup>E. Soebekti, et.all (Tim Penyunting), *Di Saat Ekonomi Terpuruk Partai Politik Rame-Rame Pecah Kongsi* (Jakarta: PT. Gria Media), h. 73.

Akibatnya, posisi Hamzah Haz kembali menjadi kuat, sehingga muncul upaya untuk tetap menempatkan dirinya sebagai orang nomor satu di PPP dalam rangka menghadapi Pemilu tahun 2004. Bahkan dalam Mukernas II PPP, diputuskan untuk menunda pelaksanaan Muktamar V PPP dari tahun 2003 menjadi 2004 setelah Pemilu. Terjadi penolakan dari beberapa kader PPP, diantaranya KH. Zainuddin MZ, Ja'far Badjeber, Zainal Ma'arif, dan Saleh Khalid.

Puncak dari konflik yang terjadi di tubuh PPP memunculkan lahirnya PPP tandingan dengan sebutan Partai Persatuan Pembangunan Reformasi (PPP-R) pada tanggal 15 Maret 2002, bertepatan dengan acara peringatan tahun baru Islam, 1 Muharram 1423 H di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Upaya islah yang dilakukan PPP terhadap kader-kader yang mengambil kebijakan untuk melahirkan PPP baru tampaknya tidak membuahkan hasil yang memuaskan dan menggembirakan. Bahkan pada Muktamar VI yang direncanakan pada tahun 2005 sesuai dengan Rapat Pimpinan Pusat, akhirnya dilakukan pada tahun 2003 yang mengokohkan posisi Dr. H. Hamzah Haz sebagai Ketua Umum PPP periode 2003-2008.

Kondisi ini membuat sedikit perpecahan di tubuh PPP, karena kandidat yang bersaing pada saat itu, yakni H. Bachtiar Chamsjah mundur dari PPP. Sementara itu, KH. Zainuddin MZ yang telah membentuk partai baru tidak merasa bahwa gejolak yang terjadi di tubuh PPP yang menyebabkan dirinya dan kawan-kawan membentuk PPP-R sebagai partai sempalan dari PPP.

## **H. Pergerakan PPP Di Kota Medan Tahun 2004-2009**

### **1. Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Perolehan Suara dan Kursi PPP Di DPRD Kota Medan**

Kota Medan merupakan salah satu wilayah Kabupaten//Kota yang ada di Sumatera Utara yang berjumlah 23 daerah tingkat II Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan, Kota Medan memiliki 21 Kecamatan, dengan 21 Kelurahan, dan 2000 lingkungan. Jumlah penduduk Kota Medan saat ini sekitar 2.083.156 jiwa. Kota Medan dihuni oleh berbagai suku yang ada di Propinsi Sumatera Utara, atau termasuk kota yang multi etnis. Kota Medan merupakan ibukota Propinsi Sumatera Utara. Kota Medan dikategorikan sebagai kota terbesar ketiga setelah DKI Jakarta, dan Surabaya. Saat sekarang ini, Kota Medan sedang dalam tahap memasuki kategori Kota Metropolitan.

Luas wilayah Kota Medan sebanyak 26.510 H atau sama dengan 265,10 Km<sup>2</sup> dengan persentase besaran 3,6 % dari luas wilayah Propinsi Sumatera Utara. Letak Kota Medan dari permukaan laut, yakni 2,5-37,5 m di atas permukaan laut. Posisi Kota Medan adalah 2<sup>o</sup>27'-2<sup>o</sup>47' Lintang Utara, dan 98<sup>o</sup>35'-98<sup>o</sup>44' Bujur Timur. Secara tofografi, wilayah Kota Medan cenderung miring ke Utara. Secara administratif, wilayah Kota Medan berbatasan langsung dengan:

- Bagian Barat : Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.
- Bagian Timur : Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.
- Bagian Selatan : Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.
- Bagian Utara : Selat Malaka.

Seperti halnya di kota-kota lain, Kota Medan tidak luput dari pandangan orang-orang yang ingin mengembangkan organisasi atau usaha yang memberikan

kesempatan untuk berkarir dan membangun kesejahteraan hidup. Oleh karenanya di Kota Medan banyak berbagai sarana dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintahan Kota Medan kepada orang-orang yang ingin mengembangkan bisnis dan karir serta organisasi, sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan Kota Medan.

Secara politik, Kota Medan juga menjanjikan bagi partai-partai politik untuk meraih suara sebanyak-banyaknya guna menempatkan wakil-wakilnya untuk menduduki kursi DPR, DPRD tingkat I, maupun DPRD tingkat II. Oleh karenanya, partai politik di tingkat pusat secepat mungkin akan berusaha membentuk organisasi partai politiknya di Kota Medan, guna meraih suara dari penduduk Kota Medan yang multi etnis.

Apabila ditelusuri secara mendalam bahwa kehadiran partai politik di Kota Medan sama halnya dengan kehadirannya di tingkat pusat. Sejak Pemilu tahun 1955, sampai Pemilu tahun 2009, partai-partai politik tetap menunjukkan kiprahnya dalam meraup suara penduduk Kota Medan. Seperti halnya PPP, sejak fusi pada tahun 1973, sudah berkiprah di Kota Medan, dan menunjukkan eksistensi organisasi yang tidak kalah pentingnya dengan partai politik lainnya. Bahkan sampai saat sekarang ini masih bertahan, di tengah gempuran kehadiran partai politik, baik berideologi nasionalisme, maupun ideologi keagamaan, seperti ideologi Islam.

Sejak Orde Baru berkuasa, dan dimulai Pemilu dengan tiga peserta partai politik pada Pemilu 1973, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, PPP menduduki peringkat pemenang kedua setelah Golkar, dan menyusul yang terakhir adalah PDI, baik untuk wilayah Sumatera Utara secara keseluruhan, maupun untuk tingkat Kota Medan.

Golkar sebagai organisasi peserta pemilu yang di dukung secara penuh oleh pemerintahan Soeharto tentu berusaha untuk memenangkan secara mutlak Pemilu yang dilangsungkan setiap lima tahun sekali. Dan ini terbukti bahwa setiap Pemilu, Golkar yang menang di Kota Medan. Sementara itu, PPP tetap membayangkan kemenangan Golkar dengan jumlah perolehan suara yang bervariasi pada setiap diadakan Pemilu. Kadang-kadang perolehan suara PPP

meningkat, kadang-kadang mengalami penurunan, dan ada kalanya tidak berbeda hasilnya dari pemilu sebelumnya.

Ketika Orde Baru dan rezim Soeharto jatuh, terjadi perubahan mendasar dalam sistem politik Indonesia. Peserta Pemilu tidak terbatas hanya tiga organisasi partai politik saja. Tercatat pada tahun 1999, ada 48 partai politik yang ikut serta pada pelaksanaan Pemilu di era reformasi, sebagai buah keterbukaan yang diberikan oleh pemerintahan BJ. Habibie. Tahun 2004, ada 24 partai politik yang mengikutinya. Kemudian, pada tahun 2009, ada 34 partai politik yang ikut serta Pemilu.

Selama tiga kali Pemilu di era Reformasi ini, berbagai partai politik berazaskan Islam tampil sebagai sarana yang menampung aspirasi suara umat Islam. Kehadiran partai politik Islam di samping PPP, secara psikologis mempengaruhi perolehan suara PPP. Karena banyak pilihan partai yang dapat dijadikan sebagai wakil masyarakat untuk duduk di DPR. Oleh karenanya akan mengakibatkan penurunan perolehan suara dan perolehan kursi di DPR, baik di pusat, di tingkat I, dan tingkat II.

Demikian pula bagi PPP Kota Medan, perolehan suara menjadi menurun atau melemah, karena sebahagian suara PPP tercerabut dari akar rumput (grassrout)nya, yakni masyarakat muslim yang ada di wilayah Kota Medan, dan berpindah kepada partai politik Islam lainnya. Bisa pindah ke PBB, PKS atau partai politik Islam lainnya. Dan tidak tertutup kemungkinan, ada yang berpindah ke partai berhaluan nasional, seperti Partai Golkar, PDI-P, PAN, PKB dan lain-lain.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan dalam penelitian ini bahwa sampai Pemilu tahun 1997, PPP Kota Medan mampu meraih 11 kursi di DPRD Kota Medan. Dua tahun kemudian, tepatnya pada Pemilu tahun 1999, PPP Kota Medan hanya mampu meraih 4 kursi saja. Lima tahun berikutnya, yakni pada Pemilu tahun 2004, PPP Kota Medan tetap meraih 4 kursi saja di DPRD Kota Medan.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan perolehan suara dan kursi PPP Kota Medan sejak Pemilu 1999. Kemudian

mengalami stagnasi atau tidak mengalami perubahan signifikan pada Pemilu 2004, karena jumlah kursi yang diperoleh PPP Kota Medan tetap, yakni sekitar 4 kursi saja.

## **2. Respon Masyarakat Terhadap Eksistensi PPP Di Kota Medan**

Basis massa pendukung PPP, khususnya di Kota Medan adalah umat Islam yang mayoritas jumlahnya. PPP menjadi pilihan bagi umat Islam di Kota Medan karena dianggap bahwa PPP merupakan partainya orang Islam, di samping memilih karena faktor-faktor lain. Sejak tahun 1977 sampai 1997, di tengah-tengah tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru setiap menjelang Pemilu melalui lembaga pemenangan partai di tingkat lokal untuk memenangkan Golkar. Tetapi bagi orang-orang Islam yang ada di Kota Medan sebahagian memilih PPP, dari tiga peserta Pemilu (PPP, Golkar, dan PDI).

Setelah era reformasi di mulai, yakni pada tahun 1999 sampai sekarang, puluhan partai politik tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan. Demikian juga partai-partai yang menyuarakan aspirasi umat Islam tumbuh dan berkembang, berdampingan dengan PPP. Di Kota Medan, tercatat ada Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan lain-lain. Banyak pilihan bagi umat Islam untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Namun sebahagian masyarakat muslim Kota Medan tetap teguh memilih PPP sebagai saluran aspirasi politiknya.

Alasan sederhana dikemukakan oleh masyarakat Kota Medan, karena PPP adalah simbol dari partai politik Islam. Dan wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II, maupun kepengurusan PPP mulai dari tingkat pusat sampai ranting, keseluruhan adalah beragama Islam. Tidak ada anggota masyarakat di luar agama Islam yang masuk ke PPP, baik sebagai pengurus maupun wakil rakyat di DPR.

Salah seorang anggota masyarakat Kota Medan yang berhasil penulis wawancarai, yakni Bapak H. Abdul Chalid KS, pada tanggal 2 Februari 2012 di kediaman beliau di Mabar menjelaskan sebagai berikut: “Alasan saya memilih PPP sebagai partai politik pada setiap Pemilu karena PPP merupakan partai Islam. Lambang partai jelas menunjukkan lambang Islam, baik itu Ka’bah maupun

bintang segi lima. Ka'bah jelas menunjukkan arah kiblat umat Islam dalam melaksanakan ibadah sholat, dan tempat melaksanakan ibadah haji. Dan lambang bintang segi lima yang harus dirobah PPP pada tahun 1987 karena tekanan dari penguasa Orde Baru menunjukkan rukun Islam, dan mengingatkan umat Islam untuk mengerjakan sholat lima waktu. Jadi bagi saya, tidak ada pilihan lain, tetap memilih PPP sebagai saluran aspirasi politik saya. Walaupun saat ini banyak pilihan partai politik lain yang konon katanya menyahuti aspirasi politik umat Islam, tetapi saya tetap tidak bergeming, bahwa PPP tetap pilihan saya, dan itu sudah teruji dari zaman ke zaman”.

Ketika seseorang memilih partai politik yang berazaskan agama, yakni Islam, merupakan sesuatu hal wajar dalam percaturan politik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Abdul Munir Mulkan yang dikutip oleh Pramono U. Tanthowi yang menjelaskan sebagai berikut:

Masyarakat Indonesia mayoritas bukan merupakan pemilih yang rasional, dalam artian mereka memilih partai politik atau calon anggota legislatif dari suatu partai berdasarkan pada program yang ditawarkan dan akibat terhadap kehidupan mereka. Akan tetapi lebih kepada rasa emosional keagamaan, bahkan terkesan simbolis dan fanaik terhadap simbol-simbol agama tersebut yang dipakai oleh suatu partai politik. Walaupun kemudian terjadi perubahan simbol, akan tetapi identitas suatu partai politik tersebut akan tetap dianggap mewakili rasa agama, walaupun simbolnya berganti.<sup>221</sup>

Apabila pernyataan di atas digandengkan dengan jawaban anggota masyarakat yang telah diwawancarai, nampaknya keduanya sejalan dan seiring. Bahwa tidak ada masalah bagi masyarakat pemilih untuk menetapkan pilihannya pada salah satu partai politik yang dicintai dan diyakininya mampu menyalurkan aspirasi politiknya, walaupun partai politik itu sendiri sudah berganti baju alias berganti lambang partai.

Seperti halnya PPP, pertukaran asas dari Islam menjadi Pancasila serta digantinya lambang Ka'bah menjadi Bintang segi lima, dan sejak reformasi sudah kembali menggunakan Ka'bah sebagai lambang partai, tidak mempengaruhi anggapan masyarakat bahwa PPP adalah partainya orang Islam, dan sebagai

---

<sup>221</sup>Pramono U. Tanthowi, *Kebangkitan Politik Kaum Santri* (Jakarta: PSAP, 2005), h. 21.

penyampai aspirasi umat Islam kepada pemerintahan yang berkuasa. Memilih PPP berarti memperjuangkan agama Islam. Karena itu, berbagai tekanan maupun intimidasi dan praktek-praktek curang yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu tidak mampu menggoyahkan keinginan sebahagian masyarakat Kota Medan untuk memilih PPP.

**BAB IV**  
**PPP DAN DINAMIKA POLITIKNYA DI**  
**KOTA MEDAN TAHUN 2004-2009**

**I. Perkembangan PPP di Kota Medan Tahun 2004-2009**

Kota Medan merupakan salah satu wilayah Kabupaten//Kota yang ada di Sumatera Utara yang berjumlah 23 daerah tingkat II Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan, Kota Medan memiliki 21 Kecamatan, dengan 21 Kelurahan, dan 2000 lingkungan. Jumlah penduduk Kota Medan saat ini sekitar 2.083.156 jiwa. Kota Medan dihuni oleh berbagai suku yang ada di Propinsi Sumatera Utara, atau termasuk kota yang multi etnis. Kota Medan merupakan ibukota Propinsi Sumatera Utara. Kota Medan dikategorikan sebagai kota terbesar ketiga setelah DKI Jakarta, dan Surabaya. Saat sekarang ini, Kota Medan sedang dalam tahap memasuki kategori Kota Metropolitan.

Luas wilayah Kota Medan sebanyak 26.510 H atau sama dengan 265,10 Km<sup>2</sup> dengan persentase besaran 3,6 % dari luas wilayah Propinsi Sumatera Utara. Letak Kota Medan dari permukaan laut, yakni 2,5-37,5 m di atas permukaan laut. Posisi Kota Medan adalah 2<sup>0</sup>27'-2<sup>0</sup>47' Lintang Utara, dan 98<sup>0</sup>35'-98<sup>0</sup>44' Bujur Timur. Secara tofografi, wilayah Kota Medan cenderung miring ke Utara. Secara administratif, wilayah Kota Medan berbatasan langsung dengan:

- Bagian Barat : Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.
- Bagian Timur : Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.
- Bagian Selatan : Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.
- Bagian Utara : Selat Malaka.

Seperti halnya di kota-kota lain, Kota Medan tidak luput dari pandangan orang-orang yang ingin mengembangkan organisasi atau usaha yang memberikan kesempatan untuk berkarir dan membangun kesejahteraan hidup. Oleh karenanya, di Kota Medan banyak berbagai sarana dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintahan Kota Medan kepada orang-orang yang ingin mengembangkan bisnis dan karir serta organisasi, sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan Kota Medan.

Secara politik, Kota Medan juga menjanjikan bagi partai-partai politik untuk meraih suara sebanyak-banyaknya guna menempatkan wakil-wakilnya untuk menduduki kursi DPR, DPRD tingkat I, maupun DPRD tingkat II. Oleh karena itu, pemimpin partai politik di tingkat pusat secepat mungkin akan menugaskan para pimpinan dan pengurus wilayahnya di Sumatera Utara, agar berusaha membentuk organisasi partai politiknya di Kota Medan, guna meraih suara dari penduduk Kota Medan yang multi etnis.

Apabila ditelusuri secara mendalam bahwa kehadiran partai politik di Kota Medan sama halnya dengan kehadirannya di tingkat pusat. Sejak Pemilu tahun 1955 sampai Pemilu tahun 2009, partai-partai politik tetap menunjukkan kiprahnya dalam meraup suara penduduk Kota Medan. Seperti halnya PPP, sejak fusi pada tahun 1973, sudah berkiprah di Kota Medan, dan menunjukkan eksistensi organisasi yang tidak kalah pentingnya dengan partai politik lain. Bahkan sampai saat sekarang ini masih bertahan, di tengah gempuran kehadiran partai politik, baik yang memiliki ideologi nasionalisme, maupun ideologi keagamaan, seperti ideologi Islam.

Sejak Orde Baru berkuasa, dan dimulai Pemilu dengan tiga peserta partai politik pada Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, PPP menduduki peringkat pemenang kedua setelah Golkar, dan menyusul yang terakhir adalah PDI, baik untuk wilayah Sumatera Utara secara keseluruhan, maupun untuk tingkat Kota Medan.

Golkar sebagai organisasi peserta pemilu yang di dukung secara penuh oleh pemerintahan Soeharto tentu berusaha untuk memenangkan secara mutlak Pemilu yang dilangsungkan setiap lima tahun sekali. Dan ini terbukti bahwa setiap diadakan Pemilu, Golkar yang menjadi pemenangnya di Kota Medan. Sementara itu, PPP tetap membayang-bayangi kemenangan Golkar dengan jumlah perolehan suara yang bervariasi pada setiap diadakan Pemilu.

Kadang-kadang perolehan suara PPP meningkat, kadang-kadang mengalami penurunan, dan ada kalanya tidak berbeda hasilnya dari pemilu sebelumnya. Kemudian, di Kota Medan, ada basis-basis kantong suara PPP yang mutlak memenangkan Pemilu yang diadakan, seperti di Kelurahan Kota Matsum,

yakni di sekitar jalan Amaliun, Puri, Utama, dan sekitaran wilayah Masjid Raya Al-Maksum.

Ketika Orde Baru dan rezim Soeharto jatuh, terjadi perubahan mendasar dalam sistem politik Indonesia. Peserta Pemilu tidak terbatas hanya tiga organisasi partai politik saja. Tercatat pada tahun 1999, ada 48 partai politik yang ikut serta pada pelaksanaan Pemilu di era reformasi, sebagai buah keterbukaan yang diberikan oleh pemerintahan BJ. Habibie. Tahun 2004, ada 24 partai politik yang mengikutinya. Kemudian, pada tahun 2009, ada 34 partai politik yang ikut serta Pemilu.

Selama tiga kali Pemilu di era Reformasi ini, berbagai partai politik berazaskan Islam tampil sebagai sarana yang menampung aspirasi masyarakat, khususnya suara umat Islam. Kehadiran partai politik yang berazaskan Islam di samping PPP, maupun partai politik nasional yang memiliki andil mengakomodir kepentingan umat Islam, seperti PAN dan PKB maupun PKNU, secara psikologis mempengaruhi perolehan suara PPP. Karena banyak pilihan partai yang dapat dijadikan sebagai wakil masyarakat untuk duduk di DPR. Oleh karenanya akan mengakibatkan penurunan perolehan suara dan perolehan kursi PPP di DPR, baik di pusat, di tingkat I (Propinsi), dan tingkat II (Kabupaten/Kota).

Demikian pula bagi PPP Kota Medan, perolehan suara menjadi menurun atau melemah, karena sebahagian suara PPP tercerabut dari akar rumput (*grassrout*)nya, yakni masyarakat muslim yang ada di wilayah Kota Medan, dan berpindah kepada partai politik Islam lainnya. Bisa pindah ke PBB, PKS atau partai politik Islam lainnya. Dan tidak tertutup kemungkinan, ada yang berpindah ke partai berhaluan nasional, seperti Partai Golkar, PDI-P, PAN, PKB dan lain-lain.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan dalam penelitian ini bahwa sampai Pemilu tahun 1997, PPP Kota Medan mampu meraih 11 kursi di DPRD Kota Medan. Dua tahun kemudian, tepatnya pada Pemilu tahun 1999, PPP Kota Medan hanya mampu meraih 4 kursi saja. Lima tahun berikutnya, yakni pada Pemilu tahun 2004, PPP Kota Medan tetap meraih 4 kursi saja di DPRD Kota

Medan. Dan lebih ironis lagi, pada Pemilu tahun 2009, kursi PPP di DPRD Kota Medan menurun kembali, hanya mampu menempatkan 3 orang wakilnya.

Secara terperinci dapat dikemukakan nama-nama wakil rakyat anggota DPRD Kota Medan dari PPP sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2009 melalui tabel berikut:

**TABEL V**  
**NAMA-NAMA WAKIL RAKYAT ANGGOTA DPRD**  
**KOTA MEDAN HASIL PEMILU 1999**

NO	NAMA	DAERAH PEMILIHAN	WILAYAH
1	H.M.Yunus Rasyid, SH,M.HUM	Dapil Medan 1	Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Area dan Medan Denai
2	Ir. Parlindungan Batubara	Dapil Medan 2	Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Baru, dan Medan Sunggal
3	Zainuddin, SH	Dapil Medan 3	Kecamatan Medan Helvetia, Medan Petisah, dan Medan Barat
4	Yusmar Efendi	Dapil Medan 5	Kecamatan Medan Deli, Medan Perjuangan, Medan Marelan dan Medan Belawan

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 1999

Selanjutnya, pada Pemilu yang diadakan tahun 2004, PPP menempatkan wakilnya di DPRD Kota Medan sebanyak 4 orang, sebagaimana dikemukakan pada tabel berikut:

**TABEL VI**  
**NAMA-NAMA WAKIL RAKYAT ANGGOTA DPRD**  
**KOTA MEDAN HASIL PEMILU 2004**

NO	NAMA	DAERAH PEMILIHAN	WILAYAH
1	H.M.Yunus Rasyid, SH,M.HUM	Dapil Medan 1	Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Area dan Medan Denai
2	Ir. Parlindungan Batubara	Dapil Medan 2	Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Baru, dan Medan Sunggal
3	Zainuddin, SH	Dapil Medan 3	Kecamatan Medan Helvetia, Medan Petisah, dan Medan Barat
4	Yusmar Efendi	Dapil Medan 5	Kecamatan Medan Deli, Medan Perjuangan, Medan Marelan dan Medan Belawan

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2004.

Kemudian, pada Pemilu yang diadakan tahun 2009, perolehan suara PPP Kota Medan kembali menurun, sehingga berdampak terhadap jumlah kursi yang diperoleh. Tercatat dari sumber yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tahun 2009, jumlah kursi wakil rakyat dari PPP Kota Medan yang ada di DPRD Kota Medan adalah sebanyak 3 kursi, dengan nama-nama anggota DPRD Kota Medan berasal dari berbagai dapil (daerah pemilihan) di Kota Medan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**TABEL VII**  
**NAMA-NAMA WAKIL RAKYAT ANGGOTA DPRD**  
**KOTA MEDAN HASIL PEMILU 2009**

NO	NAMA	DAERAH PEMILIHAN	WILAYAH
1	Ir. Ahmad Parlindungan	Dapil Medan 1	Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Area dan Medan Denai
2	Abdul Rani, SH	Dapil Medan 2	Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Baru, dan Medan Sunggal
3	Drs. Muhammad Yusuf, S.Pd.I	Dapil Medan 5	Kecamatan Medan Deli, Medan Perjuangan, Medan Marelan dan Medan Belawan

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2009.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan perolehan suara dan kursi PPP Kota Medan di DPRD Kota Medan sejak Pemilu 1999 sampai 2009. Selama 5 tahun, yakni antara hasil pemilu tahun 1999 sampai pemilu 2004, PPP Kota Medan mengalami stagnasi atau tidak mengalami perubahan signifikan, karena jumlah kursi yang diperoleh PPP Kota Medan tetap, yakni sekitar 4 kursi saja. Kemudian pada lima tahun berikutnya PPP Kota Medan malah kehilangan satu kursi, dan menempatkan wakilnya di DPRD Kota Medan hanya 3 orang.

Selain itu, anggota DPRD Kota Medan yang berasal dari PPP Kota Medan, tidak mewakili seluruh dapil (daerah pemilihan) yang ada. Dari data yang ada, hanya 3 sampai 4 dapil saja yang diwakilinya, dari 5 dapil Kota Medan. Ini

menunjukkan bahwa sebaran pemilih PPP Kota Medan tidak merata, hanya pada daerah-daerah pemilihan tertentu saja. Berdasarkan analisis peneliti, menunjukkan bahwa hanya daerah yang basis keagamaan (Islam) yang banyak saja yang mampu dipengaruhi oleh PPP Kota Medan untuk memilih. Sementara bagi pemilih yang sebaran penduduknya merata dari segi agama dan suku, tidak mampu dikuasai oleh PPP Kota Medan.

Contoh sederhana adalah pada dapil Medan 4, selama 10 tahun terakhir, PPP Kota Medan tidak mampu menempatkan wakilnya dari dapil ini untuk duduk di DPRD Kota Medan. Kemudian, pada Pemilu tahun 2009, PPP Kota Medan tidak mampu menempatkan wakilnya dari dua dapil, yakni Dapil Medan 3 dan Dapil Medan 4. Kondisi ini tentu menjadi masalah serius yang harus dicari tahu akar permasalahannya oleh pengurus PPP Kota Medan dan anggota DPRD Kota Medan yang mewakili PPP Kota Medan.

Terjadinya penurunan drastis perolehan suara dan kursi PPP di DPRD Kota Medan selama 10 tahun terakhir juga diamini oleh H.M. Yunus Rasyid, SH. M.Hum ketika peneliti melakukan mewawancarainya. Selaku orang yang pernah memimpin organisasi partai politik berbasis Islam ini (PPP) memang mengakui bahwa terjadi stagnasi pada perkembangan dan perolehan suara PPP di Kota Medan. Hal ini menurut beliau banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu internal PPP sendiri maupun oleh faktor eksternal PPP.

Di internal PPP sendiri, terjadi tarik menarik kepentingan antar sesama pengurus dan anggota dalam mengelola partai maupun ketika mengakomodir kepentingan masyarakat sebagai pendukung PPP. Kadang kala terjadi perbedaan prinsip antar sesama pengurus dalam mengurus partai. Akibatnya program-program yang akan ditawarkan kepada masyarakat menjadi tidak terlaksana secara baik. Sehingga masyarakat tidak dapat merasakan program yang ditawarkan oleh partai, karena anggota PPP Kota Medan hanya sibuk dengan persoalan internal partai.

Kemudian pada eksternal PPP, khususnya di kalangan masyarakat pemilih, sudah dapat memahami dan mengerti akan kondisi partai politik pada umumnya, dan PPP khususnya. Sepak terjang partai politik selama ini sudah diketahui

eksistensi dan kemauannya terhadap masyarakat. Oleh karenanya, PPP harus jeli membaca kondisi ini apabila tidak mau terus menerus terjebak pada terjadinya stagnasi perolehan suara dan kursi di Kota Medan.

Kenyataan ini juga diakui oleh Zainuddin, SH selaku orang yang juga pernah duduk sebagai pengurus PPP Kota Medan. Bahkan lebih tegas Zainuddin SH mengatakan bahwa banyaknya jumlah partai politik yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Medan diakui sebagai tantangan terberat dalam meraup suara masyarakat pemilih, khususnya umat Islam. Apalagi terhadap partai politik berbasis Islam. Jadi tantangannya baik antar sesama partai politik Islam maupun tantangan dengan partai politik Nasional dalam meraih suara masyarakat pemilih, khususnya Islam. Oleh karenanya menurut Zainuddin SH, PPP Kota Medan ke depan harus berbenah diri dan memperbaiki kinerja partai agar tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang masih mempercayainya sebagai penyalur aspirasi politik.

#### **J. Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Perolehan Suara dan Kursi PPP Di DPRD Kota Medan**

Melihat fenomena yang terjadi, tentu menjadi tanda tanya mengapa hal ini bisa terjadi pada PPP Kota Medan, yang sudah ada sejak zaman Orde Baru sampai era reformasi sekarang. Terjadi penurunan drastis perolehan suara PPP Kota Medan selama sepuluh tahun terakhir (1999-2009). Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan sekali, bahkan mungkin bisa tidak ada lagi wakil PPP Kota Medan yang duduk di kursi DPRD Kota Medan. Perlu dicermati dan difahami persoalan-persoalan yang muncul menjadi penyebab menurunnya perolehan suara dan perolehan kursi PPP di Kota Medan.

Pada hal apabila dicermati secara mendasar, PPP jelas-jelas menyandarkan asas partai kepada ajaran agama Islam, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), yakni “PPP berasaskan Islam”.<sup>222</sup> Kemudian, dalam pengembangannya, PPP memiliki

---

<sup>222</sup>DPP PPP, *Ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan* (Jakarta: 2011), h. 3.

beberapa prinsip yang diambil dari ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan pada Pasal 4 AD/ART partai, yakni:

Prinsip-prinsip perjuangan PPP adalah:

- a. Prinsip ibadah;
- b. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar;
- c. Prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan;
- d. Prinsip musyawarah;
- e. Prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan;
- f. Prinsip istiqamah.<sup>223</sup>

Selanjutnya, dalam mengembangkan partai, PPP melakukan usaha-usaha pengembangan *ukhuwah Islamiyah*, *ukhuwah insaniyah*, *ukhuwah wathaniyah*, menggunakan asas musyawarah, dan menghantarkan masyarakat adil dan makmur mencapai *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* (Pasal 6 AD/ART), sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, daya tarik PPP yang mampu diperlihatkan kepada masyarakat, khususnya di Kota Medan, terlebih-lebih umat Islam adalah lambang partai yang mencerminkan kiblat umat Islam yang mudah diingat, karena teraplikasi dalam pelaksanaan ibadah sholat lima waktu, dan pelaksanaan ibadah haji, yakni Ka'bah di Baitullah (Mekkah) (Pasal 7 AD/ART). Hal ini dikembalikan kepada lambang awal kehadiran PPP pada tahun 1973, yang sempat berganti dengan lambang bintang segi lima.

Selain itu, dari Dewan Pimpinan Pusat sampai Dewan Pimpinan Cabang, PPP memiliki Majelis Syari'ah. Itu artinya PPP memiliki orang-orang atau Ulama yang bertugas memberikan nasehat/bimbingan dan arahan dalam bidang agama Islam kepada pengurus partai agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama Islam (Pasal 34 AD/ART). Kemudian, dilihat dari sisi keanggotaan, maka anggota PPP seluruhnya beragama Islam. Tidak ada anggota PPP yang berasal dari agama lain, kecuali agama Islam.

Mencermati hal ini, tentu sangat riskan melihat perkembangan PPP Kota Medan yang mengalami penurunan dari segi perolehan suara dan kursi di DPRD Kota Medan. Jika ditelusuri secara mendalam, ada beberapa faktor penyebab menurunnya perolehan suara dan kursi PPP Kota Medan, antara lain:

---

<sup>223</sup>*Ibid.*

## 1. Melemahnya dukungan masyarakat terhadap PPP

Dukungan masyarakat atau umat Islam terhadap partai yang memakai lambang Islam, seperti PPP yang menggunakan lambang Ka'bah, sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan elektabilitas partai tersebut dalam kancah politik nasional maupun daerah. Eksistensinya PPP di Kota Medan sebagai pemenang kedua pada pemilu di era Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari simbol-simbol atau lambang yang dipergunakan oleh partai ini dalam meraup suara masyarakat, khususnya umat Islam. PPP disimbolkan sebagai partai umat Islam, dan mampu menyuarakan aspirasi umat Islam di DPRD Kota Medan. PPP menjadi pilihan bagi umat Islam di Kota Medan karena dianggap bahwa PPP merupakan partainya orang Islam.

Sejak tahun 1977 sampai 1997, di tengah-tengah tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru setiap menjelang Pemilu melalui lembaga pemenangan partai di tingkat lokal untuk memenangkan Golkar. Tetapi bagi orang-orang Islam yang ada di Kota Medan sebahagian memilih PPP, dari tiga peserta Pemilu (PPP, Golkar, dan PDI).

Alasan sederhana dikemukakan oleh masyarakat Kota Medan, karena PPP adalah simbol dari partai politik Islam. Dan wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II, maupun kepengurusan PPP mulai dari tingkat pusat sampai ranting, keseluruhan adalah beragama Islam. Tidak ada anggota masyarakat di luar agama Islam yang masuk ke PPP, baik sebagai pengurus maupun wakil rakyat di DPR.

Salah seorang anggota masyarakat Kota Medan yang berhasil penulis wawancarai, yakni Bapak H. Abdul Chalid KS, pada tanggal 2 Februari 2012 di kediaman beliau di Mabar menjelaskan sebagai berikut: "Alasan saya memilih PPP sebagai partai politik pada setiap Pemilu karena PPP merupakan partai Islam. Lambang partai jelas menunjukkan lambang Islam, baik itu Ka'bah maupun bintang segi lima. Ka'bah jelas menunjukkan arah kiblat umat Islam dalam melaksanakan ibadah sholat, dan tempat melaksanakan ibadah haji. Dan lambang bintang segi lima yang harus dirobah PPP pada tahun 1987 karena tekanan dari penguasa Orde Baru menunjukkan rukun Islam, dan mengingatkan umat Islam

untuk mengerjakan sholat lima waktu. Jadi bagi saya, tidak ada pilihan lain, tetap memilih PPP sebagai saluran aspirasi politik saya. Walaupun saat ini banyak pilihan partai politik lain yang konon katanya menyahuti aspirasi politik umat Islam, tetapi saya tetap tidak bergeming, bahwa PPP tetap pilihan saya, dan itu sudah teruji dari zaman ke zaman”.

Ketika seseorang memilih partai politik yang berazaskan agama, yakni Islam, merupakan sesuatu hal wajar dalam percaturan politik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Abdul Munir Mulkan yang dikutip oleh Pramono U. Tanthowi yang menjelaskan sebagai berikut:

Masyarakat Indonesia mayoritas bukan merupakan pemilih yang rasional, dalam artian mereka memilih partai politik atau calon anggota legislatif dari suatu partai berdasarkan pada program yang ditawarkan dan akibat terhadap kehidupan mereka. Akan tetapi lebih kepada rasa emosional keagamaan, bahkan terkesan simbolis dan fanaik terhadap simbol-simbol agama tersebut yang dipakai oleh suatu partai politik. Walaupun kemudian terjadi perubahan simbol, akan tetapi identitas suatu partai politik tersebut akan tetap dianggap mewakili rasa agama, walaupun simbolnya berganti.<sup>224</sup>

Apabila pernyataan di atas digandengkan dengan jawaban anggota masyarakat yang telah diwawancarai, nampaknya keduanya sejalan dan seiring. Bahwa tidak ada masalah bagi masyarakat pemilih untuk menetapkan pilihannya pada salah satu partai politik yang dicintai dan diyakininya mampu menyalurkan aspirasi politiknya, walaupun partai politik itu sendiri sudah berganti baju alias berganti lambang partai.

Seperti halnya PPP, pertukaran asas dari Islam menjadi Pancasila serta digantinya lambang Ka’bah menjadi Bintang segi lima, dan sejak reformasi sudah kembali menggunakan Ka’bah sebagai lambang partai, tidak mempengaruhi anggapan masyarakat bahwa PPP adalah partainya orang Islam, dan sebagai penyampai aspirasi umat Islam kepada pemerintahan yang berkuasa. Memilih PPP berarti memperjuangkan agama Islam. Karena itu, berbagai tekanan maupun intimidasi dan praktek-praktek curang yang dilakukan oleh para penyelenggara

---

<sup>224</sup>Pramono U. Tanthowi, *Kebangkitan Politik Kaum Santri* (Jakarta: PSAP, 2005), h. 21.

Pemilu tidak mampu menggoyahkan keinginan sebahagian masyarakat Kota Medan untuk memilih PPP.

Setelah era reformasi di mulai, yakni pada tahun 1999 sampai sekarang, puluhan partai politik tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan. Demikian juga partai-partai yang menyuarakan aspirasi umat Islam tumbuh dan berkembang, berdampingan dengan PPP. Di Kota Medan, tercatat ada Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan lain-lain.

Kondisi ini mempengaruhi dukungan masyarakat atau umat Islam terhadap PPP, karena banyak pilihan bagi umat Islam untuk menyalurkan aspirasi politiknya, tidak terbatas hanya pada satu partai politik semata. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang anggota masyarakat Kota Medan, yakni Bapak Muhammad Sofyan Falar di kediamannya di Medan Amplas, tanggal 4 Februari 2012 menjelaskan sebagai berikut “Saya berpikir bahwa dulu ketika memilih PPP saat pemilu masa Orde Baru, saya anggap memperjuangkan tegaknya syari’at Islam. Dari tiga partai politik yang ada, hanya PPP yang jelas-jelas berbasiskan ajaran Islam dan dianggap mampu membela kepentingan umat Islam di masa itu. Namun sekarang terjadi perubahan yang signifikan, dengan banyaknya partai Islam dan partai nasional yang ikut memperjuangkan aspirasi umat Islam, maka PPP tidak lagi saya anggap satu-satunya partai yang mampu memperjuangkan aspirasi saya sebagai umat Islam. Saya bisa menyalurkannya kepada partai lain, selama ia beragama Islam dan mau memperjuangkan agama Islam”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa umat Islam tidak lagi menggantungkan harapannya hanya kepada satu partai semata, misalnya kepada PPP saja. Tetapi kepada partai-partai yang berasaskan Islam lainnya atau partai nasional yang memperjuangkan aspirasi umat Islam. Kondisi ini nyata-nyata mempengaruhi perolehan suara PPP di Kota Medan. Hal ini sudah terasa sejak pemilu 1999, 2004 sampai 2009, karena mengalami penurunan perolehan suara dan kursi di DPRD Kota Medan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada banyak orang yang berpikiran sama dengan pikiran narasumber yang peneliti wawancarai dalam melihat

perkembangan PPP dewasa ini. Oleh karenanya menjadi masalah yang cukup serius bagi kepengurusan PPP Kota Medan untuk mengembalikan dukungan masyarakat, khususnya umat Islam Kota Medan agar mau kembali memilih dan mendukung PPP Kota Medan.

## 2. Program Kegiatan yang ditawarkan PPP Kota Medan Kepada Masyarakat yang kurang menarik

Menurunnya perolehan suara dan kursi PPP Kota Medan di DPRD Kota Medan selama kurun waktu 10 tahun terakhir, selain karena lemahnya dukungan yang diberikan oleh masyarakat atau umat Islam, juga didasarkan kepada program yang ditawarkan oleh PPP Kota Medan yang tidak mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat atau umat Islam Kota Medan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semasa Orde Baru, bagi sebahagian masyarakat atau umat Islam tidak terlalu peduli terhadap program yang ditawarkan untuk disampaikan. Hal ini dikarenakan sebahagian masyarakat atau umat Islam menaruh harapan yang besar terhadap kehadiran PPP sebagai sarana atau alat memperjuangkan kepentingan umat Islam di DPRD Kota Medan maupun kepada pemerintah yang berkuasa, baik kepada pemerintah pusat, propinsi maupun pemerintahan Kota Medan. Disadari umat Islam bahwa PPP di masa Orde Baru tetap akan membantu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam.

Tetapi, seiring dengan perubahan zaman, terjadinya proses transisi kekuasaan politik di era reformasi dengan angin keterbukaan yang luas, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai, mencermati dan memahami sepak terjang sebuah partai, lewat berbagai media massa dan media elektronik, serta mencermati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tingkat pendidikan masyarakat secara perlahan namun pasti terus meningkat. Di dukung pula kesadaran berpolitik masyarakat yang semakin baik, kondisi ini mempengaruhi cara pandang dan pilihan yang ditetapkan oleh masyarakat terhadap sebuah partai.

Kenyataan ini tentu saja mempengaruhi pemikiran sebahagian masyarakat atau umat Islam di Kota Medan dalam mencermati perkembangan PPP dan program yang ditawarkan. Kemudian membandingkannya dengan program dan kegiatan yang ditawarkan oleh partai lain, baik partai berbasis massa Islam maupun nasional. Masyarakat semakin cerdas untuk memilih partai yang benar-benar memperjuangkan aspirasi politik dan kepentingan kehidupannya.

Hal ini terungkap sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah seorang anggota masyarakat yang tinggal di kawasan Medan Labuhan, yakni dengan Bapak Drs. Ismail pada tanggal 5 Februari 2012 dikediamannya, yang mengatakan sebagai berikut: “Pada awal permulaan PPP dibentuk sampai beberapa tahun kemudian, PPP begitu baik program kegiatan yang ditawarkan kepada masyarakat atau umat Islam, terlebih-lebih lagi di bidang agama Islam. PPP di masa-masa ini mampu menyuarakan kepentingan umat Islam untuk disampaikan kepada pemerintah, yang kadang-kadang mengabaikannya, misalnya pembangunan sarana ibadah. Tetapi sejak tahun 1987 sampai menjelang jatuhnya Orde Baru, yakni sekitaran tahun 1997, program yang ditawarkan sangat sedikit bagi kepentingan masyarakat dan umat Islam. Bahkan PPP saya anggap belakangan sebagai pengikut dari keputusan yang diambil oleh pemerintah. Kalau saat sekarang ini, setelah masa reformasi, PPP tidak berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Bahkan kalau saya cermati, semakin menurun dan memudar wibawanya di kalangan masyarakat. PPP dan pengurus serta anggota dewan yang mewakili PPP hanya banyak mengurus keperluan partainya dan kepentingan pribadi mereka sendiri. Itu pemikiran saya, entah kalau orang lain yang memahaminya ya, saya tidak tahu, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan kepada anda”.

Informasi yang didapatkan oleh sebahagian masyarakat atau umat Islam terhadap PPP, baik dari berbagai media atau dari berbagai diskusi dan perbincangan dengan berbagai kalangan maupun sanak keluarga, semakin memperluas cara pandangan sebahagian masyarakat atau umat Islam untuk memilih atau tidak memilih PPP dalam setiap Pemilu. Kondisi ini ikut mempengaruhi perolehan suara dan kursi PPP di Kota Medan.

Program yang ditawarkan baik dalam kegiatan sehari-hari maupun pada saat kampanye tidak mampu menyentuh kepentingan masyarakat, bahkan cenderung hanya bersifat ide atau gagasan semata, sementara masyarakat atau umat Islam butuh *action* atau pelaksanaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau umat Islam secara langsung. Pengurus dan juru kampanye hanya mampu mengulang-ulang program partai dari dahulu sampai sekarang hanya itu ke itu saja membuat masyarakat atau umat Islam menjadi jenuh terhadap tawaran program tersebut.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Nurfadhillah S.Pd.I, seorang ibu rumah tangga dan guru di kawasan Kecamatan Medan Deli melalui wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 5 Februari 2012 dikediamannya sebagai berikut: “Selama ini saya menetapkan pilihan untuk memilih PPP karena saya yakin bahwa PPP adalah pilihan terbaik bagi saya, dan saya menyukai PPP karena partai ini jelas ideologinya, yakni Islam. Tetapi, saat sekarang setelah mencermati perkembangan politik tanah air, ditambah lagi informasi yang diberikan oleh suami dan anak-anak saya, membuat saya ragu untuk menetapkan pilihan kepada PPP. Di samping banyaknya hadir partai lain yang sama ideologinya, atau sama-sama menyuarakan aspirasi umat Islam, mempengaruhi pilihan saya. Kemudian, setelah saya cermati selama ini PPP di lingkungan tempat tinggal saya tidak banyak berbuat untuk kepentingan masyarakat. Program yang ditawarkan pun tidak mengalami perubahan. Kebanyakan hanya janji-janji saja, tetapi setelah mendapatkan perolehan suara dan duduk di kursi DPRD Kota Medan, masyarakat atau umat Islam ditinggalkan begitu saja. Jadi sekarang ini bagi saya, PPP bukan lagi pilihan satu-satunya, banyak partai yang lebih mampu menyerap aspirasi saya sebagai anggota masyarakat, dan saya akan mencermatinya sebelum menetapkan pilihan saya”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat dan umat Islam sudah semakin cerdas karena adanya perubahan peta politik bangsa Indonesia dewasa ini akibat reformasi 1998. Isu-isu lama yang diangkat oleh pengurus dan juru kampanye PPP tentang pembentukan negara Islam, atau program yang dinilai tidak ideal untuk dilaksanakan tidak menarik bagi sebahagian anggota masyarakat atau umat Islam. Ditambahkan lagi juru kampanye PPP yang tidak menarik, baik

dari segi penampilan, cara berbicara, usia, cara pandang, dan sudah terlalu sering dilihat menjadi masalah yang harus dicermati oleh pengurus PPP Kota Medan dalam meraih suara dan kursi di DPRD Kota Medan.

Dewasa ini isu program penting yang harus ditawarkan dan dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah isu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan bagi masyarakat. Isu ini menjadi hangat untuk diperbincangkan karena menyangkut kemaslahatan umat dan hajat hidup orang banyak. Dalam kaitan ini, bila dicermati secara mendalam, PPP Kota Medan tidak mampu menyahutinya. Jika dibandingkan dengan PKS Kota Medan, tentu partai ini lebih energik.

Contoh, di bidang kesehatan, PKS Kota Medan menyediakan sarana angkutan (*ambulance*) bagi orang yang sedang sakit dan meninggal untuk dipergunakan secara gratis. Kemudian, PKS Kota Medan sering mengadakan kegiatan pengobatan gratis, pengembangan UKM, dan lain-lain yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, di bidang pendidikan, bekerjasama dengan orang-orang yang berkepentingan dengan dunia pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menyediakan sarana pendidikan, dan menggali potensi-potensi yang ada di lingkungan masyarakat untuk dididk secara gratis. Sementara itu, PPP Kota Medan tidak melakukannya lewat aplikasi dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan itu, pernyataan Nilawati SE, seorang ibu rumah tangga dan wiraswastawan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 7 Februari 2012 di kediamannya menegaskan sebagai berikut: “Setiap kali Pemilu diadakan, PPP selalu mengusung ide atau gagasan pemikiran tentang perlunya dibentuk partai Islam untuk diperjuangkan, agar melahirkan negara Islam. Bagi saya, ide atau gagasan pemikiran tersebut sudah usang, dan tidak laku lagi dijual kepada masyarakat. Sekarang ini yang terpenting bagi masyarakat adalah kesejahteraan hidup, tersedianya bahan makanan, sarana pendidikan, sarana kesehatan yang mudah dan murah didapat. Pendapatan masyarakat bertambah, dan lapangan kerja bagi generasi muda yang semakin banyak sesuai dengan tingkat pendidikan yang dilalui. Saya pikir itu yang harus dilakukan oleh PPP

Kota Medan, jika mau perolehan suara dan kursinya di DPRD Kota Medan bertambah pada pemilu di masa datang”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa terjadinya penurunan perolehan suara dan kursi PPP di DPRD Kota Medan salah satunya dilatar belakangi ketidak mampuan pengurus dalam melakukan regenerasi serta tidak mampu menawarkan program-program yang dapat diaplikasi secara langsung menyahuti kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak. Oleh karenanya, harus ada lompatan jauh yang dilakukan oleh pengurus PPP Kota Medan dalam pengembangan program yang pro rakyat dan dapat dirasakan rakyat secara cepat dan langsung, tanpa harus menunggu waktu kampanye Pemilu dilakukan.

### 3. Peran Tokoh PPP yang Kurang Mampu Menarik Perhatian Masyarakat atau Umat Islam

Setiap partai memiliki tokoh sentral yang mampu memainkan peran dalam usaha mengembangkan partai ke arah yang lebih baik. Hal ini begitu penting untuk menarik minat masyarakat memilih partai yang bersangkutan. Oleh karenanya setiap partai menempatkan tokoh-tokoh penting di masyarakat menjadi sentral organisasi politik, baik karena kharismaniknya maupun karena jabatannya di masyarakat.

Demikian pula halnya dengan PPP, khususnya di Kota Medan tentu saja memiliki tokoh-tokoh penting sebagai sentral pergerakan politik dalam usaha pengembangan partai maupun dalam usaha meraih simpati dan dukungan suara dan kursi sebanyak-banyaknya dari masyarakat pemilih yang ada di Kota Medan. Karena PPP merupakan partai dengan basis keagamaan yang kuat, yakni agama Islam, maka tokoh-tokoh penting yang ada di PPP merupakan tokoh-tokoh agama atau Ulama, ustaz, atau pendidik.

Adapun yang menjadi masalah dalam hal ini adalah ketidak mampuan para tokoh agama yang duduk di kepengurusan maupun yang simpati kepada PPP Kota Medan dalam mempengaruhi masyarakat pemilih untuk menetapkan pilihannya kepada PPP. Hal ini bisa disebabkan tokoh yang ada tidak mampu menarik dan

memikat masyarakat, atau tidak memiliki kharismatik atau pengaruh yang urgen dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang anggota masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Johor, yakni Bapak Drs. Abdul Hafiz, MM ketika peneliti wawancarai di kediamannya pada tanggal 7 Februari 2012 sebagai berikut: “Saya melihat bahwa di dalam PPP sekarang ini terutama di Kota Medan kurang memiliki tokoh-tokoh penting, khususnya Ulama yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat untuk diperjuangkan baik kepada pemerintah maupun untuk disampaikan kepada DPRD Kota Medan. Kondisi ini menurut saya karena para pengurus dan tokoh-tokoh yang ada di PPP lebih banyak bersikap pragmatis dan mementingkan dirinya sendiri, bukan mengakomodir kepentingan umat atau masyarakat. Akibatnya, bagi kami masyarakat kurang simpati kepada PPP dan tokoh yang bersangkutan”.

Apabila direfleksi ke belakang, yakni di masa-masa awal terbentuknya PPP sampai beberapa tahun sebelum Orde Baru mengalami keruntuhan, menunjukkan bahwa banyak tokoh-tokoh atau Ulama yang berperan penting di dalam mengembangkan PPP, dan mampu mengelola kepentingan masyarakat atau umat Islam, khususnya di Kota Medan.

Kemudian, selain di PPP, banyak tokoh-tokoh kharismatik yang ada di Kota Medan, seperti Ulama dan tokoh agama yang berperan aktif di partai lain, seperti di Golkar, PAN, PKS, PKB dan lain-lain. Sehingga dengan tersebarnya para Ulama dan tokoh-tokoh kharismatik di berbagai partai yang ada, maka terjadi tarik menarik simpati di kalangan masyarakat untuk memilih partai yang ada, tidak terfokus hanya kepada PPP saja.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh salah seorang anggota masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Maimun, yakni Bapak Muhammad Hasan di kediamannya pada tanggal 6 Februari 2012 yang menyebutkan sebagai berikut: “Sekarang ini tokoh-tokoh panutan seperti Ulama dan tokoh agama tidak hanya ada di PPP saja, tetapi sudah banyak tersebar di berbagai partai politik yang ada di Kota Medan ini. Baik itu partai yang jelas-jelas berideologi Islam, seperti PKS maupun PBB, atau partai yang berideologi

nasional dan mau mengakomodir kepentingan umat Islam, seperti PAN, PKB, atau partai nasional sekuler sekalipun, seperti Golkar atau PDI-P”.

Adanya sebaran tokoh-tokoh kharismatik seperti Ulama dan tokoh agama di berbagai partai politik yang ada di Kota Medan menyebabkan terjadi persaingan di kalangan partai politik untuk mengakomodir masyarakat pemilih agar memilih partainya, sehingga partai yang ada dapat meraup keuntungan yang besar dalam memperoleh suara masyarakat dan menempatkan wakilnya menjadi anggota DPRD Kota Medan. Kondisi ini tentu mempengaruhi penurunan suara PPP Kota Medan, dan mengurangi kursi PPP di DPRD Kota Medan.

#### 4. Persaingan Antar Partai Politik

Persaingan antar partai politik di Kota Medan mengalami dinamika yang panjang, sejak zaman Orde Lama dengan multi partai. Kemudian pada masa Orde Baru dengan fusi partai, dan era Reformasi kembali dengan multi partai. Pada era Reformasi, tercatat beberapa partai yang berideologi Islam, seperti PPP, PKS, PBB. Kemudian, beberapa partai yang berideologi nasional, tetapi mengakomodir kepentingan umat Islam, seperti PKB, PAN, PKNU. Selain itu, partai yang nyata-nyata Nasional, seperti Golkar, PDI-P, Gerindra dan Hanura, juga memiliki kepentingan yang sama untuk mengakomodir kepentingan umat Islam.

Banyaknya jumlah partai politik menyebabkan terjadi persaingan untuk merebut hati masyarakat agar mau memilih partainya. Janji-janji diberikan kepada masyarakat bahwa partainya adalah yang mampu mengakomodir atau menyahuti keinginan masyarakat. Sementara itu partai yang lain dinyatakan tidak memiliki kemampuan untuk itu.

Ketika masa Orde Baru, pilihan bagi masyarakat muslim di Kota Medan hanya bertumpu kepada PPP saja sebagai saluran aspirasi politik. Tetapi di masa era Reformasi ini, pilihan untuk menyalurkan aspirasi politik terbuka luas kepada sejumlah partai politik yang ada. Oleh karenanya, kondisi ini menjadikan PPP harus bersaing ketat dengan partai-partai yang ada. PPP tidak hanya bersaing dengan partai yang nyata-nyata berazaskan Islam semata. Tetapi juga bersaing dengan partai politik nasional dan terbuka yang juga menjadikan umat Islam

sebagai basis garapan dalam meraup suara dan mendudukkan wakilnya di DPRD Kota Medan.

Sementara itu, bagi masyarakat pemilih, kehadiran banyak partai yang dapat mengakomodir kepentingannya merupakan hal yang baik, karena dapat menguji integritas dan eksaptabilitas partai dalam menyalurkan aspirasi politik masyarakat dan merespon kepentingan-kepentingan masyarakat terhadap pembangunan di Kota Medan, dan pemenuhan kehendak-kehendak masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kota Medan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan salah seorang anggota masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Helvetia yang berhasil peneliti wawancarai dikediamannya pada tanggal 8 Februari 2012, yakni Bapak Sahrul Sinambela sebagai berikut: “Saya merasa bahwa kehadiran partai politik yang begitu banyak sangat membantu bagi saya untuk menentukan pilihan kepada partai mana aspirasi politik saya salurkan. Saya dapat memilih dan memilah mana kira-kira partai politik yang mau dan mampu menyuarakan keinginan-keinginan saya terhadap pemerintahan Kota Medan, terutama menyangkut kehidupan keagamaan saya, sebagai seorang yang beragama Islam. PPP sih oke-oke saja bagi saya sebagai partai yang sudah jelas asas partainya, yakni Islam untuk menyalurkan aspirasi politik saya sebagai muslim. Tetapi partai lain pun tidak menutup kemungkinan bagi saya untuk memberikan suara dan aspirasi politik saya. Jadi, menurut hemat saya, semakin banyak partai politik, semakin banyak pilihan bagi penyaluran aspirasi masyarakat, dan itu sah-sah saja, dan malah baik bagi kehidupan politik masyarakat”.

Ketika sebuah partai mampu mengakomodir kepentingan masyarakat Kota Medan, khususnya umat Islam pada satu kali putaran Pemilu, memberikan peluang bagi partai tersebut untuk dipilih kembali pada Pemilu berikutnya. Hal ini disebabkan ada tanggung jawab partai terhadap kepentingan masyarakat atau umat Islam, yakni memberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politik dan kepentingannya terhadap pemerintahan Kota Medan.

Tetapi apabila sebuah partai tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakat Kota Medan, terutama umat Islam pada satu kali putaran Pemilu,

maka pada Pemilu berikutnya akan tertutup kesempatan bagi partai tersebut untuk menarik simpati masyarakat agar memilihnya kembali. Kondisi ini nyata-nyata akan menyebabkan turunnya perolehan suara dan kursi yang akan diwakilkan di DPRD Kota Medan. Akibatnya, partai tersebut tidak bisa mengambil keputusan atas nama partainya, dan mengkritisi kebijakan pemerintahan Kota Medan, yang diakibatkan minimnya suara dan perwakilan yang duduk di DPRD Kota Medan, sehingga dianggap tidak signifikan.

Hal ini terjadi pada PPP Kota Medan, yakni semasa tahun 1997, PPP meraih 11 suara, tetapi hanya berselang dua tahun berikutnya, yakni pada tahun 1999 perolehan suara dan jumlah kursi yang diwakilkan di DPRD Kota Medan menjadi turun drastis, yakni hanya tinggal 4 kursi saja. Kemudian, lima tahun berikutnya juga tetap sama, tidak mampu meningkatkan perolehan suara, dan menambah kursi di DPRD Kota Medan.

Malah, apabila ditelusuri secara mendalam hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, menunjukkan bahwa perolehan suara PPP Kota Medan cenderung menurun pada tahun 2004, walaupun dapat meraih 4 kursi di DPRD Kota Medan. Selanjutnya pada tahun 2009, PPP Kota Medan mengalami penurunan lebih drastis lagi dalam perolehan suara dan penempatan wakilnya di DPRD Kota Medan, karena hanya menempatkan wakilnya sebanyak 3 orang saja.

Fakta ini menunjukkan bahwa PPP Kota Medan mengalami degradasi atau penurunan terhadap suara pemilih. Dan salah satu penyebabnya adalah persaingan di antara sesama partai untuk meraup suara pemilih Kota Medan yang majemuk dan multi etnis ini. Ini menunjukkan bahwa mesin politik partai di tingkat Kabupaten/Kota, khususnya di Kota Medan tidak bekerja secara maksimal untuk meraih simpati dan harapan dari pemilih agar mau memberikan pilihannya kepada PPP.

Kalau saja di tingkat Kabupaten/Kota, kondisi ini terjadi, bisa merembes kepada tingkatan yang lebih tinggi, yakni pada tingkat Propinsi, dan tingkat pusat. Akibatnya, PPP akan semakin kehilangan suara pemilih, dan berakibat pula

hilangnya kursi atau tidak adanya wakil-wakil rakyat dari PPP yang duduk di DPRD Kota Medan, DPRD Sumatera Utara, atau DPR Pusat.

Fakta-fakta inilah yang menjadi penyebab turunnya jumlah pemilih atau suara PPP di Kota Medan yang berpengaruh terhadap jumlah kursi yang diperoleh untuk menempatkan wakilnya di DPRD Kota Medan. Untuk itu, pengurus PPP Kota Medan tidak boleh berdiam diri mencermati perkembangan yang ada. Selanjutnya mengambil langkah-langkah strategis demi penyelamatan partai agar dapat meraih suara terbanyak, dan menempatkan wakilnya atau memperoleh kursi di DPRD Kota Medan sebanyak mungkin. Sehingga mampu menguatkan kritisi terhadap pemerintahan Kota Medan, dan dapat membuat keputusan di DPRD Kota Medan mengatasnamakan suara PPP Kota Medan.

#### **K. Respon Umat Islam Terhadap Eksistensi PPP Dalam Mengakomodir Kepentingan Umat Islam**

Respon atau tanggapan masyarakat terhadap kehadiran suatu organisasi di wilayah tempat tinggalnya merupakan sesuatu yang wajar dan lumrah adanya. Respon atau tanggapan bisa muncul dalam bentuk positif maupun negatif. Apabila kecenderungan respon yang diberikan masyarakat berdimensi positif, ini menunjukkan bahwa masyarakat meyakini dan menaruh harapan kepada organisasi yang ada untuk mengakomodir kepentingannya. Sementara itu, apabila kecenderungan respon yang diberikan masyarakat berdimensi negatif, ini menunjukkan bahwa masyarakat meyakini dan sadar betul organisasi yang ada tidak mampu mengakomodir kepentingannya, malah kehadirannya dianggap merugikan kehidupan masyarakat.

Demikian pula halnya dengan PPP Kota Medan, masyarakat memberikan respon yang beragam terhadap kehadirannya sebagai partai politik di Kota Medan. Ada yang memberikan respon positif, dan tidak sedikit pula yang memberikan respon negatif. Kesemuanya itu bagi PPP sesungguhnya merupakan *ibrah* atau pelajaran berarti untuk meningkatkan kualitas kinerja politiknya di masa-masa yang akan datang.

Respon positif misalnya datang dari Ketua MUI Kota Medan, yakni Bapak Prof.DR.H.Mohd. Hatta, MA. Dalam wawancara yang peneliti lakukan di ruang kantor MUI Kota Medan pada tanggal 9 Februari 2012, disebutkan bahwa bagi dirinya baik secara pribadi maupun kapasitas sebagai ketua MUI Kota Medan memandang bahwa PPP Kota Medan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat Kota Medan, khususnya umat Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Terlepas hal itu berdimensi politik atau memang panggilan agama terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus PPP Kota Medan. Tetapi hal itu merupakan keuntungan yang besar bagi umat Islam untuk menambah khazanah pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Secara politik pun saya memandang bahwa PPP mampu menyuarakannya kepada pemerintah. Kritik dan sosial kontrol yang dilakukan anggota PPP yang duduk DPRD Kota Medan terhadap pemerintahan Kota Medan, menjadi bagian penting untuk membentengi dan mengakomodir kepentingan umat Islam terhadap kepentingan pemerintahan Kota Medan. Di samping jalinan harmonisasi hubungan yang baik terlihat secara nyata antara pengurus PPP dengan jajaran pemerintahan Kota Medan, terutama di tingkat *grassrout* (akar rumput). Mungkin itu yang bisa saya sampaikan menyahuti pertanyaan saudara tentang PPP Kota Medan”.

Berdasarkan pernyataan ini dapat difahami bahwa sesungguhnya respon atau tanggapan yang diberikan oleh umat Islam terhadap kehadiran PPP bersifat positif yang beranggapan bahwa partai politik ini mampu mengakomodir kepentingan umat Islam di wilayah Kota Medan. Respon positif juga datang dari mantan Ketua Pimpinan Wilayah Al-Washliyah Sumatera Utara, yakni Bapak Drs. H.M. Nizar Syarif.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengannya di sela-sela istirahat di musholla kantor PW. Al-Washliyah jalan Sisingamangaraja selesai mengerjakan sholat Zuhur pada tanggal 9 Februari 2012 menyatakan bahwa: “Saya merespon positif kehadiran PPP sejak awal berdirinya pada tahun 1973 setelah fusinya beberapa partai politik berhaluan Islam. Saya beranggapan bahwa PPP telah mampu mengakomodir kepentingan umat Islam jauh-jauh hari, dan

lebih terasa pada masa awal dahulu berdiri sampai beberapa tahun. Memang seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam sistem politik kita di negeri ini. Namun kalau saya melihat, PPP tetap pada konstalasi politiknya yang memiliki *background* (latar belakang) sebagai partai Islam. Oleh karenanya PPP harus mampu mengakomodir kepentingan umat Islam. Sebagai orang yang pernah duduk di kepengurusan wilayah Al-Washliyah Sumatera Utara, selama kepengurusan saya telah terjalin kerjasama yang baik antara organisasi massa yang saya pimpin, yakni Al-Washliyah dengan PPP. Bukan hanya di Kota Medan saja, tetapi sampai ke daerah-daerah lainnya. Berbagai aktivitas atau kegiatan keagamaan sering diadakan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam menegakkan syari'at Islam di bumi Kota Medan ini. Selain itu, kerjasama yang baik ini dapat terjalin karena sesungguhnya anggota pengurus PPP itu sebahagian berasal dari organisasi yang pernah saya pimpin, yakni Al-Washliyah. Jadi ada kedekatan emosional antara PPP dengan Al-Jam'iyatul Washliyah sebagai organisasi massa, yang tugas pentingnya adalah membina umat di bidang keagamaan maupun di bidang-bidang lainnya”.

Dalam kesempatan wawancara tersebut Bapak Drs. H.M. Nizar Syarif menambahkan pernyataan tentang rekrutmen kepengurusan PPP Kota Medan sebagai berikut: “Sebagai organisasi politik yang berbasis keagamaan, yakni agama Islam kalau bisa hendaknya pengurus yang di rekrut memiliki latar belakang pendidikan yang baik, terutama berlatar belakang pendidikan agama Islam. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang yang menjadi pengurus organisasi politik ini mampu mengkombinasikan partai politik dengan kepentingan umat Islam dalam menjaga akhlaqul karimah, menjaga ukhuwah, dan menjaga nilai-nilai luhur agama Islam, serta mampu mendorong umat Islam untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Selain itu, agar partai ini (PPP) benar-benar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena saya beranggapan bahwa partai politik ini banyak pengaruh-pengaruh negatif didalamnya. Banyak hal-hal yang tidak baik dapat menghinggapi partai politik, karena berhubungan dengan kekuasaan, kepentingan, dan pengelolaan berbagai aspek yang ada hubungannya dengan kehidupan politik masyarakat, khususnya umat Islam. Apalagi dewasa ini,

perbuatan korupsi, manipulasi, kriminalisasi, perselingkuhan, penggunaan narkoba sedang menghinggapi kehidupan masyarakat dewasa ini. Jadi kalau tidak dibentengi dengan nilai-nilai yang baik, terutama dengan latar belakang pendidikan agama Islam, saya khawatir, pengurus PPP akan terjebak dengan perbuatan-perbuatan negatif tersebut. Oleh karenanya, pimpinan organisasi politik PPP Kota Medan dalam merekrut anggota dan kepengurusannya harus menseleksi orang-orang yang ingin bergabung, dengan memperhatikan latar belakang pendidikannya, yakni pendidikan agama Islam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dah ya, saya mau pulang, ada keperluan lain lagi ya. Makasih”.

Respon positif yang diberikan seperti dijelaskan di atas menunjukkan bahwa umat Islam memang masih menaruh harapan terhadap kehadiran PPP Kota Medan dalam mengakomodir kepentingan umat Islam, terutama berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengakomodir kepentingan lainnya.

Pernyataan dua orang tokoh masyarakat di atas dapat dianggap mewakili sekian banyak umat Islam yang ada di Kota Medan dalam merespon kehadiran PPP Kota Medan untuk mengakomodir kepentingan umat Islam. Kalau dilakukan interview lagi dengan beberapa orang, kemungkinan sama jawaban yang diberikan, dan menurut hemat peneliti keduanya sudah dianggap mewakili masyarakat Kota Medan yang memandang positif kehadiran PPP Kota Medan.

Selain itu, ada juga respon negatif diberikan oleh masyarakat terhadap kehadiran PPP Kota Medan dalam mengakomodir kepentingan umat Islam. Hal ini seperti dinyatakan oleh salah seorang tokoh pemuda dan seorang tokoh LSM Yayasan Hayati Indonesia, yakni Marwan Azhari Harahap, S.Ag ketika peneliti melakukan wawancara dengannya di ruang kantor LSM tersebut pada tanggal 7 Februari 2012.

Dalam pernyataannya dijelaskan sebagai berikut: “Saya menilai bahwa PPP Kota Medan kurang responsif terhadap kepentingan umat Islam. Di samping itu, partai ini kurang kreatif dan kurang tanggap terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Contohnya, dalam kasus perubahan mesjid-mesjid yang ada di Kota Medan ini, lihatlah secara nyata bagaimana peran PPP. Hampir dapat

dikatakan tidak ada tindakan yang dilakukan PPP Kota Medan, baik secara politik melalui DPRD Kota Medan, maupun langsung turun atas nama PPP atau bersama-sama anggota masyarakat untuk mencegah hal tersebut terjadi. Di samping itu, menurut hemat saya, kalau pun ada perjuangan yang dilakukan oleh pengurus PPP, khususnya di Kota Medan, ya bersifat simbol-simbol semata atau seremonial saja. Selain itu, kalau pun PPP berbuat secara nyata ada kepentingan yang ingin diperoleh. Misalnya ketika menjelang Pemilu, barulah PPP menunjukkan jati dirinya dan mendekati umat Islam atau masyarakat. Itu pun hanya sesaat, setelah Pemilu berakhir dan telah mampu menempatkan anggotanya duduk di DPRD Kota Medan, masyarakat ditinggalkan. Sementara mereka-mereka yang duduk menjadi anggota dewan diam seribu bahasa terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Bahkan kadang cenderung lebih membela kepentingan kekuasaan daripada kepentingan orang banyak (rakyat) yang diwakilinya. Terkadang saya miris melihatnya, dan bertanya-tanya kenapa hal ini bisa terjadi pada partai politik, apalagi partai politik yang berbasis agama Islam. Oleh karenanya kawan, saya tidak bisa menaruh harapan banyak terhadap partai-partai Islam ini, khususnya PPP dalam mengakomodir kepentingan umat Islam, sesuai dengan pertanyaan yang anda tanyakan tadi. Fakta yang terjadi di lapangan berbeda jauh dengan jargon-jargon yang dikemukakan atau disampaikan mereka saat kampanye atau pada saat dilakukan dialog-dialog politik dengan media massa atau pada kegiatan-kegiatan ilmiah. Inilah realitas politik umat Islam dewasa ini, khususnya di Kota Medan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, moga bermanfaat bagi PPP Kota Medan untuk mengoreksi ke dalam organisasi agar menjadi organisasi politik yang lebih baik lagi di masa depan ya”.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan tokoh pemuda dan tokoh LSM tersebut menunjukkan bahwa PPP, khususnya di Kota Medan kurang responsif terhadap seputar persoalan yang melingkupi kehidupan umat Islam. Sehingga hal ini menyebabkan daya dukung dan perhatian publik terhadap kehadiran PPP di Kota Medan menjadi berkurang. Ini perlu menjadi catatan dan masukan bagi pengurus PPP Kota Medan untuk memperhatikan dan memperbaiki kinerja partai politik ke arah yang lebih baik lagi. Janganlah di saat ada

kepentingan, baru memperhatikan keadaan umat Islam. Kalau sudah tidak ada kepentingan, menutup mata, dan diam seribu bahasa terhadap masalah-masalah yang terjadi.

Fenomena ini mungkin terjadi juga pada partai lain, tetapi dalam kajian ini lebih memfokuskan pada PPP Kota Medan, karena menjadi kajian penelitian penulis. Adanya respon positif dan negatif dari kalangan masyarakat atau umat Islam menunjukkan bahwa telah terjadi variasi pemikiran dalam mencermati perkembangan PPP Kota Medan. Variasi ini adalah wajar, karena masing-masing pihak melihat kinerja PPP Kota Medan berdasarkan fakta di lapangan, dan latar belakang aktivitas yang dilakukan, serta sejauh mana informasi yang diperoleh tentang PPP Kota Medan.

#### **L. Problematika yang Dihadapi dan Upaya Penanggulangannya**

Setiap organisasi, apa pun yang digeluti dalam pelaksanaan dan pengembangannya pasti menghadapi berbagai problematika atau masalah-masalah yang terjadi pada sebuah organisasi, baik itu bersifat internal maupun eksternal. Demikian juga halnya dengan PPP Kota Medan, ada problematika yang terjadi pada tubuh partai politik ini, baik secara internal maupun eksternal. Berikut ini akan dijelaskan satu persatu mengenai hal tersebut.

##### **1. Problematika Internal**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Umum PPP Kota Medan, yakni dengan Bapak Aja Syahri, S.Ag didampingi oleh Sekretaris Umumnya, yakni Bapak H. Irsal Fikri, S.Sos di ruang kerjanya yang beralamat di jalan Sekip Baru No. 44 Medan pada tanggal 11 Februari 2012 menjelaskan bahwa problematika internal yang dihadapi oleh PPP Kota Medan antara lain:

- a. Elit politik partai yang kurang merasa kurang memiliki

Ada person dari elit politik partai ini yang merasa kurang memiliki terhadap partai. Akibatnya apapun persoalan yang dihadapi oleh partai ini dan bagaimanapun perkembangan partai tidak terlalu dipedulikan olehnya. Yang terpenting bagi dirinya adalah bahwa dirinya sekarang duduk di kepengurusan, atau sudah menjadi anggota dewan. Kemudian, malas mengikuti berbagai

aktivitas yang dilakukan oleh partai, baik mengikuti rapat-rapat internal, atau malas mengikuti berbagai kegiatan sosial demi kepentingan partai terhadap masyarakat banyak.

Hal ini bisa terjadi kemungkinan ketika menjadi pengurus bukan berasal dari level bawah, atau beranjak secara perlahan-lahan yang diawali dari anggota biasa sampai duduk di tingkat elit partai. Tetapi dengan tiba-tiba saja sudah direkrut menjadi pengurus partai, ditingkat wilayah Kota Medan. Dengan demikian, setelah menjadi pengurus, tidak terlalu penting baginya untuk mengurus partai.

Oleh karenanya, ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap person-person elit politik partai ini, menegur atau mengingatkan mereka, dan bila perlu mengambil tindakan terhadap sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh person partai yang tidak mau peduli terhadap partai yang membesarkan dirinya. Kalau sudah dilakukan tindakan-tindakan preventif, tetapi ternyata masih tidak mengalami perubahan yang berarti, akan diambil tindakan tegas, yakni bila perlu memecat kader yang demikian, karena dianggap lebih mementingkan dirinya daripada partai. Demikian dikemukakan oleh Ketua Umum PPP Kota Medan, yang diamini oleh sekretarisnya.

b. Konsolidasi kader dan program kegiatan yang tidak berjalan dengan mulus

Dalam kaitan ini, pengurus partai merasa sudah berbuat semaksimal mungkin untuk melakukan konsolidasi terhadap kader-kader PPP Kota Medan di seluruh wilayah Kota Medan. Namun menjadi problem pengurus adalah kader-kader yang ada tidak mau terlibat secara langsung dalam konsolidasi tersebut. Kalau diundang untuk menyatukan persepsi dan membicarakan pengembangan program partai, sering tidak hadir. Kader-kader partai yang ada tidak mau berbuat kalau tidak disuruh. Tidak ada program nyata dari kader partai terhadap usaha memajukan partai. Seringkali inisiatif tidak berasal dari kader (*button up*), tetapi harus diketok dari atas atau pimpinan pengurus (*top down*). Ini yang menyebabkan partai tidak berkembang di seluruh daerah pemilihan yang ada di Kota Medan.

Menghadapi masalah seperti ini, pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Medan, mengambil tindakan dengan menegur Pimpinan Anak Cabang yang ada di bawah pembinaannya untuk melakukan konsolidasi internal, dan melakukan kegiatan-kegiatan secara berkesinambungan untuk menunjukkan kepada masyarakat terhadap eksistensi PPP di wilayah masing-masing. Kalau tidak melakukan hal-hal tersebut, akan dilakukan tindakan baik secara persuasif maupun tindakan tegas. Demikian dikatakan oleh Aja Syahri, S.Ag selaku Ketua Umum PPP Kota Medan.

c. Rekrutmen kader/pengurus yang kurang profesional

Dalam kaitan ini menurut Ketua Umum PPP Kota Medan, ada kesalahan mendasar yang harus diperbaiki oleh partai ke depan mengenai hal ini. Yakni kader-kader atau pengurus yang direkrut harus mampu bersikap profesional. Selama ini, persoalan profesionalisme kader tidak menjadi perhatian serius untuk direkrut. Prinsip yang dikembangkan selama ini adalah siapa saja yang mau bergabung dan memiliki kepentingan untuk memajukan partai, boleh bergabung, tanpa memperhatikan aspek pendidikan yang dilalui, pekerjaan yang digeluti, atau hal-hal lainnya. Termasuk dalam kaitan ini adalah pemahaman terhadap ajaran agama Islam.

Kader-kader yang direkrut kadang kala kurang memiliki basis keagamaan yang kuat, baik itu menyangkut pemahaman keagamaan maupun berkaitan dengan pengamalan agama sehari-hari. Padahal partai ini amat menekankan aspek ketaatan kepada ajaran agama Islam. Oleh karenanya, akan menjadi rancu kalau kader yang direkrut tidak mengerti secara utuh tentang ajaran agama Islam. Kenyataan ini akan menjadi masalah di kemudian hari kalau berhadapan dengan umat Islam. Untuk itu ke depan akan coba diperbaiki dalam hal rekrutmen kader dan pengurus, dengan cara lebih selektif untuk memilih orang-orang yang direkrut, dengan melakukan *fit and profites* terhadap diri kader, dan berbagai hal yang berkaitan dengan dirinya, termasuk pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupannya sehari-hari.

d. Adanya kader yang bermasalah atau terlibat kasus-kasus

Ada kalanya kader-kader atau pengurus PPP Kota Medan bermasalah dengan persoalan hukum, atau terlibat kasus-kasus kriminalitas di wilayah Kota Medan. Hal ini bisa terjadi karena perbuatan pribadinya, atau melibatkan orang lain yang dapat merugikan dirinya sendiri. Hal ini merupakan satu keganjilan, karena oknum yang berbuat salah atau melakukan tindakan kriminal tersebut tidak menyadari atau kurang menyadari kalau dirinya berasal dari partai yang berbasiskan keagamaan, yakni partai Islam. Atau ia menyadari hal tersebut, tetapi tetap melakukan perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan masalah ini, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Medan mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang berbuat demikian. Pengurus cabang tidak segan-segan akan menegur, memperingati, dan mengambil tindakan pemecatan apabila diketahui ada pengurus atau kader yang bermasalah atau melakukan tindakan melawan hukum. Di samping itu, pengurus Cabang akan mengambil tindakan terhadap pengurus, kader atau siapa saja yang terlibat mengatasnamakan PPP Kota Medan melakukan tindakan melawan hukum dan merugikan partai dengan mengajukan ke depan pengadilan atau melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang. Ini dimaksudkan untuk menegakkan wibawa partai agar tetap dihargai oleh pengurus dan kader PPP, serta disegani oleh orang lain di luar partai PPP. Di samping tidak disalahgunakan untuk kepentingan sesaat oleh oknum anggota PPP atau orang lain.

## **2. Problematika Eksternal**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Umum PPP Kota Medan, yakni dengan Bapak Aja Syahri, S.Ag didampingi oleh Sekretaris Umumnya, yakni Bapak H. Irsal Fikri, S.Sos di ruang kerjanya yang beralamat di jalan Sekip Baru No. 44 Medan pada tanggal 11 Februari 2012 menjelaskan bahwa problematika eksternal yang dihadapi oleh PPP Kota Medan antara lain:

### **a. Persaingan antar partai politik**

Persaingan antar partai politik peserta pemilu pada tahun 2004-2009 di Kota Medan dalam merebut simpati dan suara pemilih tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dinamika PPP Kota Medan. Partai ini harus bersaing dengan

partai-partai lainnya untuk mendapatkan simpati para pemilik suara yang ada di seluruh wilayah Kota Medan, sehingga dapat menempatkan wakilnya di DPRD Kota Medan. Baik itu persaingan dengan partai yang sudah berdiri sejak tahun 1973, seperti Golkar dan PDI-P, maupun dengan partai-partai yang tumbuh setelah pasca reformasi, seperti PKS, PAN, PKB, PBB dan lain-lain. Ini yang menyebabkan PPP harus bersaing dan berjuang dengan keras agar suara pemilih tidak menghilang dari PPP.

Persaingan yang paling tajam tentu dirasakan PPP ketika berhadapan dengan partai berbasis Islam, karena sama-sama mengusung harapan umat Islam agar mendapat perhatian dan simpati dari kalangan pemerintah untuk diperjuangkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Persaingan antar partai tentu dipertunjukkan lewat program-program yang ditawarkan maupun janji-janji yang diberikan kepada masyarakat pemilih.

Melihat fakta di lapangan menunjukkan bahwa PPP sedikit mengalami kelemahan dalam merebut simpati dan suara masyarakat pemilih yang ada di Kota Medan bila dibandingkan dengan partai lain yang sama-sama berbasis Islam, seperti PKS. Hal ini karena terjadi penurunan perolehan suara PPP dan penempatan wakilnya di DPRD Kota Medan yang hanya mampu menempatkan 3 orang saja wakilnya pada Pemilu tahun 2009. Sementara itu, PKS berhasil menempatkan wakilnya sebanyak 7 orang.

Menyadari kelemahan ini, maka PPP Kota Medan berusaha berbenah diri untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Kota Medan, khususnya umat Islam agar mau kembali memilih PPP pada pemilu tahun 2014 mendatang. Langkah konkrit yang dilakukan PPP Kota Medan adalah melakukan konsolidasi pengurus dan anggota, mengupayakan mengembangkan program kerja yang pro kepada kepentingan rakyat dan umat Islam, menseleksi anggota yang akan di rekrut dan menjadi sukarelawan dalam pengembangan partai, dan menseleksi anggota yang ingin duduk sebagai anggota DPRD Kota Medan, dan sejumlah program lain yang dilakukan PPP Kota Medan sebagai upaya berbenah diri. Demikian dikatakan Ketua PPP Kota Medan, Bapak Aja Syahri S.Ag yang diamini oleh Sekretarisnya Bapak H. Irsal Fikri, S.Sos.

b. Perkembangan Masyarakat Pemilih yang semakin cerdas dan dinamis

Berkembangnya Kota Medan dari kota kecil menjadi kota Metropolitan seiring dengan perkembangan kehidupan modern dewasa ini menyebabkan bertambahnya penduduk Kota Medan dari tahun ke tahun. Baik itu karena latar belakang kelahiran, kehidupan ekonomi, maupun karena perolehan pendidikan. Hal ini tentu berimbas pula terhadap persepsi masyarakat terhadap partai politik yang ada di Kota Medan, termasuk didalamnya PPP Kota Medan.

Sebahagian masyarakat Kota Medan memandang bahwa partai politik memang merupakan saluran politik untuk menyuarakan aspirasi politik kepada pemerintah yang diwakilkan kepada anggota DPRD Kota Medan. Terhadap PPP Kota Medan, masih diberikan kepercayaan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat untuk disuarakan kepada pemerintah melalui DPRD Kota Medan. Hal ini diperoleh dari kalangan masyarakat atau umat Islam yang sudah berakar dan mencintai PPP sejak dari dahulu sampai sekarang, dan tidak mau mengubah paradigmanya dari PPP.

Sementara itu, sebahagian masyarakat memandang bahwa PPP Kota Medan mengalami stagnasi dalam perkembangannya di Kota Medan, dan dianggap tidak mampu mengikuti trend yang ada dewasa ini. Jargon-jargon partai yang disampaikan sudah kuno dan dianggap tidak relevan lagi dengan kehidupan modern dewasa ini. Pemikiran ini muncul dari kalangan pemilih pemula yang usianya masih remaja akhir (17 sampai 30 tahun) dengan tingkat pendidikan yang diperoleh sudah memadai, yakni pada jenjang pendidikan SMU dan perguruan tinggi.

Menyikapi hal-hal di atas tentu saja menjadi perhatian dari pengurus PPP Kota Medan untuk menyesuaikan program dan tujuan yang ingin dicapai dengan keadaan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis dan semakin cerdas. Paradigma baru program PPP Kota Medan harus mampu menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa harus meninggalkan identitas partai yang berbasiskan ajaran agama Islam. Upaya mensinkronkan program dengan perkembangan masyarakat pemilih merupakan pilihan tepat agar PPP Kota Medan tetap dicintai dan dapat dipilih oleh masyarakat yang ada di Kota Medan. Langkah

ini penting untuk menyahuti dan mempersiapkan diri pada pemilu tahun 2014 yang akan datang.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat ditegaskan bahwa perkembangan PPP Kota Medan tahun 2004-2009 sudah ada sejak PPP melakukan fusi beberapa partai politik Islam pada tahun 1973. Perolehan suara PPP Kota Medan mengalami pasang surut seiring dengan perjalanan partai sejak dari pembentukannya di tahun 1973 sampai saat sekarang ini, kadang meningkat, kadang menurun, atau tetap tidak mengalami perubahan. Awal era reformasi, pemilu tahun 1999 jumlah suara PPP mengalami penurunan dari pemilu 1997, yakni dari 11 suara menjadi 4 suara di DPRD Kota Medan. Tahun 2004, tidak mengalami perubahan, dan tahun 2009, mengalami penurunan perolehan suara menjadi 3 orang saja wakilnya di DPRD Kota Medan.
2. Faktor-faktor penyebab penurunan perolehan suara dan kursi PPP di DPRD Kota Medan antara lain disebabkan melemahnya dukungan masyarakat terhadap PPP, program kegiatan yang ditawarkan PPP Kota Medan kepada masyarakat yang kurang menarik, peran tokoh PPP yang kurang mampu menarik perhatian masyarakat pemilih, khususnya umat Islam, dan persaingan antar partai politik peserta pemilu dalam merebut simpati dan suara masyarakat pemilih.
3. Respon yang diberikan umat Islam terhadap eksistensi PPP dalam mengakomodir kepentingan umat Islam dipandang dari dua sisi, yakni sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dipandang bahwa PPP Kota Medan sudah mampu mengakomodir kepentingan umat Islam dalam menyuarakan kepentingannya terhadap pemerintah, baik pemerintahan Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, maupun pemerintahan pusat. Sementara itu, sisi negatif dianggap PPP tidak mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Medan, khususnya umat Islam.

4. Problematika yang dihadapi oleh PPP dalam perkembangannya di Kota Medan diperhatikan dari sudut problematika internal dan problematika eksternal. Problematika internal antara lain elit politik partai yang merasa kurang memiliki partai, konsolidasi kader dan program kegiatan yang tidak berjalan dengan mulus, rekrutmen kader/pengurus yang kurang profesional, dan adanya kader yang bermasalah atau terlibat kasus-kasus. Sementara itu, problematika eksternal yang dihadapi PPP Kota Medan antara lain persaingan antar partai politik, dan perkembangan masyarakat pemilih yang semakin cerdas dan dinamis.

## **B. Saran-Saran**

1. Disarankan kepada pengurus PPP yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan masa bakti 2010-2015 untuk mengembangkan PPP lebih dinamis dan menyesuaikan program kerja partai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Kota Medan yang semakin dinamis, tanpa meninggalkan identitas dan ciri khas dari PPP, yang mengutamakan kepentingan umat Islam agar mampu teraplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kerangka NKRI yang utuh.
2. Disarankan kepada pengurus PPP, khususnya DPC PPP Kota Medan untuk lebih lebih akomodatif terhadap aspirasi dan kepentingan umat Islam, lebih dinamis dalam mengembangkan organisasi politik ini, terutama dalam mengakomodir anggota dari kalangan muda, sehingga tercipta regenerasi secara berkesinambungan yang lebih baik, dan mampu menyahuti kepentingan kawula muda Islam.
3. Disarankan kepada umat Islam untuk mencermati secara dinamis perkembangan PPP, apabila memungkinkan mampu menyahuti kepentingan umat Islam, adalah lebih baik mengalihkan aspirasi kepada PPP sebagai penyalur aspirasi umat Islam yang sudah lama berkiprah di dunia politik Indonesia.
4. Disarankan kepada pemerintah yang ada saat sekarang ini, baik pemerintahan Kota Medan, pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, dan

pemerintahan Pusat agar menganggap sama kedudukan partai politik berbasis Islam dengan partai Nasional, serta memberikan perhatian yang sama, baik dalam mengakomodir kepentingan partai politik, maupun dalam membantu menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan oleh partai politik. Sehingga ada keseimbangan antara partai politik nasional dengan partai politik Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pengembangan Kota Medan yang lebih baik dan bernuansakan nilai-nilai religius Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan, *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Antar Kota, 1983.
- Ali, Mohammad Daud, Habibaah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amin, Ahmad, *Islam dari Masa Ke Masa*, Terj Abu Laila & Muhammad Tohir, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. I, 1997.
- Amiruddin, Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Amir, Zainal Abidin, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- Andriaanse, E. Gobebe, C., *Nasehat-Nasehat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda*, Jakarta: Seri Khusus INIS VIII, 1993.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Komitmen Umat Islam, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam*, Jakarta: Usaha Enterprise, 1976.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Anwar, Saiful, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Badudu, JS. *Kamus Ilmiah Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2003.
- Benda, Harry J. *The Crescent and The Rissing Sun: Indonesia Islam under Javanese Occupation 1942-1980*, Terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Boechari, Sidi Ibrahim, *Pengaruh Timbal Balik Antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau*, Jakarta: Gunung Tiga, 1981.
- Boland, B.J., *Pergumulan Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafiti pers, Cetakan Pertama, 1985.

- Cipto, Bambang, *Duel Segitiga PPP Golkar PDI Dalam Pemilu 1997*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Pers, 1995.
- Dijk, C. Van. *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafittipers, 1983.
- Djumhur dan H. Danusuprata, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: Cerdas Cet. II, 1961.
- Djumhur, I., *Sejarah Pendidikan*, Bandung: CV. Ilmu, 1979.
- DPP Partai Bulan Bintang, *Political Mapping*, Musyawarah Kerja Nasional II DPP PBB, Anyer-Banten, 14-17 September 2001.
- Eickelmen, Dale F., James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, Bandung: Mizan, 1998.
- Ensiklopedia Indonesia, *Artikel Permi*, tt, tp, tt.
- Haris, Syamsuddin, *PPP dan Politik Orde Baru*, Jakarta: Grasindo, 1991.
- Hasan, Sahar L. et.all, *Memilih Partai Islam: Visi, Misi dan Persepsi*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hasballah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hatta, Muhammad, *Sekitar Proklamasi*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Irsyam, Mahrus, *Ulama dan Partai Politik, Upaya Mengatasi Kritis*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984.
- Katimin, *Politik Islam Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Katimin, *Politik dan Masyarakat Pluralis*, Jakarta: Cita Pustaka Media, Cet. Pertama, 2010.
- Ma'arif, Ahmad Syafii, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mamudunnasir, Syed, *Islam its Concepts and History*, Terj. Adang Affandi, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988.

- Marijan, Kacung, *Respon NU Terhadap Pembangunan Politik Orde Baru*, Tp, Jurnal Ilmu Politik, 1991.
- Mashad, Dhurorudin. *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Mas'ood, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muchtrom, Zaini. *Santri dan Abangan di Jawa*. Jakarta: INIS. 1988.
- Muhaimin, Yahya, *Bisnis dan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Nata, Abuddin, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Natsir, M., *Capita Selecta II*, Jakarta: Pendis, 1957.
- Annawawy, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *Tarjamah Riadhus Shalihin 1*, Alih Bahasa: H. Salim Bahreisy, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Pers, 1987.
- Pringgodigdo, A.K., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1967.
- Rabiah, Rumidah, *Lebih Dekat Pemilu di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Raharjo, M. Dawam, *Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996.
- Saidi, Ridwan, *Pemuda Islam Dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Salim, Hairul HS et all, *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta: Lkis, 1999.

- Seri Penerbitan Studi Politik, *Evaluasi Pemilu Orde Baru, Mengapa 1996-1997 Terjadi Berbagai Kerusakan ? Menyimak Gaya Politik M. Natsir*, Bandung: Mizan, 1997.
- Siddiqi, Amir Hasan, *Studies In Islamic History* (Edisi Indonesia), Alih Bahasa: H.M.J. Irwan, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Soebekti, E.et.all (Tim Penyunting), *Di Saat Ekonomi Terpuruk Partai Politik Rame-Rame Pecah Kongsi*, Jakarta: PT. Gria Media.
- Soekarno, *Pancasila Dasar Negara*. Jakarta: Inti Idayu Press, Yayasan Pendidikan Soekarno, 1986.
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: Pustaka LP3ES, Cetakan Ketiga, 1990.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, Cet. IV, 1998.
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Tanthowi, Pramono U., *Kebangkitan Politik Kaum Santri*, Jakarta: PSAP, 2005.
- Thohir, Ajib. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik dan Budaya Umat Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, Yogyakarta: Siperss, 1994.
- Yamin, Muhammad, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Zada, Khamimi, *Partai Islam dan Pemilu 2004*, Jakarta: Kompas, Jum'at, 19 Desember 2003.
- Zahrah, Imam Muhammad Abu, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, Terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, Jakarta: Logos Publishing House, Cet. I, 1996.
- Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Zuhri, KH. Saifuddin, *Kaleidoskop Politik di Indonesia I*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982.

Kalau dapat data tambahan untuk tesis ke depan a.l :

A. Tahun 1997 :

1. Jumlah penduduk Kota Medan seluruhnya.
2. Jumlah Penduduk Kota Medan berdasarkan Usia, Agama, dan Pendidikan
3. Jumlah penduduk Kota Medan yang berhak memilih.
4. Jumlah penduduk Kota Medan yang memilih.
5. Jumlah penduduk Kota Medan yang tidak memilih.
6. Jumlah Perolehan suara partai politik keseluruhan
7. Jumlah Perolehan Kursi di DPR, DPRD. I dan DPRD. II Kota Medan

B. Tahun 1999 :

8. Jumlah penduduk Kota Medan seluruhnya.
9. Jumlah Penduduk Kota Medan berdasarkan Usia, Agama, dan Pendidikan
10. Jumlah penduduk Kota Medan yang berhak memilih.
11. Jumlah penduduk Kota Medan yang memilih.
12. Jumlah penduduk Kota Medan yang tidak memilih.
13. Jumlah Perolehan suara partai politik keseluruhan
14. Jumlah Perolehan Kursi di DPR, DPRD. I dan DPRD. II Kota Medan

C. Tahun 2004 :

15. Jumlah penduduk Kota Medan seluruhnya.
16. Jumlah Penduduk Kota Medan berdasarkan Usia, Agama, dan Pendidikan
17. Jumlah penduduk Kota Medan yang berhak memilih.
18. Jumlah penduduk Kota Medan yang memilih.
19. Jumlah penduduk Kota Medan yang tidak memilih.
20. Jumlah Perolehan suara partai politik keseluruhan
21. Jumlah Perolehan Kursi di DPR, DPRD. I dan DPRD. II Kota Medan

